



Dengantar
SOSIOLOGI
PERKOTAAN



Prof. Dr. Damsar
Dr. Indrayani



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PERKOTAAN ...	1
A. Pengertian Sosiologi	1
B. Pengertian Perkotaan	18
C. Pengertian Sosiologi Perkotaan	22
D. Perkotaan sebagai Kajian Interdisiplin dan Intradisiplin.....	26
E. Sosiologi Perkotaan Sebagai Ilmu Murni dan Ilmu Terapan..	28
BAB 2 PERKEMBANGAN SOSIOLOGI PERKOTAAN.....	33
A. Peletak Fondasi Sosiologi Perkotaan	33
B. Penguat Fondasi Sosiologi Perkotaan	44
C. Perkembangan Teori Sosiologi sebagai Sejarah Pendekatan Sosiologi Perkotaan	49
D. Perkembangan Pendekatan Dalam Sosiologi Perkotaan.....	64
BAB 3 MASYARAKAT PERKOTAAN.....	67
A. Penelusuran Ulang Konsep Masyarakat Perkotaan.....	67
B. Masyarakat Perkotaan dalam Perspektif Sosiologis	71
C. Tipologi (Masyarakat) Perkotaan.....	81
BAB 4 POLITIK PERKOTAAN	87
A. Konsep Politik Perkotaan	87

B. Tiga Pilar Kekuasaan di Perkotaan.....	89
C. Kekuasaan di Perkotaan.....	115
BAB 5 DINAMIKA PERKOTAAN	133
A. Urbanisasi	133
B. Urbanisme	140
C. Pertumbuhan Kota	147
D. Simbolisasi Perkotaan	153
E. Mcdonaldisasi Perkotaan.....	159
F. Sisi Gelap Dinamika Perkotaan: Kemiskinan.....	162
BAB 6 PARADOKS PERKOTAAN	175
A. Perumahan Mewah Versus Perumahan Kumuh	175
B. Ekonomi Formal Versus Ekonomi Informal	188
C. Ruang Privat Versus Ruang Publik	210
D. Transportasi Pribadi Versus Transportasi Umum.....	218
REFERENSI	223
INDEKS	239
PARA PENULIS	245





1

Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Perkotaan

A. PENGERTIAN SOSIOLOGI

Berbagai macam cara untuk memahami suatu kajian ilmu. Salah satunya adalah mencari tahu pengertian bidang kajian ilmu tersebut. Memahami bidang kajian ilmu melalui pemahaman tentang pengertian bidang kajian ilmu tersebut ternyata tidak mudah, karena harus berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak dan beragamnya pengertian para ahli yang dibuat tentang bidang kajian ilmu tersebut. Oleh karena itu, sebelum membahas hal yang lain, perlu didudukkan terlebih dahulu pemahaman tentang titik tolak buku ini, dengan meletakkan fondasi pemahaman berdasarkan pengertian sosiologi yang akan digunakan dalam buku ini.

Tidak mudah memang untuk mengonstruksi pengertian sosiologi. Dalam menajamkan pemahaman tentang pengertian sosiologi, untuk keperluan buku ini, ditelusuri pengertian dari peneroka dari sosiologi dan dilanjutkan dengan pengertian dari ilmuwan yang mengembangkan pengertian yang ada sebelumnya. Adapun peneroka yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Emilé Durkheim dan Max Weber. Adapun yang dimaksud dengan ilmuwan yang mengembangkan pengertian yang ada sebelumnya, paling tidak dari dua sosiologi yang disebutkan terdahulu, adalah adalah Peter L. Berger. Dalam memahami pandangan ketiga tokoh tersebut, sebelumnya akan didiskusikan tentang riwayat hidup singkat hidup mereka.

1. Pengertian Sosiologi Emile Durkheim

Durkheim dilahirkan di Epinal Perancis pada 1858 dari keluarga Yahudi, ayahnya Rabi. Studi di Ecole Supérieure di Paris. Dari 1887 sampai 1902 menjadi guru besar dalam ilmu-ilmu sosial di Bordeaux. Pada masa tersebut ia berhasil menulis buku yang monumental, yaitu tentang *The Division of Labor in Society*, *The Rules of Sociological Method*, dan *Suicide*. Setelah itu ia pindah ke Universitas Sorbonne di Paris. Pada masa ini, ia kembali menerbitkan buku *The Elementary Forms of the Religious Life*. Berbeda dengan Karl Marx, sumbangan Emile Durkheim menekankan sisi yang berbeda dalam melihat realitas.

Sebagai peneroka sosiologi ada beberapa karya-karya utama yang sering dirujuk oleh para ahli sosiologi dari Emile Durkheim, adalah sebagai berikut:

- *The Division of Labor in Society* (1893)
- *The Rules of Sociological Method* (1895)
- *Suicide* (1897)
- *The Elementary Forms of Religious Life* (1912)

Salah satu sumbangan berharga bagi sosiologi dari Emile Durkheim adalah memisahkan sosiologi dari filsafat sosial dan menguatkan sosiologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mandiri. Untuk menegaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mandiri, Durkheim menulis *The Rules of Sociological Methods*. Durkheim menegaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial. Batasan yang dikemukakan Durkheim tersebut tidak dengan sendirinya bisa dipahami sebelum diterangkan apa yang dimaksud dengan konsep ilmu dan fakta sosial.

a. Konsep Ilmu

Konsep ilmu dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan (*sains/science*). Pada masa Durkheim, sosiologi masih melekat pada filsafat, khususnya filsafat sosial, sehingga ada gerakan dari berbagai cabang ilmu, khususnya ilmu-ilmu sosial, untuk melepaskan diri dari filsafat tersebut. Dalam kerangka itulah Durkheim mendeklarasikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari fakta sosial. Pandangan Durkheim tersebut dipengaruhi oleh positivisme.

Apa itu positivisme? Konsep positivisme, dikenal juga dengan metode positif, digagas pertama kali oleh Henri de Saint Simon (Laeyen-



decker, 1983; 137). Metode positif menunjuk pada pendekatan terhadap pengetahuan empirik. Menurut pendekatan ini, semua yang kita tahu akhirnya berasal dari pengalaman indriawi atau data empirik (Johnson, 1986: 26). Metode positif ini selanjutnya dikembangkan oleh Auguste Comte, dikenal juga sebagai Bapak Sosiologi. Comte, seperti yang dikatakan Laeyendecker (1983: 145), mengemukakan beberapa karakteristik dari metode positif, yaitu: *pertama*, metode positif memiliki pengertian bahwa metode ini diarahkan kepada fakta-fakta dan tidak kepada misteri-misteri yang tidak dapat diketahui; *kedua*, metode ini mengarahkan perhatian kepada hal-hal yang bermanfaat, yaitu untuk perbaikan berkelanjutan dari persyaratan kehidupan, dan dengan demikian berlawanan dengan metode yang hanya membantu untuk memberi kepuasan kepada kehendak keingintahuan semata; *ketiga*, metode ini berusaha ke arah kepastian; dan *keempat*, metode ini berusaha ke arah kecermatan. Jadi, lanjut Laeyendecker, metode positif merupakan pengetahuan tentang fakta-fakta yang pasti, cermat dan berguna (Damsar, 2015).



Emilé Durkheim

Para penganut positivisme percaya bahwa masyarakat atau kehidupan sosial merupakan bagian dari alam. Adapun alam itu sendiri dipandang memiliki hukum-hukumnya sendiri yang bersifat universal, misalnya hukum Boyle, hukum gravitasi, dan lain sebagainya. Karena masyarakat atau kehidupan sosial merupakan bagian dari alam, maka oleh sebab itu dapat pula ditemukan hukum-hukum masyarakat atau kehidupan sosial yang bersifat universal pula, berlaku pada semua ruang dan waktu. Untuk menemukan hukum masyarakat atau kehidupan sosial yang universal tersebut, teknik, cara atau metode yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan alam dapat pula digunakan. Adapun metode positif yang digunakan untuk menemukan hukum universal tersebut berupa observasi (pengamatan), komparasi (perbandingan), eksperimen, dan metode historis.

Kembali kepada konsep ilmu, apa sebenarnya dipahami sebagai ilmu? Apa saja suatu pokok persoalan kajian dapat dikatakan sebagai suatu ilmu? Untuk memahami itu perlu kiranya merujuk apa saja sebenarnya karakteristik ilmu? Berikut ini dipaparkan beberapa karakteristik ilmu:



1) **Empiris.**

Karakteristik empiris dipahami sebagai sesuatu yang didasarkan atas pengamatan (observasi) dan penalaran. Pengamatan menunjuk pada penggunaan pancaindra dalam memahami dan mengalami kehidupan, termasuk kehidupan sosial. Adapun penalaran berkaitan dengan penggunaan akal budi (rasio) manusia. Sehingga hasil kegiatan empiris ini tidak dipandang sebagai suatu hal yang spekulatif, karena kegiatan empiris selalu dikaitkan dengan fakta dan data. Bagaimana kita memahami hal ini? Mari kita ambil sebuah contoh. Masyarakat Tionghoa di Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki jiwa wiraswasta (*enterpreneurship*). Pernyataan ini bersifat empiris. Kenapa? Kalau kita melancong ke berbagai penjuru kota menengah dan besar di Nusantara ini maka akan ditemukan komunitas Tionghoa yang bergerak dalam bisnis, terutama perdagangan. Kenapa jiwa wiraswasta dimiliki oleh masyarakat Tionghoa? Jika ditelusuri jauh ke dalam komunitas Tionghoa tersebut ternyata ditemukan kenyataan bahwa terdapat kecenderungan keluarga Tionghoa tinggal di rumah toko (ruko). Dengan tinggal di ruko, antara dunia kerja dengan dunia keluarga dan kerumahtanggaan tidak terpisah secara tegas. Pada saat seorang anggota keluarga bekerja di toko, yaitu bagian terbawah dari bangunan yang dimiliki, sebenarnya, aktivitasnya terkait dengan aktivitas anggota lainnya yang berada pada bagian lain bangunan yang disebut dengan tempat tinggal. Demikian juga dengan generasi muda dari keluarga tersebut belajar tentang berbagai dunia kehidupan secara sekaligus, yaitu antara dunia kerja dan dunia keluarga dan kerumahtanggaan. Ketika sang anak baru bangun tidur, suasana dan situasi yang pertama dikenalnya adalah ibu dan kakaknya yang sibuk di dapur serta ayah dan abangnya yang sedang sibuk melayani pembeli.

2) **Teoretis.**

Ilmu ditandai dengan abstraksi yang disusun dari hasil pengamatan dan penalaran yang telah dilakukan. Abstraksi tersebut disusun secara logis, sistematis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori. Mari kita lanjutkan contoh keluarga Tionghoa di atas. Realitas yang digambarkan di atas, yaitu proses belajar anak Tionghoa tentang dunia kerja dan dunia keluarga dan kerumahtanggaan tersebut di atas dapat kita abstraksikan sebagai realitas sosialisasi. Karena sosialisasinya berkait



dengan dunia bisnis, maka kita bisa menyusun teori atas kenyataan tersebut sebagai berikut: “sosialisasi keluarga menentukan jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*) dari anak Tionghoa”.

3) **Kumulatif.**

Ilmu bersifat kumulatif berarti teori dibangun atas teori-teori yang berkembang sebelumnya. Dengan kata lain, teori-teori yang ada (lama) diperhalus, dipertajam, dikembangkan, dimodifikasi, dan disempurnakan atas kenyataan empiris yang baru. Mari kembali lagi bersama contoh di atas. Ternyata kesempatan yang dibatasi oleh aturan perundangan yang diciptakan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintahan Republik Indonesia di mana masyarakat Tionghoa tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan pemerintahan seperti pegawai pemerintahan sipil, polisi, tentara, dan lainnya sehingga hanya bisnis satu-satunya yang tersedia bagi komunitas Tionghoa sebagai pekerjaan maka teori sebelumnya dipertajam menjadi “jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*) orang Tionghoa dipengaruhi oleh kesempatan yang tersedia dan sosialisasi dalam keluarga”.

4) **Objektif.**

Apabila ilmu(wan) harus memiliki sifat objektif berarti bahwa ilmu(wan) tidak mempersoalkan buruk-baiknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah menjelaskan fakta secara apa adanya dengan kerangka teori yang ada tanpa memasukkan unsur subjektif pribadi. Dalam hal penjelasan fakta jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*) orang Tionghoa mungkin tidak terkait terlalu banyak dengan nilai subjektif ilmu(wan). Namun apabila penelitiannya berkisar tentang sesuatu yang bersinggungan dengan moral, akhlak, susila dan sejenisnya, maka persoalan subjektivitas akan muncul. Jika meneliti tentang korupsi, misalnya, seorang ilmuwan tidak akan memberikan penilaian subjektif baik buruk secara moral dan agama tetapi barangkali ia menanyakan tentang mengapa korupsi bisa muncul, bertahan bahkan menjadi bagian dari kehidupan.

b. Fakta Sosial

Konsep berikutnya yang perlu dipahami adalah fakta sosial. Fakta sosial yang dimaksudkan oleh Durkheim tidak sama dengan konsep fakta yang dipahami oleh orang awam (orang kebanyakan). Dalam kehidupan sehari-hari, orang awam memahami fakta berhubungan dengan



semua yang tampak dan ditangkap oleh pancaindra. Adapun fakta sosial menurut Durkheim adalah semua cara bertindak, berpikir dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial, Oleh karena itu, memiliki tiga karakteristik: pertama, *external*, yaitu di luar individu. Fakta sosial ada sebelum individu ada dan akan tetap ada setelah individu tiada; kedua, *determined coercive*, yaitu fakta sosial memaksa individu agar selalu sesuai dengannya (fakta sosial); dan ketiga, *general*, yaitu tersebar luar dalam komunitas/masyarakat, milik bersama, bukan milik individu. Jadi, kepentingan dan motif individu, misalnya, tidak termasuk fakta sosial dalam pandangan Durkheim, karena kepentingan dan motif merupakan sesuatu yang bersifat internal dari seorang individu.

Mari kita pahami dengan contoh. Misalkan Anda melakukan studi tentang konsumsi dengan menggunakan fakta sosial. Bagaimana Anda melakukannya? Anda harus membatinkan pemikiran Anda bahwa konsumsi dipandang sebagai fakta sosial. Itu artinya bahwa kenyataan konsumsi, misalnya pola busana, pola konsumsi, atau cara makan, merupakan kenyataan yang bersifat eksternal, umum dan memaksa. Apa maksudnya? Misalkan pernahkah Anda memimpikan tampil beda secara ekstrem dengan apa yang diterima secara apa adanya selama ini? Katakanlah dalam berbusana misalnya! Jika Anda seorang pria, mungkin pernah terlintas dalam pikiran untuk memperlihatkan tubuh Anda yang atletis bak otot besi, kukuh, kuat, dan menarik, kepada khalayak melalui busana renang, seperti yang dipertunjukkan iklan dari salah satu produk minuman suplemen di televisi. Lintasan pikiran tersebut tidak pernah diwujudkan dalam dunia nyata, kecuali di kolam renang. Kenapa? Karena Anda takut tampil beda dengan pola busana yang ada dalam masyarakat Anda! Dengan kata lain, Anda takut terhadap sifat (karakteristik) memaksa dari fakta sosial. Jika Anda realisasikan lintasan pikiran Anda tersebut untuk memakai busana renang pada saat Anda mengunjungi, misalnya, apa yang terjadi? Orang-orang yang berpapasan dengan Anda akan kaget melihat cara Anda berbusana. Di antara mereka mungkin ada yang berucap: “kasihan ya, orangnya gagah, tapi gila!”, “bocor kali ya”, atau “lupa makan obat kali”. Atau bahkan sebelum masuk ke kampus Anda sudah dicegat terlebih oleh petugas keamanan kampus, karena dikira orang tidak waras yang mungkin akan merusak keamanan dan ketenteraman kampus. Sifat memaksa fakta sosial dalam kasus ini ditunjukkan oleh ucapan orang lain terhadap Anda bahwa Anda tidak waras,



BAB 3

MASYARAKAT PERKOTAAN

A. PENELUSURAN ULANG KONSEP MASYARAKAT PERKOTAAN

Pertama dilakukan merekam jejak pengertian para ahli, termasuk sosiolog, tentang masyarakat. Soekanto menemukan beragam pengertian para ahli sosiologi tentang masyarakat (1997). Salah satu dari berbagai pengertian ahli tentang masyarakat yang telah didiskusikan adalah pengertian yang dibuat oleh Peter L. Berger (1966). Pemahaman konsep masyarakat akan lebih tajam apabila ada perbandingan gagasan pengertian masyarakat dari ahli lain. Untuk itu kita membandingkan dengan gagasan pengertian menurut Paul B Horton dan Chester L. Hunt (1987 : 59).

Horton dan Hunt (1987 : 59) membuat batasan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Batasan Horton dan Hunt ini relatif jelas tanpa diberi penjelasan tambahan, kecuali konsep kebudayaan.

Seperti halnya konsep masyarakat, konsep kebudayaan didefinisikan secara berbeda oleh ahli kebudayaan dan sosiologi. Untuk keperluan pemahaman diambil 2 definisi kebudayaan, yaitu definisi dari Sir Edward Tylor serta Horton dan Hunt. Definisi Tylor tentang kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Definisi Tylor merupakan definisi kebudayaan yang klasik, sesuai dengan perkembangan ilmu sosial pada masa itu. Dalam definisi ini dipandang bahwa seseorang menerima kebudayaan sebagai bagian dari warisan sosial. Pandangan seperti ini memberi kesan bahwa manusia adalah makhluk yang pasif, karena ia hanya sebagai pewaris. Pandangan tersebut bisa dipahami karena semua unsur yang disebutkan oleh Tylor di atas sudah ada sebelum seseorang lahir dan ia

tinggal memakai dari apa yang diwarisinya tersebut. Ketika seorang anak manusia lahir di Indonesia dia sekedar menerima bahwa cara mengupas mangga bermula dari sisi dalam menuju ke arah luar. Dia akan kaget karena ternyata ketika dia berada di Eropa orang mengupas mangga bermula dari sisi luar menuju ke arah dalam.

Sedangkan Horton dan Hunt (1987: 58) mendefinisikan kebudayaan sebagai segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Definisi Horton dan Hunt ini menempatkan manusia tidak hanya sebagai insan yang pasif yaitu mempelajari apa yang telah ada, tetapi juga sebagai insan yang aktif yaitu mengalami bersama secara sosial. Pada saat lahir di muka bumi, manusia diajari berbagai macam unsur budaya seperti pengetahuan, keyakinan, moral, hukum, adat istiadat dan sebagainya oleh terutama orang tua dan anggota dewasa keluarga batih lainnya. Di samping itu, manusia memiliki pengalaman baru bersama yang berbeda dari pengalaman yang mereka warisi sebelumnya.

Melalui definisi budaya seperti yang disebutkan di atas, maka menurut Horton dan Hunt (1987: 58), seorang menerima kebudayaan sebagai bagian dari warisan sosial, dan pada gilirannya, bisa membentuk kebudayaan kembali dan mengenalkan perubahan-perubahan yang kemudian menjadi bagian dari warisan generasi yang berikutnya. Untuk memahami hal tersebut, mari kita ambil suatu ilustrasi. Dalam keluarga muslim, misalnya, anak-anak diajarkan makan dalam keadaan duduk dan di larang berdiri. Namun ketika dewasa, dia dapati berbagai acara jamuan makan dalam keadaan berdiri. Budaya makan yang diwarisi dari orangtuanya tersebut bisa berubah pada saat dia dihadapkan pada berbagai pengalaman baru dan melihat pengalaman baru tersebut sebagai sesuatu yang lebih bagus dari yang lama. Konsekuensinya adalah pengalaman baru ini menjadi budaya baru di kalangan generasinya.

Kembali kepada definisi masyarakat dari Horton dan Hunt, definisi tersebut menempatkan sosiologi pada tataran makro. Jika definisi kebudayaan dalam masyarakat dipahami melalui pandangan Tylor, maka sosiologi ditempatkan pada tataran makro objektif, yaitu tataran makro yang berada diluar sana dan bersifat eksternal. Sedangkan kalau dipahami dengan perspektif Horton dan Hunt sendiri, maka sosiologi diposisikan pada tataran makro objektif-subjektif, yaitu makro yang berada di luar sana (eksternal), juga dapat makro yang berasal dari kesadaran individu (internal).

Berbeda dengan Horton dan Hunt, menurut P. L. Berger, seperti telah didiskusikan pada bab sebelumnya, masyarakat dilihatnya sebagai suatu keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya. Dengan definisi Berger, maka misalnya hubungan persahabatan dan keluarga, bisa disebut merupakan masyarakat. Berbeda dengan definisi Horton dan Hunt yang lebih menekankan pada aspek ruang dan kuantitas, Berger lebih menekankan pada aspek kualitas dan konstruktif. Buku ini mengakomodasi kedua pandangan ahli sosiologi tersebut.

Masyarakat, oleh sebab itu, dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya di mana sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

Bagaimana dengan konsep kota atau perkotaan? Pada bab 1 dan bab 2 telah didiskusikan panjang lebar tentang cara perumusan konsep kota oleh para ahli dengan melihat perbedaan berdasarkan statistik penduduk, relasi sosial, dan infrastruktur ekonomi. Serta karakteristik kota yang menjadi landasan pemikiran buku ini, yaitu atas dasar perbedaan kehendak manusia (*wille/will*) dan keberadaan ekonomi pasar. Namun penjelasan tersebut belum sampai kepada apa itu masyarakat perkotaan.

Apabila telah diketahui tentang batasan atau pengertian dari kedua konsep tersebut, maka kedua batasan yang telah didiskusikan dapat disatukan atau digabungkan pengertiannya. Masyarakat perdesaan, misalnya dengan mengikuti pemikiran Horton dan Hunt, dipahami sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah (lokalitas/tempatan) mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut dalam jumlah sekitar lebih dari 2500 orang, dengan relasi sosial yang parsial, transaksional dan non afeksi dari ekspresi kehendak rasional (*Kurwille*) dengan ekonomi pasar.

Definisi tentang masyarakat kota telah dibuat, namun pemahaman kita tentang realitas kota – desa perlu dipertajam. Mari kita lanjutkan bahasan tentang garis kontinum masyarakat kota - desa. Kita telah memiliki dua garis kontinum untuk mencirikan

masyarakat kota dan desa. Satu, garis kontinum di mana masyarakat desa dan kota menjadi masing-masing kutub ekstrimnya maka masyarakat desa ditandai dengan wessenwille dan ekonomi non pasar di satu sisi dan masyarakat kota ditandai dengan kurwille dan ekonomi pasar di sisi lain. Selanjutnya penjelasan visual melalui gambar 3.1. garis kontinum desa kota atas dasar kehendak manusia dan ekonomi pasar dibuat untuk memahami hal ini lebih jelas.

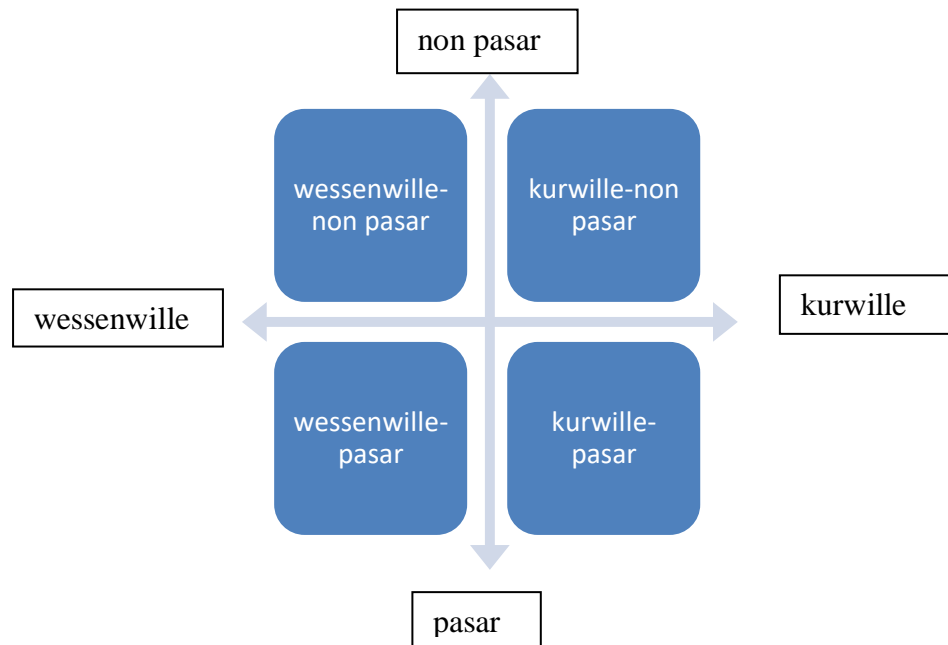


Gambar 3.1. Dua Kontinum Masyarakat Desa Kota

Dua kontinum di atas akan memunculkan pertanyaan ketika kedua kontinum tersebut digabungkan. Apakah dua kutub kontinum desa – kota merupakan suatu yang homogen atau sebaliknya memunculkan beberapa variasi ciri yang menghiasi realitas desa – kota. Kita menemukan variasi realitas desa – kota, yaitu desa yang bercirikan wessenwille dengan ekonomi non pasar, desa yang wessenwille dengan telah berkembangnya ekonomi pasar. Desa wessenwille dengan ekonomi pasar yang berkembang, bisa juga dilihat sebagai desa yang sedang mengalami transformasi atau transisi menuju kota. Kota yang memiliki karakteristik kurwille dengan ekonomi pasar, dan kota yang kurwille dengan ekonomi non pasar. Untuk memahami lebih dalam bisa dibantu dengan gambar 3.2. berikut.

Variasi masyarakat desa – kota akan bertambah kompleks bila variabel kehendak manusia dan ekonomi pasar dibuat skalanya, misalnya skala rendah, sedang, dan tinggi. Oleh sebab itu, sebagai penegasan, sepanjang manusia tetap memiliki kehendak

wessenwille dan kurwille yang dikaitkan dengan lokalitas (tempatan), maka sepanjang itu pula diskusi tentang masyarakat desa – kota tetap eksis.



Gambar 3.2. Tipologi Masyarakat Desa - Kota

Catatan: Wessenwille diartikan sebagai kehendak alamiah dan kurwille bermakna kehendak rasional.

B. MASYARAKAT PERKOTAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Barusan kita telah mendiskusikan konsep masyarakat kota atau perkotaan yang digunakan sebagai basis pemikiran penulis dalam buku ini. Definisi tersebut telah memberikan penjelasan yang cukup bagi kita untuk memahami tentang konsep masyarakat desa - kota. Untuk memahami konsep masyarakat desa – kota lebih dalam lagi, kita menelusuri lagi jejak pemikiran para peneruka sosiologi tentang konsep kota atau pekotaan atau karakteristik yang diindikasikan sebagai kota atau perkotaan. Pemikiran beberapa sosiolog tentang masyarakat kota akan mempertajam pemahaman kita tentang hal tersebut secara holistik.

1. *Gemeinschaft* Versus *Gesellschaft*

Salah satu ahli sosiologi yang memberikan perhatian terhadap masyarakat dalam kaitannya perbedaan antara perdesaan dan perkotaan adalah Ferdinand Tönnies. Dia membedakan antara *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. *Gemeinschaft* dipahami sebagai paguyuban dan *Gesellschaft* sebagai patembayan oleh Soerjono Soekanto (1997: 144). Sedangkan kebanyakan terjemahan buku teks lazim menerjemahkan *Gemeinschaft* sebagai asosiasi atau kelompok dan *Gesellschaft* sebagai masyarakat. *Gemeinschaft* ditandai oleh hubungan yang dibangun atas dasar *Wessenwille* yaitu kehendak alamiah yang merupakan ekspresi dari kebutuhan naluriah, kebiasaan, keyakinan atau kecenderungan manusia. Kehendak alamiah menghasilkan hubungan bersifat intim, pribadi dan afeksi antara sesama manusia. Oleh sebab itu hubungan seperti ini dipandang berstruktur organisme, yaitu relasi yang diekspresikan karena adanya saling ketergantungan antara satu sama lainnya.

Sedangkan *Gesellschaft* dicirikan dengan hubungan sosial yang dikonstruksi dengan bangunan dasarnya adalah *Kurwille* yaitu kehendak rasional, merupakan kehendak yang berlandaskan rasionalitas instrumental dalam pemilihan alat untuk mencapai tujuan. Kehendak rasional menciptakan hubungan parsial, transaksional, dan netral afeksi. Hubungan seperti ini dilihat memiliki struktur mekanisme, yaitu relasi yang terbangun karena pertukaran antar individu yang bebas, yang hubungan antara satu dengan lain bersifat asing, pertentangan dan kadang-kadang bahkan permusuhan (Laeyendecker, 1983: 311). Untuk memahami lebih baik bisa dilihat melalui perbandingan tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Relasi Sosial dalam *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*

Relasi	<i>Gemeinschaft</i>	<i>Gesellschaft</i>
Dasar	<i>Wessenwille</i>	<i>Kurwille</i>
Sifat	Intim, pribadi, afeksi	Parsial, transaksional, netral afeksi
Struktur	Organisme	Mekanisme

Tipologi pemikiran Tönnies dalam dimensi lain ditampilkan oleh Piötr Sztompka dalam bukunya Sosiologi Perubahan Sosial. Sztompka melihat bahwa hubungan sosial dalam *Gemeinschaft* didominasi oleh ikatan keluarga, yang berarti juga menjadikan keluarga sebagai institusi yang khas. Sedangkan dalam *Gesellschaft* hubungan sosial lebih ditandai oleh pertukaran ekonomi dengan institusi khususnya adalah negara dan ekonomi. Citra individu dalam *Gemeinschaft* melekat dalam kedirian, sedangkan dalam *Gesellschaft* tersimpul dalam orang atau warga.

Sementara kekayaan dalam *Gemeinschaft* dipresentasikan dalam tanah, sedangkan *Gesellschaft* dicirikan kepemilikan uang. Dalam *Gemeinschaft* tipe hukum yang utama adalah hukum keluarga dengan kontrol sosial berada pada adat dan agama; sebaliknya dalam *Gesellschaft* tipe hukum yang berkembang adalah hukum kontrak dengan hukum dan pendapat hukum sebagai kontrol sosial. Institusia sosial sentral *Gemeinschaft* adalah desa; sedangkan dalam *Gesellschaft* adalah kota. Simpulan pandangan Sztompka tentang *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* dari Tönnies dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Perbandingan Menurut Sztompka tentang *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* dari Tönnies

Ciri	<i>Gemeinschaft</i>	<i>Gesellschaft</i>
Hubungan sosial	Ikatan keluarga	Pertukaran ekonomi
Institusi khas	Keluarga	Negara dan ekonomi
Citra tentang individu	Kedirian	Orang, warga
Bentuk kekayaan	Tanah	Uang
Tipe hukum	Hukum keluarga	Hukum kontrak
Institusi sentral	Desa	Kota
Kontrol sosial	Adat dan agama	Hukum dan pendapat umum

Sumber: Piötr Sztompka (2004: 123-124)

2. Solidaritas Mekanik Versus Solidaritas Organik

Peneroka sosiologi lain yang menjelaskan perbedaan antara masyarakat desa dan kota adalah Emile Durkheim. Berikut ini kita coba pahami pemikirannya. Dalam bukunya *the Division of Labor in Society*, Durkheim menjelaskan tentang dua tipe solidaritas sosial dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Pokok permasalahan dari gagasan atau ide buku tersebut adalah pertanyaan tentang apa yang mengikat dan mempersatukan orang ? Apa yang mempersatukan orang, misalnya, antara di dalam masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan.

Untuk tujuan penguatan pemahaman, perbandingan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik dapat didiskusikan secara lebih dalam dengan merujuk pada penjelasan perbandingan yang dibuat oleh Johnson (1986: 188), yaitu:

a. Pembagian Kerja

Pada masyarakat berlandaskan solidaritas mekanis, masyarakat memiliki tingkat pembagian kerja yang rendah. Pada masyarakat ini, semua anggota masyarakat hampir bisa melakukan apa yang semua bisa lakukan. Sedangkan pada masyarakat solidaritas organik, tingkat pembagian kerja dalam masyarakat tinggi. Tingkat pembagian kerja yang tinggi tersebut menciptakan suatu ikatan berupa solidaritas sosial dan kohesi sosial melalui ketergantungan fungsional antara satu sama lain antar dan inter pekerjaan yang tersedia dalam masyarakat.

b. Kesadaran Kolektif

Dalam setiap masyarakat terdapat suatu kesadaran kolektif, yaitu menurut Durkheim (1964a: 79) berupa totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada anggota masyarakat yang sama tersebut. Kesadaran kolektif tersebut, kata Johnson (1986: 183), merupakan suatu solidaritas sosial yang terkait pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut

kepercayaan dan pola normatif yang sama pula. Dalam masyarakat bersendikan solidaritas mekanik, anggota masyarakatnya memiliki kesadaran kolektif yang tinggi, sedangkan dalam solidaritas organik, anggota masyarakat mempunyai kesadaran kolektif yang rendah.

Perbedaan kesadaran kolektif antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik lebih tajam dalam pembahasan Ritzer (1996: 192-193) tentang Durkheim, dengan menyajikan empat dimensi perbedaan, yaitu volume, intensitas, rigiditas, dan konten:

Volume menunjuk pada jumlah orang yang berada dalam lingkup jangkauan kesadaran kolektif. Intensitas menyatakan seberapa dalam individu merasakan kesadaran kolektif. Rigiditas mengacu kepada seberapa jelas kesadaran kolektif itu didefinisikan, dan konten melingkupi bentuk kesadaran kolektif pada dua tipe ideal masyarakat tersebut. Pada masyarakat mekanik, kesadaran kolektif meliputi keseluruhan masyarakat beserta segenap anggotanya, kesadaran kolektif dipercayai dengan intensitas tinggi ... Kesadaran kolektif dalam hal ini sangat rigid, dan kontennya berwatak religius. Sedangkan dalam masyarakat organik, kesadaran kolektif terbatas pada domainnya masing-masing dan di kalangan masyarakat yang berada di wilayah jangkauan kesadaran kolektif itu saja; intensitas kesadaran kolektifnya kurang sebagaimana ditunjukkan dalam substitusi restitutif terhadap pelanggaran hukum. Kesadaran kolektif tidak terlalu rigid, dan kontennya lebih bercorak moral, “moralitas individualisme”.

Untuk menyederhanakan pemahaman tentang kesadaran kolektif ini, ada baiknya kita simpulkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Tipologi Ritzer tentang Kesadaran Kolektif antara Masyarakat Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik

	Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
Volume	Seluruh anggota masyarakat	Terbatas pada domain dan orang tercakup
Intensitas	Tinggi	Rendah
Rigiditas	Kuat	Lemah
Konten	Religius	Moral individualisme

c. Hukum Dominan

Apa hukum dominan dalam dua tipe masyarakat berbeda tersebut? Dalam masyarakat bertipe solidaritas mekanik, masyarakat melaksanakan suatu hukuman hanya demi menghukum, membuat orang yang divonis bersalah menderita hanya agar ia menderita tanpa mempertimbangkan manfaat dari hukuman yang mereka kenakan terhadapnya. Hukum “nyawa dibayar dengan nyawa, mata diganti dengan mata” merupakan prinsip hukum yang dipegang dalam masyarakat bertipe solidaritas mekanik, hukum jenis ini dikenal sebagai hukum represif.

Berbeda dengan masyarakat bertipe solidaritas mekanik, masyarakat bertipe solidaritas organik melaksanakan hukuman bersifat restitutif. Dengan kata lain, hukuman dilaksanakan terhadap orang yang melanggar sesuatu perbuatan melawan hukum agar masyarakat kembali kepada keadaan semula. Sanksi hukuman dijalankan agar relasi sosial yang terganggu karena adanya suatu perbuatan melawan hukum kembali pulih kepada keadaan semula, melalui pemenjaraan, hukuman denda atau kerja sosial.

d. Individualitas

Kesadaran kolektif yang terdapat dalam masyarakat berbasis solidaritas mekanik, seperti telah dibahas di atas, membuat para anggota masyarakat mempertahankan kesamaan dan keseragaman satu sama lain, sehingga individualitas dalam masyarakat bertipe ini tidak berkembang sepenuhnya. Bertolak belakang dengan masyarakat yang disebut di awal, melalui pembagian kerja yang menyebabkan terjadinya saling ketergantungan fungsional antar warga dan kelompok telah memberikan benih yang elok bagi tumbuh-kembangnya individualitas dalam masyarakat berbasis solidaritas organik. Pengakuan terhadap keberagaman cara bertindak dan berpikir para anggota dan kelompok masyarakat mendorong orang untuk memperhatikan individualitasnya. Keutuhan masyarakat tidak lagi didasarkan atas basis kesadaran kolektif tetapi telah bergeser pada pembagian kerja secara alamiah yang berkembang atas dasar ketergantungan fungsional di antara sesama anggota masyarakat.

e. Konsensus Terpenting

Apa konsensus terpenting dalam kedua masyarakat yang berbeda tersebut? Pada masyarakat berbasis solidaritas mekanik, konsensus terpenting bagi mereka adalah nilai dan norma yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lama, bahkan sebelum mereka ada di muka bumi ini, yang dipahami secara bersama sebagai sesuatu yang bersifat memaksa dan umum, seperti adat istiadat, tradisi lama, pusaka usang. Sementara, masyarakat bertipe solidaritas organik meletakkan basis terpenting masyarakat pada nilai yang bersifat abstrak dan umum, seperti nilai dan norma yang terdapat pada aturan perundangan formal.

f. Penghukuman

Pada masyarakat berbasis solidaritas mekanik, ketika ada terjadi pelanggaran terhadap aturan adat istiadat atau tradisi, misalnya, maka keterlibatan komunitas dalam penghukuman terhadap pelanggar aturan yang ada cukup tinggi. Misalnya, ketika para warga menemui suatu kasus perzinahan berlangsung pada komunitas mereka, pada waktu singkat bisa saja berita tersebut secara cepat menyebar kepada seluruh anggota komunitas dan pada waktu yang tidak begitu lama para warga datang berbondong-bondong untuk secara bersama menghukum warga yang telah membuat kampung mereka tercemar oleh suatu perbuatan yang dipandang tercela.

Tidak demikian halnya terjadi pada masyarakat berbasis solidaritas organik, para anggota masyarakat paham bahwa tidak boleh ada penghakiman sendiri terhadap orang yang diduga melanggar suatu aturan perundangan yang ada. Sebab semua anggota masyarakat tahu bahwa ada lembaga atau badan kontrol sosial yang mengurus hal itu, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

g. Saling Ketergantungan

Karena solidaritas mekanik menekankan pada kesadaran kolektif di antara sesama anggota masyarakat, sehingga menguatnya kesamaan dan keseragaman dalam

masyarakat akan menyebabkan ketergantungan fungsional melalui spesialisasi pekerjaan di antara sesama warga masyarakat tidak terjadi. Sementara itu, solidaritas organik telah mendorong pembagian kerja secara alamiah dalam masyarakat, sehingga tercipta saling ketergantungan fungsional di antara berbagai ragam pekerjaan dan spesialisasi yang ada dalam masyarakat tersebut.

h. Komunitas

Apa jenis komunitas dari masyarakat berbasis solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Pada masyarakat bertipe solidaritas mekanik, komunitas yang menjadi tempatan mereka adalah wilayah perdesaan yang dicirikan sebagai masyarakat primitif. Sedangkan komunitas yang menjadi tempatan bagi masyarakat berbasis solidaritas organik adalah masyarakat perkotaan dengan ciri masyarakat industrial.

i. Pengikat

Apa yang menjadi pengikat di antara sesama anggota masyarakat berbasis solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Seperti telah disinggung di atas, pengikat sesama anggota masyarakat adalah kesadaran kolektif pada masyarakat berbasis solidaritas mekanik dan pembagian kerja secara alamiah pada masyarakat bertipe solidaritas organik.

3. Masyarakat Agraris Versus Masyarakat Kapitalis

Peneroka sosiologi lainnya yaitu Max Weber juga membahas perbedaan antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan dengan konsep berbeda yaitu antara masyarakat agraris dan masyarakat kapitalis. Weber membuat tipologi dikhotomis antara masyarakat agraris dan masyarakat kapitalis didasarkan atas enam dimensi yaitu: bentuk kepemilikan, mekanisme pekerjaan, ciri tenaga kerja, pasar, hukum, yang berlaku, dan motivasi utama yang ada dalam masyarakat.

a. Bentuk Kepemilikan

Pada masyarakat agraris tradisional, kepemilikan terikat pada status sosial yang diwariskan secara turun-temurun, biasanya sesuatu yang ada kaitannya dengan tanah. Seseorang yang berasal dari keturunan budak atau hamba sahaya, misalnya, seumur hidupnya tidak akan mungkin mempunyai suatu kepemilikan, tentunya terkait dengan tanah.

Sebaliknya pada masyarakat kapitalis, kepemilikan terhadap alat-alat produksi bersifat pribadi, suatu sifat kepemilikan yang belum pernah ada pada masa sebelumnya. Pada masa ini, oleh karena itu, alat-alat produksi berupa tanah, bangunan, mesin, atau bahan mentah dikontrol oleh suatu mekanisme pasar, yaitu suatu mekanisme kepemilikan melalui pertukaran berdasarkan hukum permintaan dan penawaran.

b. Mekanisme

Sistem produksi pada masyarakat agraris tradisional relatif sederhana karena dilandasi oleh peralatan manual. Konsekuensi dari penggunaan peralatan seperti itu adalah produktifitas dan efisiensi dari suatu pekerjaan tidak dapat mencapai titik maksimal. Berbeda dengan masyarakat agraris tradisional, masyarakat kapitalis telah mengalami mekanisasi pekerjaan berkat adanya penemuan teknologi baru, sehingga produksi berdasarkan prinsip organisasi efektif, produktif, dan rasional dapat dilakukan.

c. Ciri Tenaga Kerja

Mobilitas tenaga kerja pada masyarakat agraris tradisional tidak terjadi, karena sekali menjadi budak atau hamba sahaya yang dipekerjakan pada daerah pertanian, maka sampai mati mereka, malah sampai pada anak cucu mereka berada di sana. Sebaliknya pada masyarakat kapitalis, mobilitas tenaga kerja sangat mengalir. Sebab tenaga kerja bebas bergerak menanggapi permintaan terhadap tawaran dari berbagai perusahaan yang ada di berbagai wilayah yang berbeda. Dengan demikian, tenaga kerja mengalami mobilitas dalam arti seseorang bebas masuk dan keluar dari perusahaan dan lokasi di mana dia suka untuk bekerja. Kebebasan tenaga kerja menjual tenaganya pada pasar bebas berhubungan dengan transformasinya sebagai komoditi untuk mendapat upah yang terbaik dari pasar tenaga kerja.

d. Pasar

Pada masyarakat agraris tradisional, pasar belum berkembang. Keberadaan pasar lebih dilihat sebagai bagian dari tradisi, misalnya pasar dibutuhkan karena keperluan adanya suatu ritual keagamaan atau ritual politik. Pasar dihambat berkembangnya oleh monopoli kelas, keterbatasan dalam kepemilikan pribadi, dan proteksionisme. Berbeda dengan masyarakat agraris tradisional, pada masyarakat kapitalis pasar telah menjadi instrumen pengaturan kehidupan masyarakat. Pasar mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme *self regulating market*, artinya pasar berkembang berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Dengan demikian, apa dan bagaimana tentang produksi dan konsumsi diatur oleh pasar. Produksi dilakukan bukan karena tradisi, melainkan untuk massa dan mendapatkan keuntungan melaluinya.

e. Hukum yang Berlaku

Penerapan hukum pada masyarakat agraris tradisional bersifat khusus, artinya hukum diterapkan berbeda untuk kelompok sosial yang berbeda. Penerapan dan keputusan hukum bersifat patrimonial. Berbeda dengan masyarakat agraris tradisional, pada masyarakat kapitalis hukum bersifat universal. Setiap orang sama di depan hukum. Hukum tidak pandang etnik, agama, latarbelakang status sosial ekonomi. Oleh sebab itu penerapan hukum dapat diperhitungkan, sehingga setiap orang untuk memungkinkan meramalkan konsekuensi kontrak dan pelaksanaan hukum.

f. Motivasi Utama

Apakah yang menjadi motivasi utama yang dimiliki oleh masyarakat agraris tradisional? Masyarakat dimotivasi oleh suatu pemuasan terhadap kebutuhan sehari-hari. Ketika kebutuhan sehari-hari telah tercapai, maka segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Sebaliknya hal berbeda terjadi dalam masyarakat kapitalis. Pada masyarakat kapitalis orang dimotivasi oleh kehausan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Sedangkan keuntungan maksimal dipandang sebagai sesuatu yang tidak pernah terpuaskan. Oleh sebab itu, seseorang senantiasa meningkatkan keuntungan tanpa batas.

Tabel 3.3. Tipologi Masyarakat Menurut Weber

Ciri	Masyarakat Agraris Tradisional	Masyarakat Kapitalis
Kepemilikan	Terikat pada status sosial turun-temurun.	Pemilikan pribadi alat produksi dan pemusatan kekayaan berada di bawah kontrol usahawan (tanah, bangunan, mesin, bahan mentah semuanya dikontrol oleh satu agen dan bebas dipertukarkan di pasar sebagai barang milik pribadi)
Mekanisme pekerjaan	Belum ada	Mekanisasi pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi sehingga memungkinkan memperhitungkan kapital secara tepat. Proses produksi berdasarkan prinsip organisasi efektif, produktif, dan rasional.
Ciri tenaga kerja	Tidak bebas (hubungan perbudakan atau hamba dalam pengolahan tanah)	Tenaga kerja bebas bergerak menanggapi permintaan cabang satu ke cabang perusahaan lainnya atau dari wilayah satu ke wilayah lain. Tenaga kerja bebas menjual tenaganya sebagai komoditi untuk mendapat upah dari pasar terbuka
Pasar	Sangat dibatasi oleh rintangan pajak, perampokan, terbatasnya lembaga keuangan, dan transportasi yang buruk	Pedagang di pasar bebas tidak dibatasi oleh hambatan tradisional (monopoli kelas, terbatasnya kepemilikan, proteksionisme, dsb). Pasar mengatur prinsip distribusi dan konsumsi.
Hukum yang berlaku	Bersifat khusus, penerapannya berbeda untuk kelompok sosial yang berbeda. Penerapan dan keputusan hukum bersifat patrimonial.	Penerapannya bersifat universal. Hukum yang dapat diperhitungkan memungkinkan meramalkan konsekuensi kontrak dan pelaksanaan hukum.
Motivasi utama	Untuk memuaskan kebutuhan sehari-hari. Menerima keuntungan tradisional. Menurut Weber, kesempatan untuk mendapat penghasilan yang makin besar masih kurang menarik.	Untuk mencapai keuntungan maksimal. Motivasi perilaku ekonomi adalah untuk mencapai keuntungan tertinggi.

Sumber: Sztompka (2004: 83-84)

Diskusi para penoruka sosiologi seperti Tönnies, Durkheim dan Weber tentang masyarakat perkotaan memperlihatkan adanya benang merah pemikiran antara ketiga ahli sosiologi awal tersebut. Adapun benang merahnya adalah setiap tipe yang ada dibedakan

atas dasar kualitas dan jenis relasi sosial yang terbangun dalam suatu masyarakat, di samping perbedaan ciri fisik dan demografisnya. Kualitas dan jenis relasi sosial yang ada dalam *Gemeinschaft*, beririsan besar dengan solidaritas mekanik dan masyarakat agraris tradisional. Demikian pula dengan kualitas dan jenis relasi yang ada dalam *Gesellschaft*, tumpangtindih (irisan) yang luas dengan kualitas dan jenis relasi yang terbangun dalam solidaritas organik dan masyarakat industri.

C. TIPOLOGI (MASYARAKAT) PERKOTAAN

Masyarakat perkotaan, seperti telah kita singgung di atas, bukanlah merupakan suatu komunitas tunggal dan seragam, namun ternyata berbeda menurut lingkungan fisik dan sejarah perkembangannya. Berdasarkan tipologi kita yang dikonstruksi atas dasar kehendak manusia (*wille/will*) dan ekonomi pasar, maka paling tidak ada 2 jenis kota, yaitu kota yang memiliki karakteristik *kurwille* dengan ekonomi pasar, dan kota yang *kurwille* dengan ekonomi non pasar. Karena ada unsur dari elemen pembentuk kota yaitu ekonomi pasar, seperti disinggung di atas, maka bisa juga ada kota yang memiliki gabungan karakteristik ekonomi pasar dengan *wessenwille*. Apa yang disebut terakhir itu, boleh jadi merupakan tipe “komunitas kota yang penghuninya berperilaku orang desa” seperti yang dikemukakan oleh Herbert Gans dalam bukunya *The Urban Villager*. Untuk memahami realitas ini mari kita pahami kutipan dari Herbert Gans berikut (1962: 12) :

Setelah hidup beberapa pekan di West End (di Boston), pengamatan dan persepsi saya tentang daerah itu, berubah drastis. Saat saya mencari suatu apartemen, saya dengan cepat menyadari bahwa bagian dalam dari ruangan apartemen biasanya berada dalam keadaan yang lebih baik daripada bagian luar atau lorong dalam bangunannya. Setelah itu, ketika berjalan-jalan di sepanjang West End, saya mengembangkan semacam persepsi selektif di mana mata saya hanya berfokus pada bagian daerah yang digunakan oleh orang. Bangunan kosong dan toko yang tertutup papan tidak lagi tampak dan juga gang atau jalan yang sangat jarang dilalui, baik oleh saya maupun oleh orang West End...

Karena banyak kehidupan di daerah itu berlangsung di jalanan, saya dengan cepat mengenali orang sekitar. Saya bertemu dengan tetangga dan di depan bangunan saya. Dan, selanjutnya saya mengembangkan suatu pola belanja yang tetap, saya sering bertemu dengan pelayan toko yang sama, maupun “oknum-oknum” di daerah itu yang tiap harinya berjalan-jalan melalui suatu rute dan jadwal yang teratur. ... Singkat cerita, saya menemukan orang secara rutin mengunjungi kerabat dan terlibat dalam suatu jaringan pertemanan dan pengenalan.

Apa yang dikemukakan oleh Gans tersebut menunjukkan adanya “komunitas kota orang ndeso”. Realitas ini merupakan kajian interdisipliner antara sosiologi perdesaan dan sosiologi perkotaan, sebagaimana pula studi tentang masyarakat suburban atau periferi.

Konstruksi tipologi masyarakat perkotaan mengambil bentuk yang beragam. Paling tidak ada dua konstruksi tipologi yang dibangun, yaitu konstruksi kuantitatif dan kualitatif.

1. Konstruksi Tipologi Kuantitatif

Tipologi kota dikonstruksi secara kuantitatif berlandaskan pada gejala pemusatan penduduk yang diukur berdasarkan jumlah penduduk. Berikut beberapa konstruksi tipologi kuantitatif :

a. Tipologi kota C. Doxiadis

Doxiadis, seperti dikutip Bintarto (1984), mengklasifikasikan tingkat perkembangan kota berdasarkan gejala pemusatan penduduk menjadi 12 tahapan, yaitu:

No	Nama Tahapan Kota	Jumlah Penduduk Minimal
1	Dwelling Group	40 orang
2	Small Neighborhood	250 orang
3	Neighborhood	1.500 orang
4	Small Town	9.000 orang
5	Town	50.000 orang
6	Large City	300.000 orang
7	Metropolis	2.000.000. orang
8	Conurbation	14.000.000 orang
9	Megalopolish	100. 000.000 orang
10	Urban Region	700.000.000 orang
11	Urban Continent	5.000.000.000 orang
12	Ecumenepolish	30.000.000.000 orang

b. Tipologi kota N.R. Saxena

N.R. Saxena mengonstruksi tipologi kota berdasarkan tahapan perkembangan yang dilandasi pada pemusatan penduduk kota adalah sebagai berikut:

- a. *Infant Town* dengan jumlah penduduk 5.000 sampai dengan 10.000 orang.
- b. *Township* yang terdiri atas *adolescent township*, *mature township* dan *specialized township* dengan jumlah penduduk antara 10.000 s/d 50.000 orang.
- c. *Town city* terdiri atas *adolescent town*, *mature town*, *specialized town* dan *adolescent city* dengan jumlah penduduk berkisar 100.000 s/d 1.000.000 orang.

c. Tipologi kota James M. Henslin

Dalam bukunya “*Sosiologi: Dengan Pendekatan Membumi*”, Henslin mengembangkan tipologi kota berdasarkan perkembangannya. Tipologi kota dari Henslin meliputi:

- a. Kota
- b. Metropolis merupakan suatu kota yang dikelilingi oleh kota-kota kecil dan satelitnya. Semua kota tersebut dihubungkan melalui transportasi dan komunikasi, serta terkait secara ekonomi dan kadang secara politis.
- c. Megalopolis adalah beberapa metropolis yang tumbuh sedemikian besar dan sedemikian berpengaruhnya bersama dengan kota satelitnya.
- d. Megakota (*megacity*) merupakan kota yang memiliki penduduk lebih dari 10 juta orang

d. Tipologi kota Highsmith dan Northam

R. M. Highsmith dan R. M. Northam, seperti yang dikutip Yunus (2009: 47), mengembangkan tipologi kota berdasarkan perkembangan jumlah penduduk, yaitu sebagai berikut:

Order	Notasi Kelas	Perkiraan Jumlah Penduduk
I	Hamlet	16 - < 150
II	Village	150 - < 1000
III	Town	1000 - < 2.500
IV	Small City	2.500 - < 25.000
V	Medium Sized City	25.000 - < 100.000
VI	Large City	100.000 - < 800.000
VII	Metropolis	800.000 - < indefinite
VIII	Megapolis	Indefinite – but a several millions
IX	Eumenopolis	Indefinite – but likely tens of million

2. Konstruksi Tipologi Kualitatif

Konstruksi tipologi kualitatif dibangun atas dasar keragaman pemikiran, sehingga tipologi ini memiliki banyak klasifikasinya. Hadi Sabari Yunus (2009) dalam bukunya “*Klasifikasi Kota*”, menemukan paling tidak 3 klasifikasi kota berdasarkan konstruksi tipologi kualitatif, yaitu:

a. Klasifikasi atas dasar karakteristik fungsinya

Klasifikasi ini memiliki beberapa tipologi, yaitu antara lain tipologi Gist dan Harbert, tipologi Hudson, dan tipologi Harris. Tipologi N.P. Gist dan L.A. Halbert meliputi kota berfungsi sebagai: satu, pusat industri; dua, pusat perdagangan; tiga, pusat politik; empat, pusat kebudayaan; lima, pusat rekreasi atau kesehatan; enam, tidak memiliki fungsi tertentu yang menonjol. Hal ini terjadi karena kota tersebut baru berkembang, sementara fungsi yang diemban begitu kompleks namun belum ada yang menonjol.

Tipologi F. S. Hudson menyampaikan sembilan tipe kota, yaitu: satu, kota pertambangan dan penggalian bahan-bahan alami lainnya; dua, kota industri; tiga, kota pusat pengangkutan; empat, kota perdagangan; lima, kota pusat administrasi; enam, kota

pertahanan; tujuh, kota budaya; delapan, kota pusat kesehatan dan rekreasi; sembilan, kota permukiman.

Tipologi Chauncy D. Harris menemukan 9 tipe kota berdasarkan fungsinya, antara lain: satu, kota manufaktur; dua, kota beragam fungsi; tiga, kota penjual barang partai besar; empat, kota pengecer; lima, kota transportasi; enam, kota pertambangan; tujuh, kota universitas dan pendidikan; delapan, kota peristirahatan (*resort or retirement towns*); sembilan, kota lainnya seperti kota pemancingan, kota financial, dan lainnya.

b. Klasifikasi atas dasar karakteristik fisikalnya

Klasifikasi ini menunjukkan pada karakteristik fisikal dari suatu kota, terutama pada keadaan topografinya. Klasifikasi ini meliputi tipologi Taylor, tipologi Yunus, dan tipologi Nelson. Tipologi Griffit Taylor meliputi 19 tipe yaitu : satu, kota *acropolis* (perbukitan); dua, kota *cuesta*; tiga, kota *mountain corridors*; empat, kota *passes*; lima, kota *gates* (*passes* yang lebih besar); enam, kota *plateau*; tujuh, kota *eroded dome*; delapan, kota *fiord*; sembilan, kota *rias*; sepuluh, kota disebabkan adanya air terjun; sebelas, kota *meander* (sungai); dua belas, kota teras sungai; tiga belas, kota delta sungai; empat belas, kota *alluvial cone/fan*; lima belas, kota lembah (*inter montane*); enam belas, kota sekitar danau; tujuh belas, kota dataran rendah; delapan belas, kota padang pasir; sembilan belas, kota “*clearing town*” (pembukaan hutan).

Tipologi Hadi Sabari Yunus mengembangkan tipologi membangun 108 tipe kota yang didasarkan atas 3 unsur utama yaitu hubungan dengan perairan yang dapat melayani, latar belakang daerah dan sit kota. Setiap unsur utama dibagi lagi atas beberapa sub unsur. Unsur hubungan dengan perairan dibagi atas di tepi perairan dan jauh dari perairan. Unsur latar belakang daerah terdiri dari datar dan tidak rata. Sedangkan unsur sit kota terdiri dari muda, dewasa, dan tua. Sit kota meliputi beberapa sistem antara lain: sistem alluvial, sistem marine, sistem dataran, sistem perbukitan struktural, sistem perbukitan non struktural, sistem plateau, sistem pegunungan lipatan, sistem pegunungan patahan, sistem vulkanis, dan sistem karst.

Tipologi R. L. Nelson membuat tipologinya atas dasar morfologis kota. Nelson menemukan tiga tipe kota, yaitu: kota yang berbentuk bujur sangkar (*the square cities*),

kota yang berbentuk empat persegi panjang (*the rectangular cities*), dan kota yang berbentuk kipas (*the fan shaped cities*).

c. Klasifikasi atas dasar karakteristik pertumbuhannya

Klasifikasi ini menjelaskan tipe kota atas dasar pertumbuhan fisikalnya. Klasifikasi ini meliputi beberapa pandangan antara lain tipologi Houston, tipologi Taylor, dan tipologi Mumford. Tipologi J. M. Houston membangun tipologinya atas dasar penampakan fisikalnya. Houston menemukan 3 tipe pertumbuhan kota, yaitu : satu, stadium pembentukan inti kota (*nuclear phase*) di mana penampakan morfologis kotanya akan berbentuk bulat/hampir bulat/bujur sangkar/mendekati bujur sangkar; dua, stadium formatif (*formative phase*) di mana penampakan morfologis kota seperti bintang atau gurita; tiga, stadium modern (*modern phase*) di mana penampakan tidak lagi sederhana, oleh sebab itu sulit untuk diidentifikasi. Fenomena pengembangan wilayah Jabodetabek, Bandung raya, dan Gerbang Kartasusila merupakan contoh stadium modern.

Tipologi Griffith Taylor membuat 4 tipe pertumbuhan kota, yaitu: satu, tahap infantile (*the infantile stage*) dicirikan dengan masih bersatunya antara daerah pemukiman dan perdagangan. Dua, tahap juvenil (*the juvenile stage*) ditandai adanya pengelompokan perdagangan dan munculnya pemukiman baru di daerah pinggiran. Tiga, tahap dewasa ditandai dengan adanya segregasi fungsi di mana ada pemisahan yang tegas antara daerah perdagangan, pemukiman baru dan lama. Empat, tahap ketuaan dicirikan dengan kemandegan pertumbuhan, kemuduran fungsi distrik dan melambatnya kesejahteraan.

Tipologi Mumford Lewis dikembangkan atas dasar tekniko-kultural, yang meliputi empat fase, yaitu: satu, fase eoteknikal ditandai dengan penggunaan energi alam seperti angin, air, dan bahan bakar dari kayu. Dua, fase paleoteknikal dicirikan dengan energy utama dari batu bara dan adanya tambang biji besi. Tiga, fase neotekni ditandai dengan tenaga listrik sebagai sumber utama energi. Empat, fase bioteknik dicirikan dengan penggunaan sains dan teknologi seperti bioteknologi, ekologi, dan lainnya.

BAB 4

POLITIK PERKOTAAN

A. KONSEP POLITIK PERKOTAAN

1. Pengertian Konsep Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota, negara kota. Dari polis berkembang konsep *polites* yang bermakna warganegara dan konsep *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Dari penjelasan etimologis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara warganegara pada suatu (negara) kota (Damsar, 2010). Sedangkan akar katanya dari bahasa Inggris adalah *politics*, yang bermakna bijaksana. Kalau kita lanjutkan pemahaman etimologis dari dua akar kata dari bahasa yang berbeda tersebut, dari bahasa Inggris maupun Yunani, maka politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warganegara dalam negara (kota).

Bagaimana pandangan dari berbagai ahli ilmu sosial dan politik tentang pengertian politik? Berikut penelusuran Damsar (2010) terhadap pandangan para ahli tersebut, yaitu antara lain:

1. Harold D. Lasswell (1936) merumuskan batasan politik sebagai “siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”
2. Hans J. Morgenthau (1960) menjelaskan politik sebagai pertarungan untuk memperoleh kekuasaan.
3. E. F. Schattschneider (1960) menemukan politik sebagai seni dan ilmu dari pemerintahan.
4. David Easton (1981) menerangkan politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan.
5. Carl Schmitt (1976) mendefinisikan politik sebagai konflik murni, antara sini melawan sana.

6. Bernard Crick (1964) mengemukakan politik sebagai penyelarasan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan lewat kebijakan publik.
7. Maurice Duverger (1982) melihat bahwa hakekat politik bersifat ambivalen. Di satu sisi politik merupakan konflik untuk meraih kekuasaan, di mana individu atau kelompok yang memegangnya cenderung untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat. Sedangkan individu atau kelompok yang berkuasa berusaha untuk menentang bahkan merebutnya. Di sisi lain politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan.
8. James A. Caporaso dan David P. Levine (2008) memberi pengertian politik sebagai pemerintahan, publik, dan alokasi nilai oleh pihak yang berwenang.

Dengan pengertian politik seperti yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka politik dipahami Damsar (2010) sebagai kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict* dan *conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Buku ini mengikuti pengertian politik seperti ini.

2. Pengertian Politik Perkotaan

Dengan mengombinasikan antara konsep politik dan masyarakat perkotaan maka politik perkotaan dipahami sebagai kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict* dan *conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah (lokalitas/tempatan) mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut dalam jumlah sekitar lebih dari 2500 orang, dengan relasi sosial yang parsial, transaksional dan non afeksi dari ekspresi kehendak rasional (*Kurwille*) dengan ekonomi pasar.

B. TIGA PILAR KEKUASAAN DI PERKOTAAN

Siapa yang dapat mengatur kehidupan kita, termasuk di kota atau perkotaan? Dalam berbagai literatur seperti yang dipelajari Damsar (2010), paling tidak terdapat 3 kekuatan atau kekuasaan yang dapat memengaruhi atau berperan dalam kehidupan kita, yaitu negara, pasar, dan *civil society*.

1. Negara

a. Pengertian Negara

Berdasarkan penelusuran Damsar (2010) terhadap definisi atau pengertian tentang negara, ternyata tidak dapat dipisahkan dari perspektif yang dimiliki oleh para ahli yang membuat definisi atau pengertian tersebut. Terdapat keragaman perspektif yang dimiliki oleh para ahli yang berujung pada beragamnya definisi tentang negara. Berikut berbagai keragaman definisi negara yang berkembang:

i. Perspektif State Centered

Salah seorang ahli yang menganut perspektif *state centered* adalah Stephen Krasner. Menurut Krasner (1978: 10) merumuskan negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu manapun dalam masyarakat. Oleh sebab itu Krasner tidak sependapat dengan ahli yang menyebut tujuan dari negara sebagai kumpulan dari keinginan-keinginan individu-individu atau kelompok-kelompok, sebab tujuan negara sebenarnya adalah merujuk pada kegunaan (*utility*) dari masyarakat dan dapat disebut sebagai kepentingan umum masyarakat atau kepentingan nasional.

Dalam perspektif *state centered* juga tumbuh rumusan yang berbeda dari pendapat Stephen Krasner, yaitu Theda Skocpol. Adapun batasan tentang negara menurut Skocpol (1995: 28) adalah

Di satu sisi, negara dapat dilihat sebagai organisasi melalui mana aparat kolektif mengejar tujuan tertentu dan secara efektif merealisasikannya dengan

sedikit banyak menggunakan sumber negara yang tersedia dalam hubungannya dengan setting sosial (kapasitas negara). Di sisi lain, negara dapat dilihat secara lebih makroskopik sebagai konfigurasi dari organisasi dan tindakan yang mempengaruhi arti dan metode politik dari semua kelompok dan kelas dalam masyarakat (otonomi negara).

Meskipun definisi antara Krasner dan Skocpol berbeda secara formulatif, namun secara esensial mereka berdua memiliki pandangan yang sama tentang otonomi negara. Dalam pandangan mereka, otonomi negara dilihat sebagai agenda negara yang berbeda dari agenda kepentingan pribadi dan tidak bisa ditentukan berdasarkan kepentingan-kepentingan pribadi dari individu dalam masyarakat. Dengan demikian, negaralah yang menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik, karena negaralah yang mempunyai dan membuat tujuan serta mencapai tujuan itu sendiri.

ii. Perspektif *Society Centered*

Berbeda dengan perspektif *state centered*, perspektif *society centered* melihat bahwa negara merupakan agenda kepentingan pribadi, baik sebagai kepentingan individu maupun kepentingan kelas. Perspektif *society centered* mempunyai beberapa pemikiran berbeda, yaitu:

1. Pendekatan utilitarian melihat negara sebagai refleksi dari kepentingan pribadi-pribadi. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang eksponen pendekayan ini, yaitu Eric Nordlinger dalam bukunya *On the Autonomy of the Democratic State* (1981:11) melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa negara terdiri dari beberapa individu yang memegang jabatan, yang memiliki konstituen untuk dipertimbangkannya pilihan-pilihan mereka dalam bentuk implementasi kebijakan publik. Otonomi negara, dalam pendektan ini, merupakan kemampuan dari pejabat negara untuk melaksanakan pilihan-pilihan mereka ke dalam kebijakan publik, yang

dimungkinkan sejalan atau berlainan arah dengan pilihan-pilihan dari orang lain yang bukan pejabat negara. Dari versi pluralis, negara dipandang sebagai arena pertarungan sekaligus sebagai wasit.

2. Pendekatan Marxian memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk meraih tujuan tertentu. Dengan demikian negara dipandang sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tertentu.

b. Asal Usul Negara

Asal usul negara ditelusuri oleh para ahli, seperti Mumford (1973), melalui negara kota (*city state*). Namun penelusuran tersebut berujung pada misteri yang tidak terpecahkan: “asal muasal kota tidak jelas, sebagian besar masa lalunya terkubur atau terhapus sehingga sulit dilihat lagi, dan proyek selanjutnya sulit untuk diukur”. Meskipun demikian, paling tidak ada beberapa ahli yang mencoba menjelaskan asal usul negara melalui telusuran negara kota, yaitu antara lain: James M. Henslin, Ahmad Suhelmi (2007), dan lainnya.

Dalam bukunya “Sosiologi dengan Pendekatan Membumi”, Henslin (2008: 87) menguraikan bahwa masyarakat pada mulanya berukuran kecil dan tidak membutuhkan sistem politik yang besar. Masyarakat seperti itu beroperasi bagaikan suatu keluarga besar. Ketika surplus berkembang dan masyarakat menjadi lebih besar, berkembanglah kota, diperkirakan sekitar 3500 tahun SM. Negara kota kemudian muncul, seperti negara-negara kota di zaman Yunani Kuno, dengan kekuasaan yang berkembang ke luar laksana sebuah sarang laba-laba. Meskipun tiap-tiap kota mengendalikan wilayah di sekitarnya, wilayah-wilayah di antara kota-kota tersebut tetap menjadi masalah. Setiap negara kota memiliki kerajaan (*monarchy*) sendiri, seorang raja atau ratu yang memiliki hak memerintah yang diturunkan dalam keluarga.

Negara kota sering bertikai, dan perang merupakan hal yang lazim. Para pemenang memperluas pemerintahannya, dan akhirnya sebuah negara kota tunggal berhasil memegang kekuasaan atas suatu wilayah secara menyeluruh. Pada saat wilayah-wilayah ini berkembang, orang-orang secara bertahap mengidentifikasikan diri mereka dengan wilayah yang lebih luas. Dengan kata lain, mereka melihat penghuni yang tinggalnya jauh sebagai “kita”, bukan “mereka”. Yang kita kenal sebagai negara (*state*), yakni kesatuan politik yang memonopoli

penggunaan kekerasan dalam suatu wilayah, kini muncul.

Berbeda dengan Henslin dan Suhelmi, Morton Fried (1967) dalam *The Evolution of Political Society*, menemukan perbedaan asal usul negara berdasarkan tipe dari suatu negara. Menurut Fried terdapat dua tipe asal usul negara, yaitu negara pristin (*pristine state*) dan negara sekunder (*secondary state*). Negara pristin merupakan suatu negara yang muncul ketika belum pernah ada negara sebelumnya. Sebaliknya negara sekunder adalah negara yang lahir sebagai akibat adanya satu atau lebih negara lain yang sudah ada sebelumnya.

Negara pristin sepanjang sejarah umat manusia tidak banyak ditemukan. Menurut Sanderson, negara pristin hanya muncul di empat daerah di Dunia lama, yaitu Mesopotamia dan Mesir sekitar 6000-5000 SM serta Dinasti Shang di Cina dan India pada 4500-3750 SM. Sedangkan di Dunia Baru dinyatakan hanya terdapat di dua daerah yang muncul negara pristin, yaitu di daerah Mesoamerika, di mana sebagian besar daerahnya sekarang terletak di Guatemala dan Meksiko serta di Peru. Pada daerah Mesoamerika dan Peru telah muncul beberapa negara pristin seperti negara Olmec, Maya, Aztec dengan ibu kota Tenochtitlan dan Inca.

Stratifikasi sosial, dipahami oleh Sanderson, merupakan dasar bagi munculnya negara pristin. Perkembangan masyarakat melalui stratifikasi sosial telah menciptakan perbedaan dan sekaligus penjenjangan anggota masyarakat dalam berbagai kelompok yang berbeda seperti keluarga bangsawan, prajurit, pedagang, dan budak. Pada puncak piramid stratifikasi sosial bertengger kelompok bangsawan yang menguasai tanah beserta surplus yang menyertainya. Negara, lanjut Sanderson (2003: 308-309), pada awalnya dibangun atas landasan agama (teokratik) selanjutnya berevolusi menjadi negara militer dan akhirnya menjadi negara penakluk. Penaklukan yang semakin meningkat atas tanah-tanah dan masyarakat-masyarakat tetangganya telah menimbulkan permintaan akan upeti yang lebih besar, meningkatnya stratifikasi, dan intensifikasi ciri-ciri negara otokratis.

Tidak sama dengan negara pristin, negara sekunder muncul karena adanya kontak dari masyarakat yang bukan negara dengan satu atau beberapa masyarakat yang berbentuk negara. Kontak tersebut memunculkan kondisi di mana masyarakat yang bukan negara berubah menjadi masyarakat yang berbentuk negara. Pendirian negara sekunder ditujukan untuk beberapa hal seperti mempertahankan diri terhadap masyarakat yang telah terorganisasi dalam bentuk negara,

mengamankan rute-rute perdagangan yang strategis, dan untuk mempertahankan kekayaan sumber daya alam di daerah perbatasan. Sanderson melihat bahwa negara primitif di Polinesia dan Afrika terbentuk karena proses seperti ini. Di samping itu, negara sekunder bisa juga terbentuk bilamana negara lama digantikan oleh negara baru, namun sistem sosiokulturalnya masih sama dengan yang lama.

Barusan kita menelusuri beberapa pandangan asal usul dari suatu negara. Apakah ada teori yang menjelaskan asal usul negara? Ternyata Sanderson menemukan ada tiga teori yang menjelaskan tentang asal usul negara pristin pada Dunia Lama dan Dunia Baru, yaitu teori fungsionalis, teori Marxian, dan teori ekologis. Berikut kita mencoba memahami apa yang dikatakan oleh teori tersebut.

i. Teori Fungsionalis

Evolusi politik jangka panjang, menurut Sanderson (2003: 298-315), menciptakan struktur politik yang beradaptasi semakin baik. Bermula dari kumpulan (*band*), yaitu suatu tingkat politik yang paling sederhana, di mana kepemimpinan berada pada pundak kepala dan didasarkan atas pengaruh yang dimiliki secara informal. Kepala tidak memiliki kemampuan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Kumpulan merupakan ciri pada masyarakat pemburu-peramu.

Evolusi politik selanjutnya adalah suku (*tribes*), yaitu masyarakat di mana satu satuan yang lebih besar, yang diidentifikasi dalam istilah kebudayaan dan linguistik, terbagi ke dalam sejumlah desa kecil yang relatif tidak terintegrasi. Pemimpin, dikenal sebagai kepala suku, memperoleh kepemimpinan melalui perannya sebagai distributor ekonomi dan kekayaan, orang yang terampil berbicara, memiliki kekuatan magis, dan boleh jadi perkasa dalam peperangan. Meskipun pemimpin memiliki prestise yang tinggi, namun ia tidak memiliki kekuasaan sama sekali untuk memerintah orang lain. Suku diasosiasikan pada masyarakat hortikultura sederhana dan sebagian masyarakat peternak. Baik kumpulan dan suku belum memiliki stratifikasi sosial.

Tahap evolusi politik selanjutnya adalah *chiefdom*, yaitu suatu masyarakat yang dimulai munculnya kekuasaan dan kewenangan. Pada tahapan ini, desa-desa yang sebelumnya terpisah pada masyarakat suku, sekarang satu sama lain terintegrasi dan terkoordinasi secara sentral dan membentuk suatu keseluruhan yang diperintah dari atas ke bawah. Para kepala mempunyai

kekuasaan mengawasi yang besar atas para pengikutnya, termasuk kemampuan untuk menggunakan kekerasan. *Chieftdom* ditemukan dalam masyarakat hortikultura intensif dan peternak.

Chieftdom, dipandang memiliki kemampuan memaksa yang terbatas, tidak cukup didukung oleh mesin administrasi dan birokrasi untuk mengatasi bentuk perlawanan yang paling keras. Ketika stratifikasi sosial semakin mengeras, mesin administrasi dan birokrasi terbentuk, dan arti pentingnya ikatan kekerabatan semakin berkurang maka negara muncul mengkristal dalam kehidupan masyarakat. Negara muncul dalam masyarakat agraris. Negara-negara masa dini, kata Sanderson (2003), berfungsi sebagai redistributor ekonomi yang penting, sebagai mesin perang yang superior, dan sebagai satuan administrasi yang diabdikan untuk membangun monumen-monumen publik yang penting.

ii. Teori Marxian

Karl Marx memandang negara sebagai “komite eksekutif kelas penguasa”. Oleh karena itu, menurut Marx, melalui pandangan Lenin seperti dikutip oleh Caporaso dan Levine (2008: 173), negara adalah sarana (organ) untuk menjalankan dominasi kelas, yaitu suatu sarana untuk melakukan penindasan terhadap kelas yang satu oleh kelas yang lain. Tujuan negara dalam menciptakan “ketertiban” adalah untuk mengesahkan dan mempertahankan penindasan ini dengan cara mengurangi bentrokan antar kelas”.

Salah seorang eksponen Marxian adalah Morton Fried (1967) yang merupakan pembela kontemporer asal usul negara dari sudut pandang Marx, mengayakan bahwa negara membentuk embrio dalam masyarakat yang berstratifikasi yang dengan alasan ini, haruslah merupakan model organisasi yang sekurang-kurangnya stabil yang pernah ada. Masyarakat yang berstratifikasi ini terbagi di antara dua kemungkinan: masyarakat berstratifikasi itu membangun di dalam dirinya tekanan-tekanan bagi pembubarannya sendiri dan untuk kembali ke suatu jenis organisasi yang lebih sederhana. Biasanya penopangan itu meliputi munculnya agen-agen yang fungsinya adalah untuk mempertahankan sistem ekonomi dan politik dan yang posisinya dalam sistem itu tidak mempunyai sangkut paut dengan kekerabatan. Dengan demikian, masyarakat yang mempunyai sistem stratifikasi yang intens dan cukup sempurna memang memiliki negara, dan di dalam

masyarakat itu terdapat suatu hubungan yang sangat erat di antara kelas ekonomi yang berkuasa dan negara.

Untuk memahami pandangan Marxian tentang teori asal usul negara ada baiknya kita coba telusuri kesimpulan Sanderson (2003: 173-174) tentang hal ini:

1. Terdapat konflik yang tidak terdamaikan antara kelas-kelas yang memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda. konflik ini muncul dalam masyarakat dan terjadi karena posisi-posisi sosial yang sudah ada sebelumnya.
2. Konflik yang tidak dapat didamaikan ini mengancam tatanan sosial.
3. Tatanan sosial merupakan organisasi sosial yang dirancang untuk memenuhi kepentingan dari kelas yang satu tetapi tidak untuk memenuhi kepentingan dari kelas yang lain.
4. Karena terdapat konflik yang tidak terdamaikan dan karena tatanan sosial ini menindas kelas tertentu dalam masyarakat, maka tatanan sosial hanya bisa dipertahankan dengan membela kepentingan kelas tertentu saja.
5. Maka, negara sebagai sarana untuk mempertahankan tatanan itu adalah sarana penindasan kelas.

iii. Teori Ekologis

Evolusi politik yang bermula dari kumpulan (*band*), kemudian suku (*tribes*), selanjutnya *chiefdom*, dan sampai terbentuknya negara merupakan proses yang muncul karena persoalan keterbatasan lingkungan (*environmental circumscription*). Keadaan alam yang berlimpah pada suatu daerah yang ditandai dengan kesuburan dan kelimpahan produksi pertanian apabila dikelilingi oleh daerah yang gersang atau keadaan alam yang sukar ditaklukan karena penuh dengan perbukitan atau pegunungan besar terjal maka keadaan lingkungan ini berpotensi terbentuknya negara pristin. Ketika tekanan penduduk terhadap sumber daya alam terjadi karena pertumbuhan penduduk maka stratifikasi sosial berkembang pesat serta perang dan penaklukan politik merupakan suatu mekanisme untuk bertahan hidup. Masyarakat yang ditaklukan menjadi subordinat dan taat dan patuh terhadap penakluk. Situasi seperti inilah yang memungkinkan lahirnya negara pristin seperti munculnya negara pristin di daerah Timur Tengah atau daerah

Amazon.

c. Kegagalan Negara

Negara, seperti telah disebut di atas, memiliki otonomi. Dengan demikian, negara memiliki tujuan sendiri yang berbeda dari tujuan individu atau kelompok masyarakat serta memiliki caranya sendiri untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, negara dipandang mampu untuk menciptakan regulasi dan kebijakan, termasuk hal yang berhubungan dengan ekonomi, serta merealisasikannya untuk kesejahteraan, keamanan dan kebaikan masyarakat.

Negara dapat melakukan intervensi terhadap kehidupan umat manusia, termasuk intervensi terhadap ekonomi khususnya pasar, bilamana negara memandang perlu hal tersebut dilakukan, untuk menyelamatkan umat manusia, paling tidak rakyat dari suatu negara. Ada beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk melakukan intervensi seperti pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak, dikenal dengan kebijakan fiskal. Pada tataran ini, pemerintah yang menjadi pelaksana dari intervensi negara sebagai pejabat negara atau birokrat, pada hakekatnya, adalah aktor individual atau kelompok yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok. Aktor individual atau kelompok bukanlah malaikat yang steril dari keinginan, kemauan, kehendak, dan kepentingan pribadi atau kelompok. Persoalan muncul dari ketidaksterilan aktor individual atau kelompok yang mengatasnamakan pemerintah. Aktor individual atau kelompok, oleh karena itu, dapat saja berlaku tidak adil, curang, menipu, koruptif, dan sifat negatif lainnya dari sisi kemanusiaan atau kebijakan yang dikonstruksikan dengan menyisipkan kepentingan pribadi atau kelompok dalam regulasi dan kebijakan. Intervensi yang dilakukan atas nama negara, oleh sebab itu, sebenarnya bukan untuk kesejahteraan, keamanan dan kebaikan umat manusia dalam arti keseluruhan, paling tidak rakyat yang berada di bawah naungan kedaulatan suatu negara. Kalau benar bahwa negara merupakan pelaku yang bertindak demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, jelas bahwa akan sukar bagi kita untuk mengharapkan bahwa negara bisa diberi tanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran warga negaranya tentang tujuan-tujuan yang lebih luhur daripada sekedar mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Kondisi seperti ini memunculkan pemikiran tentang

kegagalan negara (*state failure*), yaitu ketidakmampuan negara dalam menggunakan otonomi negara melalui instrumen regulasi dan kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan kebaikan umat manusia dalam arti keseluruhan.

Apabila negara tidak mampu mengatur kehidupan, khususnya aspek ekonomi dari kehidupan, maka tentu perlu dicari pilar lain yang mampu mengaturnya dengan baik, mungkin pasar atau *civil society*.

2. Pasar

a. Pengertian Pasar

Dalam bahasa latin, pasar dapat ditelusuri melalui akar dari kata “*mercatus*”, yang bermakna berdagang atau tempat berdagang. Terdapat tiga makna yang berbeda di dalam pengertian tersebut: satu, pasar dalam artian secara fisik; dua, dimaksudkan sebagai tempat mengumpulkan; tiga, hak atau ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu *market place*. Pada abad ke-16, pengertian pasar, menurut Swedberg seperti yang dikutip Zusmelia (2007: 10), menemukan arti baru, yaitu “membeli dan menjual secara umum” dan “penjualan (interaksi pertukaran) yang dikontrol oleh *demand* dan *supply*”. Kelihatannya definisi yang disebut terakhir inilah yang dirujuk oleh ilmu ekonomi sampai saat sekarang ini.

Dalam bukunya *Penjaja dan Raja*, Clifford Geertz (1973: 30-31) mencoba menelusuri pengertian pasar sebagai kata serapan dari bahasa Parsi, yaitu “*bazar*”, lewat bahasa Arab bermakna suatu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup, suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dari masyarakat, dan suatu dunia sosial-budaya yang lengkap dalam sendirinya. Jadi dalam pandangan Geertz, merupakan gejala gejala alami dan gejala kebudayaan, di mana keseluruhan dari kehidupan masyarakat pendukungnya dibentuk oleh pasar.

Dalam ekonomi klasik, seperti pandangan Adam Smith, melihat pasar sinonim dengan baik tempat jualan (*market-place*) maupun sebagai suatu daerah geografis. Sedangkan ekonom yang datang kemudian, seperti Alfred Marshal melihat pasar sebagai suatu mekanisme dalam penciptaan harga.

Sedangkan sosiologi memandang pasar sebagai fenomena sosial yang kompleks dengan

berbagai macam perangkatnya. Pasar dapat dipandang dari sudut yang beragam misalnya pasar merupakan suatu struktur yang padat dengan jaringan sosial atau yang penuh dengan konflik dan persaingan.

b. Asal Usul Pasar

Dalam bukunya *The Great Transformation* pada bab "*Rise and Fall of Market Economy*", Karl Polanyi menjelaskan bagaimana muncul ekonomi pasar dalam masyarakat. Penjelasan Polanyi tentang munculnya ekonomi pasar berangkat dari pendapat Thurnwald dari bukunya *Economic in Primitive Communities*, "pasar tidak ditemukan di mana-mana. Ketidadaannya, menunjukkan adanya isolasi tertentu dan kecenderungan ke arah isolasi, tidak lagi dikaitkan dengan suatu perkembangan khusus sebagaimana halnya yang dapat disimpulkan dari kehadirannya". Untuk menunjang kutipan tersebut, Polanyi mengutip pendapat penulis lain, "fakta bahwa suatu suku menggunakan uang, sedikit sekali membedakannya dari suku-suku lain yang secara ekonomis tidak menggunakannya pada tingkat budaya yang sama". Berdasarkan kutipan tersebut Polanyi menegaskan bahwa ada atau tidaknya pasar atau uang tidak perlu mempengaruhi sistem ekonomi suatu masyarakat primitif. Ini membuktikan ketidakbenaran mitos abad ke-19 bahwa uang adalah sebuah penemuan yang kemunculan mau tidak mau merubah suatu masyarakat dengan menciptakan pasar, mempercepat pembagian kerja dan menyalurkan kecenderungan alami manusia untuk melakukan tukar-menukar. Karena pasar dalam masyarakat primitif cenderung ke arah isolasi.

Ekonomi klasik berlandaskan pandangan yang berlebihan tentang pentingnya pasar. Mereka memandang bahwa kecenderungan pribadi untuk melakukan barter akan mengarah perlunya pasar lokal dan pembagian kerja yang akhirnya memunculkan perdagangan. Lanjutan perkembangannya adalah munculnya perdagangan luar negeri yang akhirnya akan meluas menjadi perdagangan jarak jauh. Argumen ekonomi klasik tersebut, menurut Polanyi, tidak bersua dalam kenyataan. Oleh sebab itu Polanyi (1957: 58) membalikan rangkaian argumen tersebut: "titik tolak yang betul adalah perdagangan jarak jauh, suatu akibat logis dari lokasi barang-barang yang bersifat geografis, serta "pembagian kerja" yang diakibatkan oleh lokasi tersebut. Perdagangan jarak jauh melahirkan pasar, yakni sebuah pranata yang melibatkan

tindakan barter, serta pembelian dan penjualan, jika uang digunakan, dan dengan demikian, akhirnya menjadi benar-benar diperlukan, untuk menawarkan kepada beberapa individu suatu kesempatan memenuhi kecenderungan mereka melakukan tawar-menawar.

Di sini terlihat bahwa Polanyi menekankan asal muasal perdagangan dalam sebuah lingkungan eksternal yang tidak mempunyai kaitannya dengan ekonomi internal. Dengan kata lain perdagangan muncul dari usaha untuk mencari barang di luar batas wilayah, adanya suatu jarak. Jika suatu komunitas manusia tidak pernah melakukan perdagangan eksternal sama sekali, maka tidak perlu (tidak muncul) pasar.

Berdasarkan data sejarah, Polanyi melihat ketidakmungkinan pasar lokal berkembang dari tindakan barter yang bersifat individual. Karena awal dari pasar lokal masih kabur. Polanyi melihat bahwa pranata ini diselimuti oleh penjagaan organisasi ekonomi masyarakat, misalnya melalui tabu, sehingga ia terlindung dari kegiatan pasar. Perdagangan internal juga dibaluti oleh lembaga sosial politik, seperti monopoli, yang menghambat munculnya pasar.

c. Pasar Yang Mengatur Dirinya Sendiri

Konsep pasar yang mengatur dirinya sendiri (*self-regulating market*) merupakan pemikiran ekonomi yang dipengaruhi oleh utilitarianisme dan ekonomi politik Inggris. Apa maksudnya ? Utilitarianisme mengasumsikan bahwa individu adalah makhluk yang rasional, senantiasa menghitung dan membuat pilihan yang dapat memperbesar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadi, dan mengurangi penderitaan atau menekan biaya. Sedangkan ekonomi politik Inggris dibangun diatas prinsip “*laissez faire, laissez passer*”, yaitu “biarkan hal-hal sendiri, biarkan hal-hal yang baik masuk”. Artinya, biarkan individu mengatur dirinya, karena individu tahu yang dimauihnya. Oleh sebab itu jangan ada kontrol atau intervensi negara. Kalaupun ada kontrol atau intervensi negara, itu diperlukan agar kebebasan individu dengan rasionalitasnya untuk mengejar keuntungan pribadinya tetap terjaga. Sebab kesejahteraan masyarakat umumnya dalam jangka panjang akan sangat terjamin apabila individu itu dibiarkan atau malah didorong untuk mengejar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadinya.

Mari kita pahami dengan contoh. Untuk dapat bertahan hidup, setiap individu perlu bekerja. Individu sendirilah yang lebih mengetahui dibandingkan dengan orang lain, dia harus bekerja apa. Hal ini dikarenakan individu lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dari sisi

kemampuan, pengetahuan, keterampilan, jaringan, dan lainnya yang dimilikinya. Bagi Hasan, misalnya, lebih cocok bekerja sebagai pedagang emas dibandingkan jadi seorang pengacara. Meskipun dia tamat dari fakultas hukum dari suatu universitas ternama, namun berdasarkan berbagai pertimbangan rasionalnya seperti kemampuan finansial, pengetahuan, keterampilan, jaringan, dan dukungan keluarga besarnya yang kebanyakan sebagai pedagang emas maka bekerja sebagai pedagang emas adalah pilihan rasional dan tepat. Lain lagi dengan Andi, dia meninggalkan pekerjaan sebagai pegawai negeri karena dipandang tidak punya masa depan yang baik dan pindah sebagai penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Andi berpandangan bahwa kalau dia bertahan sebagai pegawai negeri dengan pangkat III b pada suatu Pemerintahan Kota maka dia perlu waktu yang lama untuk bisa beli rumah dan mobil. Oleh karena latar belakang yang cukup bagus, seperti sebelum jadi pegawai negeri telah lama menjadi penggiat LSM sehingga dia punya banyak pengalaman, jaringan, dan kompetensi maka pilihan tersebut rasional dan tepat. Pilihan Hasan, Andi, dan individu lainnya dalam mengejar kepentingan dan kesenangan pribadi mereka sebagai individu diasumsikan menyumbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya.

Menurut Polanyi (1957:68), ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang dikontrol, diatur, dan diarahkan oleh pasar itu sendiri. Peraturan dalam produksi dan distribusi barang dipercayakan kepada mekanisme mengatur diri sendiri (*self-regulating mechanism*). Ekonomi jenis ini berasal dari suatu harapan bahwa umat manusia akan mengambil sikap sedemikian rupa untuk mendapat uang sebanyak-banyaknya. Sistem ekonomi ini menganggap pasar sebagai tempat penyediaan barang, termasuk jasa, dengan harga tertentu yang berdasarkan harga tadi akan memenuhi permintaan. Juga ini mengandaikan bahwa uang, berfungsi sebagai daya beli, berada di tangan pemiliknya. Di sini produksi dikontrol oleh harga, karena keuntungan dari pihak yang menjalankan produksi akan tergantung padanya. Distribusi barang juga akan tergantung pada harga, karena membuat pendapatan dan, melalui bantuan inilah, barang yang diproduksi didistribusikan di antara anggota masyarakat. Berlandaskan permisalan ini, peraturan dalam produksi dan distribusi barang hanya dijamin oleh harga.

Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi, secara otomatis. Karena pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi juga kepada masyarakat sebagai keseluruhan

(Thompson et al, 1991). Dengan kata lain, menurut Caporaso dan Levine (2008: 82), memenuhi kebutuhan pribadi adalah sama dengan memenuhi kebutuhan publik.

Sebuah pasar akan berjalan dengan baik jika individu-individu di dalamnya bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual. Ketika penjual menjual komoditas, maka penjual mendapatkan uang yang bisa ia gunakan untuk membeli barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ketika tiap-tiap pelaku dalam pasar bertindak sebagai pembeli dan penjual, kata Caporaso dan Levine (2008: 83-84), maka uang dan komoditas akan mengalami sirkulasi (perputaran) di dalam pasar. Pasar berfungsi sekedar untuk memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan keinginan dari pemilik properti yang menjadi pelaku pasar. Dengan kata lain, pasar adalah mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan pribadi dapat terpenuhi. Maka pasar merupakan mekanisme yang pasif karena tidak memengaruhi properti apa atau mana yang akan dipertukarkan dan kebutuhan yang hendak dipuaskan lewat pertukaran properti itu. Tiap orang bekerja sendiri-sendiri dengan membeli dan menjual sehingga sekaligus bekerja demi kelancaran pekerjaan orang lain.

Mekanisme yang disebut di atas dipandang oleh Adam Smith sebagai "tangan-tangan tersembunyi" (*invisible hand*). "Tangan-tangan tersembunyi" dapat dipahami melalui kutipan yang sering dipetik oleh para ahli dari bukunya "*The Wealth of Nations*" (1965: 14, 423) adalah sebagai berikut:

"Kita mendapatkan makan malam kita bukan dari kemurahan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, tetapi dari penghargaan mereka terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Kita tidak memerhatikan terhadap kemanusiaan mereka, tetapi cinta diri mereka ... Setiap individu (yang) ... menggunakan kapital ... dan ... tenaga kerja ... tidak bermaksud untuk mempromosikan kepentingan publik, dan tidak tahu seberapa besar ia mempromosikannya ... dia ... dibimbing oleh tangan-tangan tersembunyi untuk mempromosikan tujuan yang sebenarnya bukan dari kehendaknya. .. Dengan mengejar kepentingannya sendiri dia sering kali juga mempromosikan kepentingan masyarakat [tanpa disadarinya]"

"Tangan-tangan tersembunyi", dengan kata lain, seperti kata Levacic (1991), merupakan karakteristik yang penting dari pasar. Ia dipandang sebagai salah satu mekanisme yang bekerja

dalam kehidupan sosial, adalah pertukaran bebas terhadap barang dan jasa antara dua partai pada suatu harga yang disepakati. Melalui perangkat yang kompleks dari suatu pertukaran, aktifitas ekonomi dari orang-orang yang berjarak dan yang tidak menyadari keberadaan satu sama lain dapat diatur. Harga berfungsi sebagai kunci dalam mekanisme ini. Menurut Levacic, suatu harga yang relatif tinggi terhadap biaya produksi dari suatu barang berarti merupakan suatu keuntungan yang besar. Namun, jatuhnya permintaan dari konsumen ditandai oleh jatuhnya harga secara relatif terhadap biaya produksi dan membuat kerugian bagi produser. Ini pada gilirannya akan membuat industri tutup dan orang kehilangan pekerjaan. Jadi, harga dipandang sebagai penyeimbang antara penawaran dan permintaan (*self-adjusting mechanism of the market*). Ketika permintaan naik harga cenderung meningkat. Ketika harga naik maka terjadi peningkatan keuntungan yang gilirannya memberi insentif buat memproduksi lebih banyak.

d. Kegagalan Pasar

Bagi penganut ekonomi klasik, seperti J.B. Say dan David Ricardo, mempercayai bahwa kegagalan pasar merupakan hal yang mustahil terjadi. Kenapa demikian? Jika memang ada penderitaan yang ditimbulkan oleh pasar maka penderitaan tersebut terjadi secara individual saja. Dengan kata lain, pendapatan dan kesejahteraan dari seorang penjual tertentu dapat saja menurun oleh kondisi pasar, tapi pendapatan dan kesejahteraan dari semua penjual sebagai satu kesatuan tidak mungkin bisa mengalami kerugian. David Ricardo (1951: 290), oleh karena itu, memberikan argumen: “orang memproduksi selalu dengan tujuan agar ia bisa menjual dan mengonsumsi dan begitu juga orang menjual selalu dengan tujuan agar bisa membeli komoditas lain, yang bisa berguna secara langsung baginya atau bisa berguna bagi kegiatan produksinya di masa depan. Maka ketika seseorang melakukan produksi, ia dapat sekaligus menjadi konsumen bagi barangnya sendiri atau dapat menjadi pembeli dan konsumen dari barang orang lain. Bisa jadi dia tidak tahu apa komoditas yang paling menguntungkan untuk ia produksi, tapi ketidaktahuan itu tidak mungkin berlangsung lama, sehingga ia pasti akan selalu bisa mencapai tujuannya, yaitu memiliki barang-barang lain. Karenanya dapat disimpulkan bahwa orang tidak mungkin akan terus-menerus memproduksi sebuah komoditas yang tidak diinginkan orang lain”

Argumen tidak mungkin terjadi kegagalan pasar sebagai keseluruhan, yang mungkin hanyalah kegagalan individual yang tidak mampu menemukan pembeli, ditegaskan dalam penjelasannya sebagai berikut:

Bisa jadi ada satu komoditas tertentu yang diproduksi dalam jumlah yang terlalu banyak, sehingga pasar menjadi jenuh dan produsen dari barang itu tidak berhasil mendapatkan kembali kapital yang sudah ia keluarkan untuk memproduksi barang-barang itu. Tapi hal semacam itu tidak mungkin terjadi pada semua komoditas. Misalnya, permintaan terhadap jagung akan dibatasi oleh jumlah orang yang mau mengonsumsinya, atau permintaan terhadap sepatu dan mantel akan dibatasi oleh jumlah orang yang mau mengenakannya. Tapi biarpun ada masyarakat tertentu yang bisa memiliki jagung sebanyak mungkin sehingga ia bisa makan jagung sepuasnya, atau memiliki mantel dan sepatu sebanyak mungkin sehingga bisa mengenakannya sepuas-puasnya, hal semacam itu tidak mungkin terjadi pada semua komoditas dalam masyarakat, baik untuk komoditas yang dibuat lewat kemampuan manusia maupun komoditas yang disediakan alam (1951: 292).

Jadi, jika pasar bertahan dan berkembang karena adanya mekanisme pasar yang mengatur dirinya sendiri. Alferd Marshal dalam "*Principle of Economics*" menyatakan bahwa permintaan dan penawaran secara simultan akan menciptakan suatu harga. Dengan kata lain, baik sisi permintaan maupun sisi penawaran memiliki kontribusi dalam menciptakan harga, bagaikan sebuah gunting yang memiliki dua sisi sisi yang berbeda yang memotong secarik kertas. Kertas bisa terpotong karena keseimbangan kedua sisi gunting dalam

Bagi penganut ekonomi klasik melihat bahwa apabila pasar yang mengatur dirinya sendiri berdasarkan hukum permintaan dan penawaran berjalan dengan sempurna, maka tidak dimungkinkan terjadinya kegagalan pasar. Kalau demikian, apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar menurut penganut ekonomi klasik? Kegagalan pasar dari sudut pandang ekonomi klasik disebabkan karena faktor-faktor di luar pasar itu sendiri.

Berbeda dengan para penganut ekonomi klasik, menurut Caporaso dan Levine (2008: 198), para penganut ekonomi neoklasik melihat bahwa pasar sebagai institusi yang memberikan kemungkinan terbentuknya peluang yang mempertemukan orang yang memiliki permintaan dengan orang yang memiliki penawaran sedemikian rupa sehingga kebutuhan semua orang akan terpenuhi sedapat mungkin sesuai dengan sumber daya yang ada. Pasar juga dilihat sebagai institusi yang memungkinkan terciptanya peluang yang semaksimal mungkin bagi pertukaran secara bebas sehingga memungkinkan terwujudnya efisiensi yang seluas-luasnya. Pasar

memberikan kemungkinan bagi individu untuk mengganti sumber daya atau komoditas yang hendak ia gunakan agar bisa memenuhi keinginannya. Jika dipandang dari perspektif konsumen, lanjut Caporaso dan Levine, situasi semacam ini tercipta jika ada banyak jenis barang konsumen di pasar yang bisa ia pilih. Sedangkan dari perspektif produsen, situasi tercipta ketika ada kesempatan untuk mengombinasikan faktor-faktor produksi dengan banyak cara yang berbeda. Tanah, tenaga kerja dan kapital yang semuanya mempunyai banyak lagi sub-kategori di dalamnya, bisa digabungkan dengan proporsi yang berbeda-beda untuk menghasilkan barang-barang yang dapat dijual di pasar.

Apakah para penganut ekonomi neoklasik melihat kemungkinan terjadinya kegagalan pasar? Menurut Caporaso dan Levine (2008: 203-227) terdapat tiga kegagalan pasar dalam pandangan para ekonomi neoklasik, yaitu kegagalan yang disebabkan karena adanya eksternalitas, kegagalan yang berkenaan dengan barang publik (*public good*), dan kegagalan yang dikarenakan terjadinya monopoli.

Untuk memahami kegagalan pasar yang dikarenakan oleh eksternalitas tentu terlebih dahulu perlu mengerti tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu transaksi yang menimpa pihak yang bukan bagian dari transaksi tersebut. Ia merupakan dampak terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi yang tidak melewati sistem harga dan hadir sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau perusahaan lain. Pada pasar yang berfungsi ideal, semua transaksi bersifat pribadi. Apabila suatu transaksi melibatkan pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut biasanya diberikan imbalan atau dikenakan biaya. Dengan demikian biaya yang ditanggung semua produsen adalah sama dengan biaya yang dipikul oleh masyarakat. Sedangkan keuntungan yang diraih oleh masyarakat akan sama dengan keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Namun dalam kenyataannya, perimbangan antara biaya dan keuntungan pribadi dengan biaya dan keuntungan sosial tidak selalu sama. Oleh karena itu muncullah masalah eksternalitas, karena ada orang lain yang memperoleh keuntungan atau harus mengeluarkan biaya untuk urusan-urusan yang muncul bukan atas kemauan mereka sendiri. Dengan kata lain, terdapat pihak ketiga yang tidak terlibat transaksi memperoleh keuntungan atau mendapatkan kerugian karena alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan pilihan yang mereka ciptakan. Untuk memahami konsep ini coba kita pahami pepatah berikut “orang yang makan nangka, kita kena getahnya”. Pepatah

ini sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, yang bermakna suatu akibat yang dikarenakan oleh perbuatan orang lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan diri kita, misalnya polusi, banjir, atau asap yang ditimbulkan oleh kegiatan berbagai perusahaan sehingga membuat masyarakat menderita karenanya. Ini merupakan bentuk eksternalitas negatif. Apapun bentuk eksternalitas, positif atau negatif, merupakan sesuatu yang mengganggu aspek keadilan dan efisiensi dari operasi dalam perekonomian.

Kegagalan pasar berikutnya adalah kegagalan yang berkenaan dengan barang publik (*public good*). Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita pahami dulu konsep barang publik (*public good*). Konsep barang publik merujuk pada barang-barang yang tidak dapat dibagi-bagi atau harus tersebar secara luas sehingga sulit untuk dimiliki oleh satu orang atau satu pihak saja. Ketika barang-barang tersebut selesai diproduksi, ia langsung masuk dalam wilayah publik. Oleh karena itu barang publik mengandung sifat non-eksklusif dan non-rival. Sifat non-eksklusif dari suatu barang menunjukkan ketiadaan cara untuk menyalurkan keuntungan dari barang itu hanya kepada mereka yang sudah membayar saja, sehingga dimungkinkan terjadinya pembonceng (*free rider*) yang menikmati barang publik meskipun tidak menanggung biaya untuk itu (Caporaso dan Levine, 2008: 220).

Sedangkan sifat non-rival dari suatu barang memperlihatkan keadaan di mana ketika seseorang mengonsumsi suatu barang publik, orang lain tetap bisa sama-sama mengonsumsi barang publik yang sama. Barang-barang publik seperti udara bersih, keamanan berlalu lintas, pertahanan negara, atau pengendalian wabah penyakit merupakan barang publik yang dibutuhkan oleh individu. Bagi individu yang ingin memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pribadinya, namun dia tidak bisa memperolehnya melalui pasar. Jadi keberadaan barang-barang publik mencerminkan kegagalan pasar.

Terakhir, kegagalan pasar yang bersumber dari keberadaan monopoli dan oligopoli. Monopoli dipahami sebagai hanya ada satu perusahaan mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk suatu sektor tertentu. Sedangkan oligopoli ditunjukkan terdapat hanya segelintir perusahaan yang mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk suatu sektor tertentu. Jika pasar mengalami monopolistik atau oligopolistik maka pasar dengan persaingan sempurna tidak terjadi. Dengan kata lain, terdapat (beberapa) perusahaan yang mampu mengendalikan harga. Dengan demikian, pasar seperti itu tidak efisien dan adil

sehingga tidak mampu mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pribadi. Keadaan seperti ini menunjukkan kegagalan pasar.

Kritik dari penganut Keynesian, menurut Caporaso dan Levine (2008: 237), mengatakan bahwa kegagalan untuk menemukan pembeli bisa jadi merupakan masalah sistemik yang tidak ada kaitannya dengan ketidakcocokan antara apa yang diproduksi dengan apa yang diperlukan, melainkan bisa disebabkan karena kegagalan mekanisme pasar itu sendiri untuk menarik pembeli-pembeli yang memiliki daya beli yang cukup. Dengan kata lain, pasar gagal untuk mempertemukan permintaan dengan pasokan, sehingga tidak berhasil memanfaatkan keseluruhan kapasitas produksi yang tersedia dalam masyarakat. Kegagalan pada permintaan agregat ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan kegagalan permintaan individu. Jika pasar secara sistematis gagal untuk menemukan permintaan agregat maka akan berdampak pada kemampuan pasar sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan.

Kritik lain tentang terjadinya kegagalan pasar yang sering dikemukakan adalah asumsi yang dimiliki dari pasar itu sendiri yang dibangun oleh penganut ekonomi klasik dan ekonomi neoklasik. Zusmelia (2007: 17) merangkum beberapa kritik tersebut dengan baik. Kegagalan pasar, menurut Zusmelia, sebenarnya terjadi karena asumsi untuk terjadinya pasar persaingan sempurna, tidak dapat terpenuhi, yakni di antaranya masing-masing pihak (aktor) yang melakukan pertukaran harus mempunyai informasi yang sama (*symmetric information*) terhadap kualitas dan harga barang dan jasa yang akan ditransaksikan tersebut, sehingga di dalam pertukaran secara adil dapat dilakukan. Dengan kata lain, para aktor ekonomi akan menentukan harga yang wajar (*just price*), yaitu harga pasar mencerminkan tingkat kelangkaan sumber daya yang dipertukarkan, semakin langka sumber daya, dan semakin biaya untuk mengekstraksikan, semakin tinggi harganya dalam pertukaran, demikian sebaliknya.

Jika negara mengalami kegagalan negara dan pasar menghadapi kegagalan, apa kekuatan lain yang bisa menggerakkan kehidupan manusia? Jawabannya adalah *civil society*.

3. CIVIL SOCIETY

a. Pengertian *Civil Society*

Civil society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam 3 cara, yaitu masyarakat sipil, masyarakat warga/kewargaan dan masyarakat madani. Terjemahan *civil society* sebagai masyarakat sipil dirasakan oleh berbagai kalangan kurang pas. Karena dalam dunia keseharian dan akademik Indonesia, konsep sipil sering dikaitkan dengan konsep militer. Dengan kata lain, jika ada masyarakat sipil berarti juga ada masyarakat militer. Kandungan pemahaman konsep seperti ini akan mendistorsikan inti dan makna hakiki dari konsep *civil society*.

Masyarakat warga/kewargaan merupakan terjemahan yang merujuk pada kata *civic*. Terjemahan seperti ini mengingatkan dengan pendidikan kewarganegaraan yang pernah diajarkan pada sebelum tahun 1970-an. Akibatnya terkesan masyarakat warga adalah masyarakat yang menjadi warganegara yang baik.

Masyarakat madani merupakan suatu terjemahan dari *civil society* yang diusulkan oleh Dato Anwar Ibrahim. Pertama kali diperkenalkan oleh beliau pada saat yang bersangkutan menyampaikan ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah Festival Istiqlal, 26 Desember 1995 (Aswab Mahasim, 1995). Kalangan akademisi Indonesia juga tidak bersepakat untuk menggunakan konsep masyarakat madani sebagai terjemahan dari konsep *civil society*. Karena masyarakat madani kalau dipahami secara kasar adalah masyarakat kota. Sedangkan rujukannya adalah masyarakat madinah ketika Rasulullah dan Khilafah Rasyidin memimpin umat Islam dan tundukannya. Persoalan muncul karena konsep *civil society* muncul dari masyarakat Barat maka rujukannya juga adalah Barat. Untuk menghindari perdebatan seperti ini maka konsep *civil society* digunakan sebagaimana adanya.

Civil society merupakan konsep yang lahir dari pandangan yang melihat adanya hubungan sedemikian rupa antara masyarakat dan negara. Pandangan tentang hubungan antara masyarakat dan negara mengalami evolusi dari masa ke masa. Terakhir berkembang pemikiran bahwa ada tiga pilar kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia yaitu *state* (negara), *market* (pasar) dan *civil society*.

Civil society, dikonsepsikan secara teoritis dalam tulisan ini, merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, *self-reliance* (percaya diri), *self-supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku. Bebas dari

ketergantungan negara dan pasar dimaksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktifitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik, dan agama) tanpa adanya intervensi negara dan pasar. Intervensi negara terhadap masyarakat dibolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, aturan main dilanggar atau undang-undang tidak tegak.

Dalam *civil society*, individu dan/atau kelompok individu memiliki *self-reliance* (percaya diri). Percaya diri merupakan suatu keadaan di mana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Sedangkan *self-supporting* (swasembada) adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa ada ketergantungan. Aktifitas-aktifitas kemasyarakatan yang dilakukan oleh *civil society* dilakukan tidak terpaksa, tetapi sebaliknya secara *voluntary* (sukarela). Terakhir, ketaatan terhadap nilai dan norma yang berlaku merupakan ciri dari suatu komunitas yang telah menerapkan prinsip *civil society*.

b. Asal Usul *Civil Society*

Adam Ferguson, seperti yang dijelaskan oleh Ernest Gellner (1994: 68-90), merupakan tokoh yang pertama kali menggunakan konsep *civil society* ketika ia menulis *An Essay on the History of Civil Society*. Revolusi industri dan perkembangan kapitalisme telah menyebabkan terjadinya perbedaan mencolok antara yang publik dan privat. Munculnya ekonomi pasar melunturkan tanggungjawab publik dari warga karena dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai pemuasan kepentingan pribadi. Adanya *civil society* diharapkan akan menghambat negara yang tiran.

Asal usul *civil society* yang dipahami oleh Adam Ferguson tersebut diperkuat oleh para penganut ekonomi klasik. Mereka melihat bahwa *civil society* sebagai suatu bentuk perkembangan dari sistem pemenuhan kebutuhan pribadi. Asal usul *civil society* dari perspektif ekonomi klasik, oleh sebab itu, mirip dengan penjelasannya dengan asal usul pasar. Menurut perspektif ekonomi klasik, sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang pertama dimiliki oleh umat manusia adalah sistem subsistensi, yaitu pemenuhan kebutuhan diproduksi dalam, dari, oleh, dan untuk keluarga atau dalam, dari, oleh, dan untuk sebuah kelompok kerabat (*kinship*). Produksi tersebut didasarkan pada pola pembagian kerja dalam keluarga. Oleh sebab itu kegiatan

produksi tunduk pada tujuan-tujuan dan hubungan-hubungan yang ada dalam keluarga itu, seperti fungsi reproduksi, pendidikan, kewenangan paternal, kebutuhan psikologis dan fisiologis, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi melekat (*embedded*) dalam institusi-institusi non-ekonomi seperti kegiatan kerajaan, aktivitas keagamaan, ritual adat, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan non-ekonomi. Oleh karena itu, anggota keluarga melakukan kegiatan produksi dikarenakan untuk menunaikan kewajiban mereka sebagai anggota keluarga untuk upacara ritual keagamaan, misalnya, bukan didorong oleh motif untuk memperoleh keuntungan atau akumulasi kapital.

Ketika bidang ekonomi terlepas dari bidang non-ekonomi dan mulai berdiri sendiri, maka kegiatan individu dalam bidang ekonomi juga terlepas dari ikatannya dengan bidang non-ekonomi. Individu melakukan kegiatan produksi bukan lagi didorong oleh alasan non-ekonomi, melainkan oleh motif meraih keuntungan pribadi. Dalam kondisi seperti ini, ikatan individu dalam aktivitas ekonomi bersifat kontraktual dan melihat kepentingan dirinya sendiri sebagai fokus. Mereka melihat dirinya sendiri terpisah dari individu lainnya, independen, dan otonom. Pada kondisi inilah dipandang sebagai kemunculan masyarakat baru yang bernama *civil society*, yaitu masyarakat di mana sistem kebutuhan pribadi tidak lagi diatur oleh institusi keluarga atau negara, namun diatur dan dipacu oleh kepentingan pribadi, yaitu memperoleh keuntungan pribadi (*profit seeking*), memaksimalkan kegunaan (*utility maximization*), atau istilah lain yang artinya serupa.

c. Gerakan Sosial : Kekuatan *Civil Society*

Apa yang dimiliki oleh tiga pilar kekuasaan sehingga mereka bisa menggerakkan atau mempengaruhi kehidupan kita? Negara memiliki *political power* (kekuatan politik) melalui intervensi, pasar memiliki *economic power* (kekuatan ekonomi) melalui tangan-tangan tersembunyi, sedangkan *civil society* mempunyai *social power* (kekuatan sosial) melalui *social movement* (gerakan sosial).

a. Pengertian Gerakan Sosial

Apa itu gerakan sosial (*social movement*)? Untuk memahami konsep ini mari kita tinjau teks beberapa sosiologi yang mendiskusikannya:

1. James M. Henselin

Dalam bukunya “Sosiologi dengan Pendekatan membumi”, Henselin (2008) merumuskan gerakan sosial sebagai sejumlah besar orang yang berorganisasi untuk mempromosikan atau menentang perubahan.

2. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt

Horton dan Hunt (1989) dalam bukunya “Sosiologi” memberikan batasan gerakan sosial sebagai suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan.

3. Kamanto Sunarto

Kamanto Sunarto (2004) dalam bukunya sosiologi menjelaskan pengertian gerakan sosial sebagai perilaku kolektif yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya.

Dari ketiga pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial merupakan suatu usaha bersama (kolektif) untuk melakukan atau menentang suatu perubahan dalam masyarakat. Dari definisi ini maka gerakan sosial mencakup spektrum yang sangat luas dan melebar seperti berbagai gerakan / aksi anti (rokok, narkoba, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), pornografi, dan sebagainya), bermacam gerakan / aksi pro (hidup sehat, lingkungan bersih, demokrasi, kemerdekaan, penegakan HAM, dan seterusnya), atau beragam gerakan pemberdayaan dan advokasi (petani, pedagang kaki lima, buruh, nelayan, pengamen, gender, anak, penyandang cacat/disabilitas, masyarakat miskin perkotaan, dan lainnya).

b. Tipologi Gerakan Sosial

Terdapat banyak ahli yang membahas tentang tipologi gerakan sosial. Berikut didiskusikan beberapa pandangan soisolog tentang hal ini.

1. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt

Horton dan Hunt (1989: 198-201) menemukan ada enam bentuk dari gerakan sosial, yaitu:

1. Gerakan perpindahan (*migratory movement*), yaitu arus perpindahan penduduk ke suatu tempat baru. Ketika penganut Islam tidak disukai dan dimusuhi oleh penduduk Mekah pada perkembangan awalnya, Rasullah menganjurkan agar penganut orang Muslim yang ada di Mekah hijrah (pindah) ke kota Madinah. untuk menghindari penganiayaan, diskriminasi, dan penekanan yang lebih besar. Hijrah tersebut dapat dipahami sebagai gerakan perpindahan. Atau arus pengungsian besar0besar orang Vietnam Selatan ke Pulau Galang pada masa perang Vietnam juga merupakan bentuk dari gerakan perpindahan.
2. Gerakan ekspresif (*expressive movement*), merupakan gerakan yang merubah ekspresi, sikap atau reaksi terhadap kenyataan, dan bukannya merubah kenyataan (masyarakat) itu sendiri. Terdapat berbagai macam gerakan ekspresif seperti musik, puisi, drama, lawakan, lelucon, aliran kepercayaan, keagamaan, dan lain sebagainya. Misalnya berbagai lelucon tentang politik muncul dalam masyarakat Rusia ketika masa Uni Soviet.
3. Gerakan utopia (*utopian movement*) adalah gerakan untuk menciptakan suatu masyarakat sejahtera dalam skala terbatas. Model tersebut dapat dicontoh dan dimungkinkan untuk dikonstruksi dalam skala yang lebih besar. Misalnya gerakan Kibut Israel, gerakan Darul Arqam Malaysia, dan lainnya.
4. Gerakan reformasi (*reform movement*), yaitu gerakan yang berusaha untuk memperbaiki beberapa kepincangan dalam masyarakat. Gerakan ini biasanya muncul di negara demokratis. Gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998 merupakan contoh bagaimana gerakan itu terjadi untuk memperbaiki kepincangan yang terjadi dalam kehidupan berekonomi, politik, dan sosial budaya. Namun sayangnya, gerakan reformasi tersebut menemukan kegagalan sebelum mengkristal menjadi suatu gerakan yang kuat dan kokoh,

meskipun demikian melalui gerakan ini telah terjadi banyak perubahan seperti pemilihan presiden dan kepala daerah langsung.

5. Gerakan revolusioner (*revolutionary movement*), yaitu gerakan yang dibangun untuk menggantikan sistem yang ada dengan sistem yang baru. Para penganut gerakan ini, menurut Horton dan Hunt, cenderung berseberangan dengan penganut gerakan reformasi, karena mereka berkeyakinan bahwa reformasi yang berarti tidak mungkin terjadi bilamana sistem yang ada tetap bertahan. Mereka berpendapat bahwa perubahan radikal dan mendasar hanya dapat terlaksana apabila sistem sosial yang ada sekarang diganti dengan yang baru serta kelompok elit yang ada disingkirkan dan diputus mata rantai sirkulasinya. Selanjutnya, persaingan antar kelompok dalam perebutan kekuasaan terjadi.
6. Gerakan perlawanan (*resistance movement*), yaitu gerakan yang bertujuan untuk menghambat atau menghalangi suatu perubahan sosial tertentu. Perubahan sosial yang terjadi selama ini tidak saja membahagiakan, tetapi juga menakutkan banyak orang. Perubahan pandangan tentang nilai, norma, dan sikap sekelompok orang dalam masyarakat seperti seks bebas, pornografi, feminisme, sekularisme, dan lainnya telah menimbulkan ketidaknyamanan bahkan ketakutan yang dialami oleh kelompok lainnya. Kelompok orang yang disebut terakhir ini melakukan suatu gerakan perlawanan dengan mengatasnamakan agama, tradisi, sejarah, moralitas, adat, dan sebagainya sehingga lahirlah misalnya berbagai gerakan anti (pornografi, narkoba, seks bebas) atau gerakan pemurnian (kembali kepada ajaran agama, tradisi, moralitas).

2. David F. Aberle

Kebanyakan teks sosiologi cenderung membahas pandangan Aberle bila mendiskusikan tipologi gerakan sosial. Berbeda dengan Horton dan Hunt, Aberle dalam bukunya *The Peyote Religion among the Nevaho* menemukan empat tipe dari gerakan sosial, yaitu:

1. Gerakan sosial alteratif (*alterative social movement*), yaitu gerakan yang bertujuan mengubah perilaku tertentu dalam diri individu. Dalam tipe ini mencakup berbagai kegiatan seperti kampanye anti narkoba, anti miras (minuman keras), anti seks bebas, dan sebagainya.
2. Gerakan sosial redemptif (*redemptive social movement*), merupakan gerakan yang

bertujuan mengubah keseluruhan perilaku individu. Jadi, gerakan ini memiliki sasaran yang sama dengan gerakan sosial alternatif (yaitu individu), namun berbeda dalam cakupan. Gerakan sosial redemptif merubah perilaku lama menjadi perilaku baru, yang berbeda sama sekali dengan yang lama. Contoh yang diajukan biasanya gerakan keagamaan seperti gerakan fundamentalis keagamaan seperti gerakan fundamentalis Krisen, Islam, Yahudi, atau Hindu. Dalam Islam, misalnya, konsep pertobatan, yaitu meninggalkan sama sekali suatu perilaku negatif menuju perilaku positif secara keseluruhan; dan konsep hijrah yaitu gerakan perpindahan (fisik atau rohani/mental) yang lebih baik lagi merupakan konsep yang menunjuk pada “suatu gerakan redemptif”. Ketika konsep tersebut diaktualisasikan dalam usaha bersama (kolektif) maka ia menjadi gerakan sosial redemptif.

3. Gerakan sosial reformatif (*reformative social movement*), adalah gerakan perubahan atau reformasi pada segi atau bagian tertentu dari masyarakat. Gerakan ini jelas berbeda dengan dua gerakan yang disebut lebih awal yang menekankan pada individu. Sedangkan apabila dibandingkan dengan pandangan Horton dan Hunt, terlihat ada persamaannya dengan konsep gerakan reformasi (*reform movement*).
4. Gerakan sosial transformatif (*transformative social movement*), menunjuk pada gerakan untuk mentransformasikan tatanan sosial itu sendiri. Para anggotanya memiliki keinginan hendak mengubah tatanan sosial masyarakat menjadi tatanan yang lebih baik menurut versi mereka. Jika dibandingkan dengan tipologi Horton dan Hunt maka akan tampak persamaannya dengan konsep gerakan revolusioner.

Tipologi Aberle tersebut dipertajam oleh Henselin (2008) dengan menambah dua tipe lainnya, yaitu gerakan sosial transnasional (*transnational social movement*) dan gerakan sosial metaformatif (*metaformative social movement*). Gerakan sosial transnasional merupakan gerakan yang ingin mengubah kondisi tertentu yang tidak hanya ada dalam lingkungan mereka, tetapi juga di seluruh dunia. Gerakan sosial ini sering ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup tertentu misalnya kaum buruh sedunia, kualitas lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Sedangkan gerakan sosial metaformatif menunjuk pada gerakan yang ingin mengubah tatanan sosial itu sendiri, yang tidak hanya pada skala lokal dan nasional, tetapi lebih luas lagi yaitu tatanan sosial global. Gerakan komunisme dan fasisme merupakan contoh dari

gerakan sosial metaformatif ini. Selain itu, gerakan fundamentalisme keagamaan bisa menjadi suatu gerakan yang bersifat metaformatif bila cakupan telah global. Semua agama memiliki potensi untuk mengonstruksi gerakan sosial metaformatif oleh para pemeluknya. Untuk memahami secara sederhana Figur 3 berikut dapat membantu.

Figur 3 Tipologi Gerakan Sosial Aberle dengan Penajaman Henselin

		Besarnya Perubahan	
		Sebagian	Menyeluruh
Target Perubahan	Individu	1 Alteratif	2 Redemptif
	Masyarakat	3 Reformatif	4 Transformatif
	Global	5 Transnasional	6 Metaformatif

Sumber: Henselin (2008: 230)

c. Cara Gerakan Sosial

Berbagai gerakan sosial memiliki beragam cara untuk merealisasikan tujuan yang dimilikinya. Berikut kita diskusikan beberapa cara yang dapat digunakan oleh para aktifis pergerakan.

1. Kekerasan meliputi demonstrasi anarkis, pembajakan, penyanderaan, penculikan, pembunuhan, teror fisik, psikis, dan budaya serta perang.
2. Non-kekerasan meliputi mogok, demonstrasi damai, pemberdayaan, advokasi, dan sebagainya.

d. Tahapan Gerakan Sosial

Berdasarkan studi Henselin (2008: 231-232) dari berbagai literatur ditemukan bahwa terdapat beberapa tahapan dari gerakan sosial:

1. Tahap kerusuhan dan agitatif. Bermula dari sekelompok orang yang merasa terganggu oleh kondisi tertentu dan hendak mengubahnya. Muncul pemimpin yang mampu menerjemahkan perasaan orang-orang ke dalam bentuk wacana yang menyangkut sejumlah isu yang berhubungan dengan sebab ketergangguan tersebut. Kebanyakan gerakan gagal pada tahap ini, sebab gagal mendapatkan cukup dukungan. Setelah gejala kegiatan yang singkat, gerakan mati secara perlahan.
2. Tahap mobilisasi sumber daya. Tahapan pertama gerakan bisa dilalui jika mampu memobilisasi sumber daya seperti waktu, dana, keterampilan orang, dan untuk mendapatkan perhatian media massa. Dalam beberapa kasus, muncul kepemimpinan setempal yang mampu memobilisasi sumber daya.
3. Tahap pengorganisasian. Tahapan ini ditandai adanya pembagian kerja. Pemimpin memutuskan suatu kebijakan, sedangkan perangkat struktur yang ada melaksanakan tugas sehari-hari yang diperlukan agar gerakan tetap berjalan. Dalam tahap ini masih banyak ditemui kegairahan kolektif terhadap isu yang menjadi pusat perhatian.
4. Tahap institusionalisasi. Pada tahap ini gerakan telah mengembangkan suatu birokrasi. Kontrol berada di tangan para pejabat karir, yang mungkin lebih mementingkan kepentingan atau posisi mereka sendiri ketimbang pencapaian tujuan pergerakan itu sendiri. Pada tahap ini kegairahan politik mulai berkurang.
5. Tahapan kemunduran dan kemungkinan kebangkitan kembali. Manajemen kegiatan sehari-hari mendominasi kepemimpinan. Juga ditandai dengan perubahan sentimen politik, tidak ada lagi kelompok orang yang mempunyai komitmen kuat dan berbagi suatu tujuan bersama. Jika itu ditemukan maka gerakan sosial berpeluang redup dan terus menghilang. Pada saat redup dimungkinkan juga muncul pemimpin yang lebih idealis dan berkomitmen tinggi untuk menyegarkan gerakan.

C. KEKUASAAN DI PERKOTAAN

Bagaimana ketiga komponen tersebut di atas mengatur atau memengaruhi kehidupan perkotaan? Bagaimana hubungan antara ketiga ini bisa saling berhubungan satu sama lain: berkompetisi atau berkonflik, berkolusi atau bersinergi dalam menggerakkan kehidupan umat manusia.

1. Kekuasaan Negara dalam Kota

Bagaimana melihat kekuasaan negara dalam kota secara sederhana? Caranya tidak sulit! Coba tengok apa saja aturan perundangan yang diterbitkan terkait dengan kota dan komunitas kota serta bagaimana impelementasinya. Itulah wajah kekuasaan negara dalam kota. Bagaimana pengaruh kekuasaan negara terhadap kota atau komunitas kota? Apabila aturan perundangan seperti peraturan daerah, surat keputusan walikota, atau peraturan walikota membebani atau menyengsarakan warga atau komunitas kota, maka negara telah kehilangan rohnya sebagai institusi yang menyejahterakan, memakmurkan, dan memberikan rasa aman pada warganya. Dengan kata lain, negara telah gagal menjalankan fungsinya.

Apabila pandangan ditukikkan lebih dalam melihat kegagalan tersebut di atas, maka hal tersebut merupakan cermin kegagalan pemimpin eksekutif, terutama walikota, beserta anggota dewan yang tidak mampu menyejahterakan, memakmurkan, dan memberikan rasa aman kepada warganya. Janji muluk yang ditebarkan pada saat kampanye sebelumnya, hanyalah rangkaian dusta publik yang dikemas dalam bentuk visi, misi, dan program di atas kertas. Kesemua itu adalah proyek pencitraan yang pengemasannya dilakukan dengan cara optimal versi individual. Tidak jarang menggunakan jasa pebisnis marketing politik tingkat nasional dan jasa media massa konvensional dan elektronik serta media sosial yang masiv.

Sebaliknya, apabila aturan perundangan yang dibuat oleh kota menyejahterakan, memakmurkan, dan memberikan rasa aman pada warganya, maka warga merasakan kehadiran negara di tengah komunitasnya. Negara telah menjalankan fungsinya sesuai dengan peran konstitusional yang diembannya.

Bagaimana seharusnya penyelenggara pemerintah kota memegang amanat rakyat sehingga bisa menyejahterakan, memakmurkan, dan memberikan rasa aman bagi warganya?

Atau dengan kata lain, bagaimana seyogya pemerintah kota dengan aparaturnya menjalankan fungsinya? Menjawab pertanyaan ini, menarik memahami gagasan Eko Budihardjo dan Djoko Soejarto dalam buku *Kota Berkelanjutan* (2009) tentang sepuluh butir kebijakan pimpinan kota dalam keberlanjutan pembangunan kota, yang disebutnya sebagai *the ten commandments* kota berkelanjutan: *employment* (ekonomi), *environment* (ekologi), *engagement* (partisipasi), *empowerment* (pemberdayaan), *enforcement* (penegakan hukum), *enjoyment* (kenyamanan/kenikmatan), *equity* (kesetaraan hak), *energy conservation*, *ethics of development*, dan estetika kota. Gagasan tersebut diringkas oleh Eko Budihardjo dalam bukunya “Reformasi Perkotaan” (2014: 186):

...pertama, *equity*, yaitu kesetaraan alias pemerataan aset dan akses pembangunan, baik secara geografis maupun demografis. Kedua, *environment*, yaitu keserasian lingkungan atau keseimbangan ekologis. Ketiga, *employment* atau tersedianya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Empat, *empowerment* atau pemberdayaan segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali. Kelima, *engagement*, yaitu pelibatan pihak swasta atau dunia usaha dalam pembangunan. Keenam, *enforcement* atau penegakan hukum, yang dijalankan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Ketujuh, *enjoyment*, yakni agar rakyat merasa nyaman dan betah tinggal di lokasi masing-masing. Kedelapan, *energy conservation* atau hemat energi dengan prinsip ramah lingkungan sesuai dengan gerakan hijau. Kesembilan, *ethics of development* atau etika dalam pembangunan, menghindari aneka jenis egoisme yang hanya mengutamakan kepentingan sendiri. Kesepuluh, *esthetics* atau keindahan lingkungan untuk menciptakan rasa tempat, *sense of place* atau *genius loci*.

2. Kekuasaan Pasar dalam Kota

Untuk melihat bagaimana pasar berperan dalam kehidupan kota maka lihatlah bagaimana peran pebisnis, sebagai eksponen pasar, dalam kota. Sesuatu yang digerakkan untuk tujuan profit dan mengambil margin dari suatu kegiatan maka di sana ada peran pasar melalui pebisnis di kota. Prinsip pasar adalah segala sesuatu yang dilakukan bisa menghasilkan profit atau dapat memperoleh margin melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Oleh sebab itu, hampir semua aspek kehidupan di perkotaan tidak bisa dilepaskan dari pasar: mulai dari lahir sampai mati manusia berhubungan dengan pasar karena semua hampir barang dan jasa yang berkenaan dengan kehidupan orang kota berasal dari pasar. Dalam kasus tertentu pasar ilegal secara umum, namun secara terbatas bisa menjadi legal di khusus tempat khusus misalnya menjual minuman keras di restoran hotel berbintang lima. Atau misalnya tidak pernah ada razia prostitusi di hotel bintang lima, sedangkan kebalikannya pada hotel “bintang kecil” dan penginapan kelas melati razia sering dilakukan.

Apakah pasar di perkotaan sesuatu yang homogen? Tidak! Pasar beragam jenis dan tingkatannya, yang dipresentasikan oleh keberagaman pebisnis dengan usahanya. Dalam kehidupan keseharian kita mengenal pasar legal dan pasar ilegal. Pasar legal merupakan pasar yang tidak melanggar aturan perundangan yang ditetapkan, biasanya terkait dengan yang tidak merusak kehidupan masyarakat dan ekonomi negara. Pasar legal terdiri dari pasar formal dan pasar informal.

Pasar ilegal merupakan kebalikan dari pasar legal, yaitu pasar yang melanggar aturan perundangan. Pasar ilegal, sebagai kebalikan pasar legal, cenderung merusak kehidupan masyarakat dan ekonomi negara, misalnya pasar narkoba, prostitusi, minuman keras, judi, barang selundupan, dan lain lain. Pasar jenis ini, oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya sering pula disebut sebagai pasar gelap (*black market*).

Apakah pasar di perkotaan tidak berkonflik? Pasar dilandasi oleh mekanisme permintaan dan penawaran di mana di dalamnya ada persaingan. Meskipun dimungkinkan terjadi koalisi di antara para pebisnis dalam menetapkan harga, misalnya kesepakatan batas margin terendah dari suatu barang, guna menghadapi pembeli di pasar. Namun tetap saja pebisnis bersaing antara satu dengan lainnya, paling tidak bersaing dalam kenyamanan dan hospitaliti pelayanan dan purna jual, misalnya. Persaingan antara pebisnis tidak hanya inter level misalnya sesama pedagang retail toko, antara berbagai supermarket, tetapi juga antar level yaitu antara pebisnis besar seperti super mall atau supermarket dengan pebisnis menengah seperti toko atau mini market dan pebisnis usaha kecil dan sektor informal seperti pemilik warung atau gerobak.

Persaingan antar level pebisnis ini lebih tepat perang bisnis dalam bentuk *zero sum game*, yaitu dalam pertempuran antara hidup atau mati. Kenyataan ini bisa ditelusuri bagaimana perkembangan bisnis retail kebutuhan sehari-hari, yang dikenal dengan pasar P & D. Coba kita perhatikan perkembangan pasar retail di dua kota Sumatera, yaitu Pekanbaru dan Padang. Pekanbaru sebagai salah satu kota yang tercepat perkembangannya di Sumatera telah menumbuhkembangkan banyak pasar level atas melalui munculnya berbagai pasar kulakan dan supermarket seperti Giant, lotte, dan lainnya. Di samping itu kota ini juga tumbuh bagai cendawan di musim hujan pasar level menengah seperti Indomaret dan Alparamart. Kedua perusahaan ritail ini tumbuh mekar di berbagai jalan dan sudut strategis Pekanbaru. Apa yang terjadi dengan pasar level bawah seperti warung dan gerobak? Perlahan tapi pasti satu persatu

warung dan gerobak menjual kebutuhan harian hilang dari kota. Bagaimana dengan Padang? Padang sebagai salah kota tua di Sumatera dan pernah menjadi kota terpenting tumbuh perlahan semenjak diluluhlantakkan oleh gempa besar pada 1 September 2009. Padang mempunyai hanya dua supermarket dan tidak memiliki pasar kulakan seperti Giant atau Lotte. Padang tumbuhkembang pasar level menengah dan kecil yang dimiliki oleh warga lokal. Pemerintah kota Padang tidak memberi izin berdirinya pasar level menengah berjaring nasional seperti Indomaret dan Alfamart. Selain itu hampir di setiap jalan dan sudut kota memiliki warung atau gerobak penjual barang kebutuhan harian. Kebijakan afirmatif ini memberikan ruang bagi warga untuk meraih kehidupan ekonomi secara adil.

3. Kekuasaan *Civil Society* dalam Kota

Bagaimana Anda merasakan kekuasaan *civil society* dalam kota? Ketika Anda dalam lingkungan komunitas tempat tinggal, rukun warga memungut iuran untuk jaga malam dan keamanan lingkungan atau ketika ada sanak keluarga meninggal dunia, orang yang terikat dalam kongsi kematian bersama-sama menyelenggarakan jenazah. Gerakan rukun tetangga dan kongsi kematian adalah suatu bentuk sederhana bagaimana kekuasaan dalam *civil society* berperan di kota.

Banyak gerakan komunitas lokal pada berbagai kota di Indonesia yang terindikasi sebagai gerakan sosial. Gerakan komunitas hijau di berbagai kota melalui penanaman bunga dan pepohonan di halaman rumah dan jalanan RT adalah bentuk dari kerja *civil society*. Gerakan bank sampah, lingkungan sehat, aman nyaman lingkungan, dan gemar baca di komunitas perkotaan adalah juga sebagai gerakan sosial dan budaya dari *civil society* perkotaan.

Gerakan sosial perkotaan tidak saja berdimensi ruang kecil seperti RT, RW atau kelurahan dan kecamatan, tetapi juga bisa lebih luas lagi seperti gerakan sumbangan koin buat penyelamatan seseorang korban dari suatu kezaliman oleh suatu kekuatan besar. Gerakan sosial perkotaan yang berskala luas dipermudah oleh perkembangan teknologi informasi beserta perangkat lunaknya seperti media sosial yang beragam jenisnya. Melalui media sosial, gerakan sosial perkotaan dapat berkembang dengan cepat sesuai dengan fokus atau tema yang sedang hangat diperjuangkan. Gerakan sosial seperti ini biasanya temporer, berdurasi seirama dengan waktu yang dicapai untuk meraih apa yang diinginkan.

Gerakan sosial perkotaan merupakan bentuk partisipasi warga dalam pembangunan kota. Warga kota memiliki ruang untuk mengaktualisasikan kepentingan dan gambaran ideal mereka tentang kota yang mereka inginkan, paling tidak di komunitas mereka.

4. Hubungan Antara Negara dan Pasar Mengatur Kota

Bagi pendekatan ekonomi klasik, seperti telah dibahas di atas, pasar dibiarkan mengatur dirinya sendiri melalui hukum permintaan dan penawaran. Negara tidak dibenarkan ikut melakukan campurtangan terhadap jalannya suatu pasar. Kalaupun ada gejolak pasar, tidak perlu ada campurtangan negara sebab pasar memiliki mekanismenya sendiri menetralkan gejolak di dalam dirinya sehingga mencapai titik keseimbangan (ekuilibrium) baru. Negara diharapkan hadir minimal sebagai wasit yang adil dalam menegakkan kedaulatan pasar.

Belajar pada pengalaman negara-negara Eropa barat, ekonomi pasar bebas (*the free market economy*), termasuk perdagangan bebas, dipandang oleh ekonomi klasik sebagai agen yang dapat melakukan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat, membawa ke arah demokrasi, kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Namun beberapa klaim dari tesis populer tersebut tidak dapat diterapkan pada konteks sejarah budaya dan sosial yang lain, misalnya negara-negara Asia Tenggara. Oleh sebab itu Evers (1994 : 238-239) mengingatkan:

Tesis populer ini, bagaimanapun, bertolak belakang dengan pandangan, yang menyatakan bahwa perdagangan secara potensial berbahaya dan merusak setiap masyarakat jika ia tidak diawasi oleh otoritas politik yang kuat. Banyak contoh yang mendukung hal ini. Solidaritas dan jaminan sosial dari masyarakat suku dan petani sering dirusak oleh masuknya ekonomi perdagangan hasil bumi dan menciptakan kesengsaraan dan disintegrasi dalam masyarakat. Impor yang tidak terbatas terhadap barang-barang mematikan industri skala menengah dan kerajinan lokal, dan industrialisasi yang berorientasi ekspor akan menciptakan polusi dan kerusakan terhadap lingkungan.

Dalam kenyataannya, kehidupan kota, termasuk ekonomi kota, seperti telah didiskusikan

sebelumnya, tidak hanya diatur oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh pengaturan negara. Pengaturan dapat bermakna intervensi, bila ia dipandang dari sudut pasar. Dari sudut pandang negara, intervensi dilakukan atas nama regulasi. Kadang-kadang "de-regulasi" digunakan untuk menjelaskan perubahan atau penyesuaian dalam pengaturan negara terhadap pasar.

Telah terjadi diskusi mendalam dan panjang di antara para ekonom, apakah negara, dalam hal ini pemerintah harus melakukan intervensi dalam memungsikan pasar atau tidak. Jika ia harus, kemudian, di bawah kondisi bagaimana, untuk tujuan apa, dan seberapa luas ? Intervensi negara dapat menghasilkan suatu distorsi atau suatu koreksi dalam berfungsinya mekanisme pasar. Hasil tersebut tergantung pada sifat pasar dan jenis dan derajat dari intervensi yang dilakukan. Pemerintah tertentu suka melakukan intervensi pada pasar dengan berbagai cara dan dengan beragam alasan. Sementara yang lain, khususnya negara industri maju (kecuali Jepang), menghindari intervensi seminimal mungkin.

Konsep intervensi minimal pun juga bersifat relatif. Interpretasi terhadap intervensi minimal negara terhadap pasar tergantung rezim yang berkuasa dalam pemerintahan pada suatu negara. Amerika Serikat yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara kampiun demokrasi dan ekonomi pasar, ternyata juga menggunakan instrumen intervensi dalam menggerakkan ekonomi mereka, tidak membiarkan pasar menyembuhkan dirinya sendiri, seperti selama ini mereka perjuangkan dalam berbagai kesempatan. Ketika krisis kredit perumahan pada masa akhir jabatan kedua presiden George W. Bush dan masa awal jabatan presiden Barack Obama, kedua presiden memiliki pola intervensi yang berbeda terhadap pasar. Barack Obama cenderung membuat rambu-rambu terhadap pasar, sehingga pasar, terutama pasar uang, tidak sebebas masa sebelumnya

Perlu juga dicatat bahwa terdapat aspek lain dari intervensi negara yang sering diabaikan oleh ekonom neo-klasik, yaitu negara dapat melakukan intervensi secara efektif tidak terhadap pasar. Ini disebabkan karena, satu, pasar melekat dalam masyarakat, dalam struktur sosialnya. Kedua, suatu intervensi dalam pasar mungkin lebih efektif bila ia dibarengi dengan penyesuaian yang diperlukan dalam masyarakat. Seseorang tidak perlu berprasangka negatif terhadap intervensi ini. Sebagai ilustrasi yang baik mungkin bisa dilihat kasus Singapura yang berhasil melakukan perencanaan dan penerapan strategi makro ekonomi bagi pasar internal dan eksternal. Atau Jerman dengan ekonomi pasar sosialnya (*Soziale Marktwirtschaft*) yang

mengkombinasikan secara harmonis antara ekonomi pasar dan tugas negara sebagai wasit dalam persaingan dan sebagai penjaga kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat.

Apakah pasar juga mempengaruhi negara? Salah satu instrumen untuk melihat bagaimana pasar mempengaruhi negara adalah berita media massa tentang bagaimana pandangan pasar tentang partai politik peserta pemilu dan calon presiden dan wakil presiden peserta pilpres, dilihat melalui pandangan para pebisnis. Pandangan pasar direduksi melalui para pemilik dan/atau pengelola kapital (kapitalis) sehingga antara pandangan pasar dengan pandangan pemilik/pengelola kapital tidak bisa dibedakan. Konsekuensi logisnya adalah pandangan para pemilik/pengelola modal, yang memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu rezim pemerintahan (penguasa), menyuarakan kepentingan pribadi mereka. Jika pasar memiliki pandangan positif terhadap partai politik atau pasangan capres tertentu maka berarti pasar melihat bahwa partai politik atau pasangan capres tersebut dianggap dapat menyalurkan kepentingan pribadi mereka. Sebaliknya jika pasar dikatakan mempunyai pandangan negatif terhadap partai politik atau pasangan capres tertentu maka berarti kepentingan pribadi mereka dilihat tidak terakomodasikan jika partai politik atau pasangan capres tersebut berkuasa, oleh sebab itu mereka menolak melalui corong media massa. Dalam tataran ini, sebenarnya, pasar tidaklah netral dalam relasinya dengan kekuasaan dan politik.

Pengaruh pasar terhadap negara juga dapat dilihat melalui bagaimana kegagalan pasar bisa menyebabkan tumbangny suatu pemerintahan dari suatu negara. Ketika pemerintahan Indonesia di bawah rezim Suharto tidak mampu mengelola hutang sehingga menyebabkan krisis finansial, keuangan dan perbankan pada tahun 1997, krisis tersebut akhirnya memberi dampak pada munculnya krisis politik, sosial dan budaya yang bermuara pada tumbangny pemerintahan rezim Orde Baru.

Sejauh ini, kita telah mendiskusikan bagaimana hubungan negara dan pasar bersifat pengaruh-mempengaruhi, di mana negara mempengaruhi pasar dan sebaliknya bagaimana negara dipengaruhi oleh pasar. Apakah ada hubungan antara negara dan pasar selain bersifat pengaruh-mempengaruhi? Ternyata terhadap hubungan kolaboratif antara negara dan pasar. Studi mengenai hal tersebut telah dilakukan oleh para ilmuwan sosiologi dan politik tentang elit. Salah satunya adalah studi elit yang dilakukan oleh C. Wright Mills. Dalam bukunya *The Power Elite*, Mills (1956) menjelaskan bahwa para pemimpin bisnis raksasa, pemimpin politik, dan pemimpin

militer di Amerika merupakan elit kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan nasional Amerika secara keseluruhan, yang dampaknya pada tatanan kehidupan (ekonomi, sosial dan politik) global. Ketiga elit (ekonomi, politik, dan militer) elit saling memperhatikan kepentingan dan kebijaksanaan yang mereka miliki bahkan mereka secara aktif saling bekerjasama dalam menentukan kebijakan nasional. Mills (1956: 7) menerangkannya berikut ini:

Karena masing-masing bidang ini menjadi besar dan tersentralisasi, konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya menjadi lebih besar dan erus hubungan satu sama lain menjadi semakin tinggi. Keputusan beberapa gelintir perusahaan berhubungan dengan perkembangan militer dan politik serta ekonomi di seluruh dunia. Keputusan lembaga militer sangat mempengaruhi kehidupan politik dan derajat kegiatan ekonomi. Keputusan yang dibuat dalam bidang politik menentukan kegiatan menentukan kegiatan ekonomi dan program-program militer.

Jadi, apa yang dikemukakan oleh Mills tersebut meruntuhkan asumsi hubungan antara pasar dan negara yang memberikan kepada pasar suatu derajat kebebasan dan tidak ada intervensi negara terhadap pasar.

Bagaimana pula elit kekuasaan di Indonesia? Apakah ada hubungan antar elit seperti yang terjadi di Amerika? Ada kecenderungan para pemimpin bisnis besar, pemimpin militer dan pemimpin politik di Indonesia saling berkomunikasi satu sama lain dengan derajat tertentu untuk menentukan suatu kebijakan yang saling menguntungkan di antara sesama mereka. Dalam konstelasi sosial politik ekonomi Indonesia, terjadinya KKN antara partai politik, pejabat pemerintah, dan pebisnis dalam membuat suatu kebijakan berupa undang-undang, keputusan pemerintah, keputusan menteri, atau kebijakan lainnya merupakan indikator dari kecenderungan yang disebutkan di atas. Selain itu, studi tentang hal ini misalnya telah dilakukan oleh Ulf Sundhaussen (1988) dan Yahya A. Muhaimin (1990) memperlihatkan kecenderungan tersebut.

Bagaimana pula dengan realitas perkotaan di Indonesia? Pejabat pemerintah dan anggota dewan, sebagai pembuat regulasi kota melalui peraturan daerah, peraturan dan surat keputusan walikota, tidak jarang berkolusi dalam membuat suatu kebijakan. Kasus reklamasi pantai Jakarta yang melibatkan pengemban properti terkemuka nasional tertangkap tangan oleh KPK menyogok anggota Dewan Perwakilan Daerah Jakarta untuk rancangan peraturan daerah tentang

reklamasi pantai Jakarta adalah contoh dari bagaimana justru pasar memerlukan intervensi negara untuk meluluskan kepentingan pebisnis mereka. Menariknya, justru gubernur selaku penguasa pemegang otoritas dan kewenangan di Jakarta sebagai pendukung utama reklamasi pantai dan tidak menghentikan pengerjaan proyek dan penambangan pasir meski pemerintah pusat menghendaki penghentian. Peringatan akan tenggelamnya kota Jakarta oleh berbagai ahli dan aktivis lingkungan tetap tidak merubah pendirian Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Apa yang terjadi di Jakarta, ada kecenderungan, juga terjadi di kota lain di Indonesia. Apakah kebijakan menentukan rencana tata ruang dan wilayah dari suatu kota tidak ada kaitannya dengan kepentingan pasar atau pebisnis? Apakah penentuan izin, retribusi atau pajak oleh pemerintah bersifat transparan? Kadang pebisnis ingin mengikuti aturan yang ada, namun aparatur birokrasi dengan strategi ampuhnya “buat orang tergantung, dan ciptakan ketidakpastian”, sehingga pebisnis terpaksa harus membayar sejumlah uang yang tidak jelas. Memang telah ada program reformasi birokrasi dan pelayanan, namun di beberapa pelayanan strategis di perkotaan seperti izin mendirikan bangunan dan perumahan sering aturannya kabur : berapa lama dan besaran jumlah uang yang harus dibayar tidak jelas, tergantung negosiasi dengan kepala SKPD. Kalaupun ada sanksi terhadap keterlambatan pelayanan hampir tidak ditemukan.

5. Hubungan Antara Negara dan *Civil Society* Mengatur Kota

Hubungan antara negara dan *civil society*, secara hipotetis teoritis, dikonstruksikan sebagai kekuatan penyeimbang terhadap yang disebut pertama. Oleh sebab itu, *civil society* diharapkan mampu mengatasi negara sehingga ia tidak memiliki kekuasaan mutlak dengan memperjuangkan hak-hak azazi mereka yang meliputi hak kehidupan, kemerdekaan, dan kepemilikan serta memiliki *self-reliance* (percaya diri), *self-supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), taat akan nilai dan norma yang berlaku, dan bebas dari ketergantungan terhadap negara. Karena itu Tocqueville (2005), berdasarkan pengalamannya di Amerika, *civil society* memiliki kekuatan politis yang dapat mengekang atau mengontrol kekuatan intervensionis negara.

Keberadaan *civil society* tidak bisa dilepaskan dari demokrasi dan ruang publik. Usaha

untuk merobohkan demokrasi hampir selalu berhubungan dengan usaha untuk meluluhlantakkan ruang lingkup masyarakat sipil. Selanjutnya, mustahil bila membicarakan demokrasi tanpa mengikutsertakan ruang publik. Pelarangan dalam partisipasi menimbulkan kepincangan bentuk demokrasi. Oleh karenanya, menurut Chandhoke (2007), demokrasi memiliki hubungan dua sisi dengan ruang publik. Tidak ada demokrasi tanpa ruang publik, namun secara bersamaan, tidak akan ada demokrasi apabila ruang publik tersebut tidak luas dan representatif.

Kejatuhan rezim Sukarno dan rezim Suharto menggambarkan bagaimana kekuatan gerakan sosial yang dimiliki oleh *civil society* mampu mengontrol bahkan menjatuhkan suatu rezim penguasa di Indonesia. Gerakan sosial yang dilakukan oleh *civil society* untuk menumbangkan rezim Orde Lama ternyata belum mampu meletakkan fondasi demokrasi dalam negara. *Civil society* yang telah bersemi dalam masa awal, ternyata masa selanjutnya layu sebelum berkembang. Negara mampu mengkooptasi dan menghegemonik eksponen dalam *civil society* ke dalam rentang kendali kekuasaannya. Pada masa Orde Baru berkembang berbagai asosiasi profesi, seperti Ikatan Sosiologi Indonesia, dan organisasi yang dikenal dengan LSM plat merah seperti Karang Taruna. Asosiasi dan organisasi tersebut bergantung pada bantuan finansial dan akomodasi dari negara, sehingga mereka bisa disetir sesuai dengan keinginan pemerintah atau menyetir diri sesuai dengan keinginan penguasa.

Tidak berbeda gerakan sosial penumbangan rezim Orde Lama, gerakan sosial penumbangan rezim Orde Baru juga digerakkan oleh *civil society* yang berasal dari berbagai asosiasi dan organisasi di mana eksponen mahasiswa sebagai motornya. Namun hasilnya relatif berbeda di mana terjadinya amandemen terhadap konstitusi sehingga demokrasi dan partisipasi publik lebih terbuka dibandingkan dengan era sebelumnya. Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung merupakan warna yang baru dalam sistem pemerintahan. Warna tersebut lebih demokratis dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Dari fenomena hubungan antara negara dan *civil society* yang terjadi di Indonesia tersebut di atas, ternyata hubungan tersebut juga dapat mengambil bentuk lain, yaitu hubungan yang kooptatif dan hegemonik. Negara melalui kekuatan intervensionisnya memiliki kemampuan menciptakan hubungan kooptatif dan hegemonik terhadap *civil society*. Intervensi negara dipahami sebagai hal yang lumrah ketika negara mempunyai hak semauanya untuk mendistribusikan sumberdaya finansial dan akomodasi kepada asosiasi dan organisasi yang ada.

Hak semaunya dipahami sebagai suatu kemampuan untuk membuat kebijakan tanpa ada pertanggungjawaban publik dan pengontrolan dari pihak lain. Hak semaunya perlahan dihapus melalui perubahan konstitusi dan aturan perundangan yang diciptakan kemudian yang berkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan sehat.

Bagaimana pula realitasnya di perkotaan? Pada beberapa gerakan sosial berbasis komunitas kecil seperti rukun tetangga dan rukun warga, pada umumnya gerakan sosial dari *civil society* beririsan dengan program pemerintah kota. Akibatnya tidak jarang gerakan sosial ini dikooptasi oleh pemegang kekuasaan kota, sehingga terjadi simbiosis mutualisma kepentingan.

Konflik antara negara dan *civil society* terjadi biasanya bila kepentingan hidup warga terancam seperti penggusuran pasar atau perumahan maka warga melakukan gerakan sosial yang dibantu oleh aktivis gerakan sosial yang lebih professional berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Konflik antara negara dan *civil society* akan lama dan intens bilamana konfliknya menyangkut hajat hidup orang banyak atau terkait dengan isu sensitif seperti pembubaran KPK.

Bilamana suatu komunitas kota belum tumbuh *civil society*, negara bisa menggerakkan warga melalui pemberian ruang bagi partisipasi warga dalam pembangunan kota. Sebelum kita terlampau jauh dengan topik ini, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan partisipasi? Dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik, Damsar (2010) menelusuri secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “*part*” yang berarti bagian. Jika kata “*part*” dikembangkan menjadi kata kerja maka kata ini menjadi “*to participate*”, yang bermakna turut ambil bagian.

Kalau dipahami melalui pendekatan emik, lanjut Damsar (2010), partisipasi bisa dimengerti dalam kerangka berpikir orang Minangkabau sebagai *sato sakaki* (serta sekaki). Artinya ikut ambil bagian dalam suatu aktivitas publik walau sekeadarnya, katakanlah sekaki. Bagi orang Minangkabau, *sato sakaki* merupakan bentuk atau perwujudan suatu kesukarelaan untuk melakukan sesuatu, khususnya sesuatu yang berhubungan dengan ruang publik atau kehidupan publik. Keikutsertaan yang disertai dengan kesukarelaan melakukan sesuatu secara sadar, pada instinya menurut cara berpikir orang Minangkabau, merupakan suatu refleksi dari keberadaannya dalam suatu komunitas. Dia ada karena *sato sakaki*. Dalam konteks budaya

Minangkabau, keberadaan seseorang dalam komunitas tidak selalu dikaitkan dengan keberadaan fisik orang tersebut dalam suatu komunitas. Orang yang berada di luar komunitas, karena memang berada di rantau (di luar kampung halaman sebagai perantau), bisa saja dirasakan selalu kehadirannya di tengah komunitas karena dia selalu *sato sakaki* dalam setiap aktivitas publik seperti mengirimkan uang untuk pembangunan mesjid, perbaikan jalan kampung, rehabilitasi kantor wali nagari, atau untuk merayakan peringatan hari besar keagamaan dan nasional.

Partisipasi juga dimengerti sebagai berperan-serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang memiliki dimensi politik maupun non politik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga. Dalam berbagai kegiatan pemilihan umum (legislatif, presiden, kepala daerah, dan kepala desa) di Indonesia, warga merancang tempat dan lokasi pemilihan sedemikian rupa supaya warga tertarik datang ke tempat pemungutan suara. Kegiatan-kegiatan seperti ini dimengerti sebagai partisipasi.

Pada umumnya kota di Indonesia, negara tidak memberikan ruang bagi warganya untuk berpartisipasi. Kalaupun ada terbatas, itupun dipaksa, oleh aturan perundangan. Dalam pembangunan kota dikenal ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang mengisyaratkan adanya keterlibatan warga kota. Terkesan musrenbang yang dilakukan selama ini sebagai stempel bagi terlaksananya pembangunan kota secara partisipatif. Tidak jarang apa yang diusulkan warga kota berbeda dengan keputusan program yang disahkan. Kita tidak pernah mendengar suatu pemerintahan kota di Indonesia melakukan dengar pendapat dan dengar kepentingan warga dalam memindahkan jalur transportasi umum dari suatu jalan ke jalan lain, misalnya. Hal ini dipandang bukan urusan warga, cukup pejabat pemerintah beserta aparaturnya saja menyelesaikan persoalan remeh-temeh kebijakan.

Kalau di negara demokrasi seperti Jerman, misalnya, pemerintah kota secara otomatis meminta pandangan dan kepentingan warga kota yang berada sekitar jalur kendaraan yang akan dirobohkan dan dalam posisi yang belum dirobohkan. Musyawarah bisa mengambil waktu yang sangat lama dan berkali-kali tergantung dari argumentasi dari warga yang berkembang. Kalau hal remeh temeh saja diminta partisipasi warga dalam memutuskan suatu kebijakan, apalagi hal yang berat, tentu warga terlibat memutuskannya.

Keterlibatan warga dalam pembangunan baik secara prosedural maupun substansial membuat warga memiliki *sense of belonging* dan *sense of space* terhadap kotanya. Ini menghindari kota sebagai sesuatu yang bersifat alienasi dan kejam terhadap warganya.

6. Hubungan Antara Pasar dan *Civil Society* Mengatur Kota

Dalam pandangan Karl Marx, *civil society* merupakan produk dunia modern di mana kapitalisme telah menciptakan dunia yang subyek individualistik atomistik terikat dengan yang lain dalam ketergantungan. Dalam sudut pandang ini, pasar dipandang sebagai sisi pembangunan masyarakat sipil, sekaligus sebagai instrumen kekerasan dan pemaksaan.

Hubungan antara pasar dan *civil society* bisa bersifat saling mempengaruhi. Pasar dan *civil society*, dalam perspektif liberal, memiliki karakteristik yang sama, yaitu otonom, bebas dan mandiri. Oleh karena itu, hubungan antara *civil society* dan pasar saling menguatkan dan saling meneguhkan satu sama lain terhadap keberadaan mereka masing-masing. Namun ketika pasar dipandang terlalu serakah dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan umat manusia, *civil society* dapat bersifat oposisi terhadap pasar. Gerakan lingkungan hidup seperti *Green Peace*, misalnya, selalu berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang dipandang sebagai perusak lingkungan hidup. Ketika perusahaan minyak Shell dipandang merusak lingkungan hidup dalam mengeksplorasi minyak maka *Green Peace* melakukan aksi damai sampai kekerasan terhadap pengabaian lingkungan hidup oleh Shell.

Hubungan antara *civil society* dan pasar bisa juga dilihat dalam perspektif sosiologi ekonomi. Menurut perspektif ini *civil society* memiliki apa yang dinamakan sebagai "*civic moral*". Dalam mekanisme ini, peranan *civil society* sangat aktif. Mekanisme ini sering diabaikan oleh ekonom dan teotisi tentang negara lainnya (Suparb, 1990). Struktur sosial budaya masyarakat memainkan peranan tidak kalah pentingnya dalam pembentukan keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan. Orang dalam bertindak selalu meorientasikan tindakannya terhadap tingkah laku orang lain, melalui makna yang dikonstruksi secara sosial. Orang menginterpretasikan (*verstehen*) adat, kebiasaan, norma, dan kepentingan yang mereka miliki dalam hubungan sosial yang sedang berlangsung. Dalam *The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism*, Weber menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat, tindakan ekonomi adalah

suatu produk personal, etika, dan pertimbangan sosial. Oleh sebab itu, perilaku ekonomi melekat dalam banyak aspek kehidupan sosial : budaya, kepercayaan, dan seterusnya. Dalam studi Scott tentang *The Moral Economy of the Peasant* menunjukkan bahwa terdapat etika tertentu yang harus diperhatikan oleh penguasa dan pengusaha dalam menghadapi petani yang sedang mengalami krisis subsistensi, misalnya. Sedangkan Evers dan kawan-kawan dalam *The Moral Economy of Trade* menemukan bahwa Kapital sosial (*social capital*), seperti menjadi orang saleh, akan menghindari seorang pedagang dari rumor sosial atau pengucilan sosial dari masyarakat.

Pasar dan *civil society* terhubung pada daerah perkotaan bila pasar menyentuh kepentingan dari *civil society*. Persentuhan kepentingan itu bisa terjadi karena pasar merobah suatu kebijakan sehingga suatu kelompok warga perkotaan dirugikan misalnya pemogokan buruh karena kebijakan baru tentang upah atau tunjangan mereka dikurangi atau demonstrasi warga atas limbah pabrik yang merusak sungai sebagai sumber utama air bagi warga.

7. Sinergisitas Tiga Pilar Kekuasaan

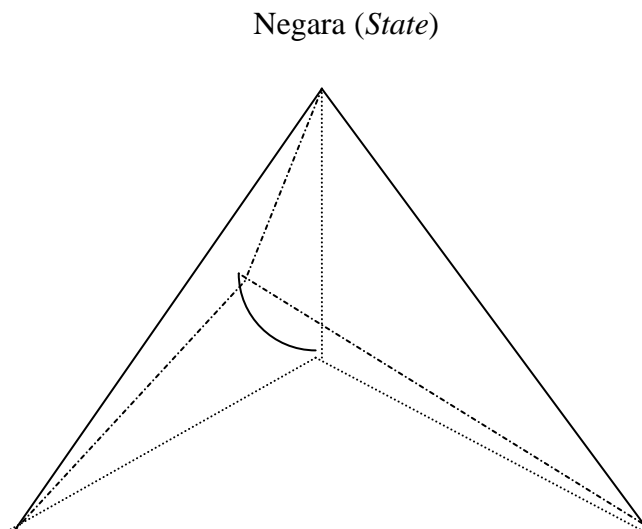
Bagaimanakah sinergisitas hubungan antara negara, pasar, dan *civil society* sehingga kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak azazi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan di perkotaan bisa dicapai secara optimal? Agar kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak azazi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan di perkotaan bisa dicapai secara optimal, maka prinsip sinergisitas yang dibangun adalah setiap pilar memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian semua tujuan kemanusiaan di atas, baik sebagai individual maupun sebagai kolektivitas. Kontribusi optimal suatu pilar kekuasaan tidak menghambat pilar lain untuk menyumbangkan secara optimal apa yang seharusnya ia bisa berikan. Oleh karena itu, setiap pilar kekuasaan tidak boleh memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas. Sebab bila ada suatu pilar kekuasaan yang memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas, maka ia akan menutup pilar yang lain untuk mencapai nilai optimum dari suatu pencapaian.

Selanjutnya, setiap pilar harus memiliki kesadaran bahwa aktor yang berada di dalamnya, disamping sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial (kolektivitas), memiliki

kemampuan untuk merealisasikan pencapaian optimal, atau sebaliknya menemukan titik nadir dari kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak azazi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan. Kesadaran tersebut akan menemukan titik ekuilibrium antara kesadaran individual dan kesadaran kolektivitas dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak azazi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal.

Apakah pencapaian kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak azazi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal oleh sinergisitas negara, pasar, dan *civil society* mengikuti jalan yang seragam atau berbeda-beda? Konteks ruang dan waktu dari sinergisitas antara negara, pasar, dan *civil society* berbeda-beda, oleh sebab itu jalan yang ditempuh juga berbeda. Namun dalam menempuh suatu perjalanan, sejali lagi, perlu ada kesadaran dari ketiga pilar, yaitu negara, pasar, dan *civil society* untuk bersinergi dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak azazi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal.

Figur 3. Segitiga Sinergi Peran antara Negara, Pasar dan *Civil Society* Serta Arah Perubahannya dalam Kehidupan Umat Manusia



Perjalanan yang ditempuh oleh Jerman, misalnya, dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak azazi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal dilandasi prinsip sinergisitas, seperti yang dikemukakan di atas. Mekanisme pasar sangat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi, namun juga terdapat mekanisme sosial budaya (*civil society*) dan intervensi negara dalam kadar tertentu yang relatif rendah. Kembali pada ilustrasi masyarakat Jerman, ekonomi secara dominan dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Namun negara bertindak sebagai "wasit yang adil" ketika terjadi monopoli atau terjadi eksploitasi terhadap buruh oleh pengusaha. Pemerintah Jerman berperan aktif sebagai penengah antara serikat buruh yang menghendaki peningkatan kesejahteraan dan pengusaha yang ingin mempertahankan atau menaikkan keuntungan perusahaan. Jadi, melalui ekonomi pasar sosialnya (*Soziale Marktwirtschaft*), Jerman mengombinasikan secara harmonis antara ekonomi pasar dan tugas negara sebagai wasit dalam persaingan dan sebagai penjaga kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat. Di samping itu peran *civil society* juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Jerman.

Sinergisitas antara negara, pasar dan *civil society* dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak azazi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal melalui Jalan Ketiga (*The Third Way*) dengan karakteristik pilar kekuasaan sebagai berikut:

a. Negara

Negara memiliki ciri sebagai berikut : negara demokratis baru (negara tanpa musuh), devolusi, demokratisasi berlapis (lokal, nasional, dan kosmopolitan), devolusi kekuasaan, pembaruan ruang publik yang transparan, administrasi yang efisien, mekanisme demokrasi langsung, dan pemerintah sebagai pengelola risiko dan hakim yang adil dalam menentukan ruang

ekonomi bagi pelaku pasar yang berlapis di perkotaan.

b. Pasar

Pasar yang menempuh jalan ketiga memperlihatkan orientasi pada ekonomi campuran baru (*new mixed economy*), yaitu suatu sistem ekonomi yang berbasis kemitraan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan *civil society*. Antara sesama pelaku pasar tidak saling mematikan. Harus ada ruang ekonomi bagi si lemah.

c. *Civil Society*

Pengembangan *civil society* yang aktif merupakan bagian yang mendasar dari politik jalan ketiga, yang memiliki ciri antara lain: kemitraan dengan pemerintah, pembaruan komunitas dengan meningkatkan prakarsa lokal, keterlibatan sektor ketiga, perlindungan ruang publik lokal, pencegahan kejahatan berbasis lokal, dan keluarga demokratis.

Nama perjalanan yang ditempuh dalam sinergisitas antara negara, pasar, dan *civil society* tidak begitu penting. Apakah ia dinamakan jalan ketiga, ekonomi pasar sosial baru, (*Neue Soziale Marktwirtschaft*), ekonomi Islam, atau ekonomi syariah tidaklah perlu diperdebatkan, yang terpenting adalah bagaimana adanya kesadaran negara, pasar dan *civil society* di perkotaan dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak azazi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal melalui sinergisitas atau kemitraan.

BAB 5

DINAMIKA PERKOTAAN

A. URBANISASI

1. Definisi Urbanisasi

Secara sederhana urbanisasi dipahami sebagai proses sesuatu menjadi atau bersama perkotaan melalui pertumbuhan populasi, pengaruh atau perkembangan infrastruktur ekonomi dan superstruktur sosial budaya dan politik. Melalui definisi ini maka urbanisasi meliputi:

- a. Proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Proses perpindahan ini dapat mengambil 2 bentuk: *satu*, adanya migrasi penduduk desa ke kota. *Dua*, adanya mobilitas penduduk desa ke kota. Perbedaan antara migrasi dan mobilitas adalah yang disebut pertama perpindahannya bersifat menetap dan permanen; sedangkan yang disebut kedua perpindahannya bersifat tidak menetap dan sementara.
- b. Proses perkembangan infrastruktur ekonomi dan superstruktur sosial budaya dan politik desa menjadi lebih heterogen dan kompleks sehingga komunitas tidak lagi menunjukkan ciri desanya.
- c. Proses pertumbuhan penduduk perdesaan melalui penambahan kelahiran penduduk yang diikuti perkembangan infrastruktur ekonomi dan pembagian kerja, sehingga komunitas memiliki ciri perkotaan.
- d. Proses pengaruh infrastruktur ekonomi dan superstruktur sosial budaya dan politik perkotaan terhadap desa melalui persentuhan perkembangan lokalitas kota – desa dan para migran yang kembali sementara atau selamanya ke desa.

2. Faktor Penyebab Urbanisasi

Penjelasan klasik tentang penyebab terjadinya urbanisasi dikelompokkan dalam 2 sebab, yaitu daya tarik kota (*pull factors*) dan daya dorong desa (*push factors*). Berikut disajikan faktor-faktor terkait daya tarik kota dan daya dorong desa.

a. Daya tarik kota

Faktor-faktor terkait dengan daya tarik kota meliputi:

i. Ketersediaan lembaga pendidikan.

Kota menyediakan pilihan lembaga pendidikan yang lengkap dan beragam, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas serta, baik dari jenis maupun dari sisi jenjang pendidikannya. Kota menyediakan beragam lembaga pendidikan: mulai dari yang murah sampai yang sangat mahal, mulai pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Kota menawarkan tidak hanya pendidikan formal baik akademik maupun vokasi, tetapi juga pendidikan non formal dan *life skills*. Salah satu sebab orang migrasi ke kota adalah karena alasan pendidikan.

ii. Ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kota menawarkan banyak pilihan lapangan pekerjaan: mulai dari pekerjaan mandiri sampai pekerjaan upahan/gajian, mulai dari pekerjaan sektor formal sampai pekerjaan sektor informal, mulai dari legal sampai pekerjaan illegal, mulai dari “orang sekolahan” sampai pekerjaan “orang tidak makan sekolahan”, mulai dari pekerjaan kantoran sampai pekerjaan lapangan, mulai pekerjaan asisten rumah tangga sampai pekerjaan asisten pejabat tinggi negara, mulai pekerjaan kasar sampai pekerjaan halus. Hampir semua jenis pekerjaan terdapat di kota. Bagi orang desa yang berpengalaman merantau ke kota terkonstruksi suatu gagasan tentang hidup di kota: “orang tidak akan mati kelaparan jika mau melakukan pekerjaan apa saja”. Melakukan pekerjaan apa saja bisa dipahami multi interpretasi: banyak pekerjaan halal yang dapat dilakukan sehingga tidak lapar, banyak pekerjaan (halal atau haram) yang penting tidak lapar. Ini menjadi daya tarik orang merantau ke kota.

iii. Ketersediaan sarana dan prasarana kehidupan.

Kota menyajikan sarana dan prasarana kehidupan yang lebih lengkap dan beragam. Kota menyediakan berbagai jenis pasar: mulai dari pasar tradisional sampai pasar modern, mulai dari pasar formal sampai pasar informal, mulai dari pasar loak sampai pasar mewah, mulai dari swalayan sampai warung. Kota menawarkan berbagai fasilitas rekreasi, olahraga, dan wisata: mulai dari “odong-odong” sampai *roller coaster*, dari bioskop sampai theater, mulai dari panti pijat sampai spa, dari penginapan melati sampai hotel berbintang, mulai wisata kuliner sampai

wisata belanja, dari kebun binatang sampai taman kota, mulai lapangan bola sampai meja biliar istimewa. Kota juga memberikan banyak pilihan rumah ibadah maupun tempat maksiat (pelacuran, judi, dan lain-lain). Kota menyediakan banyak fasilitas kesehatan: mulai dari praktek dokter umum sampai dokter spesialis dan sub spesialis, dari balai pengobatan sampai rumah sakit khusus, dari berbagai jenis dukun dan orang pintar sampai tim dokter dari suatu rumah sakit. Hal ini menyebabkan orang mau datang ke kota.

iv. Ketersediaan ruang berekspresi.

Kota memberikan ruang berekspresi yang lebih luas dan beragam. Kota lebih permisif kepada dan tidak membatasi warganya untuk berekspresi dalam berbagai hal : beragama, berpolitik, berbusana, berpendapat, dan berperilaku. Kota memberikan ruang privasi yang lebih luas kepada warganya dan menyediakan ruang publik yang beragam untuk warganya.

v. Ketersediaan ruang untuk bermimpi dan mewujudkannya.

Kota memberikan banyak ruang untuk bermimpi dan merealisasikannya: menjadi bintang dengan pentasnya, menjadi rohaniawan dengan altarnya, menjadi ilmuwan dengan kampusnya, menjadi pedagang dengan pasarnya, menjadi politisi dengan partainya. Semua itu ada di kota.

b. Daya dorong desa

Adapun faktor-faktor yang menjadi daya dorong desa sehingga orang desa merantau ke kota (urbanisasi) adalah sebagai berikut:

i. Kelangkaan lapangan pekerjaan.

Desa memberikan warganya kesempatan yang terbatas bagi warganya. Kesempatan yang terbatas tersebut pada umumnya terkait pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian, termasuk

perikanan. Seperti diketahui pertumbuhan penduduk semakin tinggi, termasuk di wilayah perdesaan, sementara luas lahan pertanian tidak bertambah, malahan sebaliknya semakin berkurang karena digerogeti pembangunan perumahan. Konsekuensi logisnya adalah orang melakukan mobilitas atau migrasi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan agar mereka bisa bertahan hidup (survival).

ii. Keterbatasan lembaga pendidikan.

Desa menyediakan lembaga pendidikan paling tinggi sampai pada tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Sedangkan lembaga pendidikan lainnya seperti pendidikan tinggi, pendidikan non formal dan *life skills* pada umumnya tidak tersedia di desa. Oleh karena itu, orang desa pindah ke kota agar bisa mendapatkan pendidikan seperti yang mereka inginkan.

iii. Ketidaktersediaan ruang berekspresi.

Desa hampir tidak memberikan celah, apalagi ruang, untuk berbeda dengan komunitas. Komunitas akan memberikan sanksi sosial kepada siapa saja yang berpendapat dan berperilaku “aneh” dan berbeda dengan komunitas. Ekspresi pribadi diredam oleh ekspresi komunitas melalui legitimasi adat, agama, dan moral perdesaan. Realitas seperti ini menghambat mereka yang memiliki perbedaan dengan komunitas dalam berkespresi. Keadaan ini mendorong orang untuk meninggalkan desa.

iv. Keterbatasan sarana dan prasarana kehidupan.

Desa menyediakan rumah ibadah secara terbatas, pasar mingguan kalau ada, dan lingkungan hidup alamiah. Bagi mereka yang memiliki kebutuhan yang lebih banyak seperti kebutuhan rekreasi dan wisata serta kegiatan pengisian waktu luang (*leisure*) dari apa yang disediakan oleh desa maka jalan pemenuhannya adalah meninggal desa menuju kota.

iv. Keterbatasan ruang bermimpi dan merealisasikannya.

Kisah sukses para perantau di kota melalui berbagai macam ruang aktivitas yang ditransmisikan kepada warga desa melalui kepulangan para perantau pada waktu lebaran, misalnya, tidak bisa dibawa menjadi mimpi oleh warga desa jika mereka masih tetap di desa. Karena mimpi hanya sekedar impian yang tidak terwujud sehingga bisa mengalami gangguan kejiwaan bila tidak ada saluran untuk merealisasikannya. Oleh sebab itu mimpi yang ditransmisikan oleh kisah sukses para perantau tersebut bisa terwujud oleh para pemimpi apabila mereka meninggalkan desa menuju kota dan beraktivitas merealisasikannya di kota.

v. Terbuang secara adat.

Komunitas desa memiliki solidaritas mekanik yang kuat untuk menjaga komunitas dari penyimpangan terhadap adat, kebiasaan dan konvensi yang dimiliki komunitas. Kesadaran kolektif seperti ini menciptakan mekanisme penghukuman dan kontrol sosial yang memberikan komunitas suatu kekuatan untuk memberi sanksi berupa membuang secara adat orang yang menyimpang. Konsekuensinya adalah orang yang terbuang secara adat tersebut wajib meninggalkan desa. Kemana tujuannya? Biasanya kota!

3. Dampak Urbanisasi

Dampak urbanisasi tidak hanya pada kota yang dituju tetapi juga pada desa yang ditinggalkan. Di samping itu dampak urbanisasi tidak hanya berdimensi positif tetapi juga ada yang berdimensi negatif.

a. Dampak positif bagi kota

Urbanisasi telah memberikan dampak yang positif pada kota. Adapun dampak positif urbanisasi terhadap kota antara lain:

i. Kebutuhan tenaga kerja perkotaan terpenuhi.

Kehadiran orang desa memberikan cadangan tenaga kerja bagi kebutuhan kegiatan ekonomi kota, termasuk sektor informal. Semakin banyak penawaran tenaga kerja di perkotaan, sementara jumlah pekerjaan sektor formal tetap, maka semakin rendah upah yang diterima oleh pekerja dan semakin mudah menerapkan pola *out sourcing* atau kontrak lepas dalam sistem tenagakerjaan perusahaan.

ii. Peningkatan dinamika ekonomi.

Pertumbuhan penduduk perkotaan melalui urbanisasi menyebabkan munculnya berbagai permintaan barang dan jasa. Permintaan tersebut menggerakkan roda ekonomi melalui produksi dan penawaran barang dan jasa yang dibutuhkan. Bila barang dan jasa yang dibutuhkan berbagai lapisan penduduk kota tidak mampu disediakan oleh sektor formal, maka sektor informal akan menawarkannya. Sektor informal, seperti akan didiskusikan lebih dalam pada bab berikutnya, berkembang melalui aktivitas ekonomi orang desa yang migrasi ke kota. Dengan demikian, terdapat pilihan penawaran jenis dan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh warga kota, yang berbeda antara sektor formal dan sektor informal.

iii. Pertumbuhan permukiman baru.

Orang desa yang berhasil di perkotaan memerlukan tempat tinggal sendiri, sehingga kota mengembangkan pemukiman baru bagi orang yang sukses tersebut. Pertumbuhan pemukiman baru bisa berarti pertumbuhan kota secara ruang dan fisik.

b. Dampak negatif bagi kota

Urbanisasi juga memberikan dampak negatif terhadap kota. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan oleh urbanisasi:

i. Peningkatan pengangguran di perkotaan.

Kehadiran orang desa di kota menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Hal ini dikarenakan jumlah pekerjaan formal tidak sebanding dengan jumlah besar orang mencari pekerjaan. Konsekuensinya adalah bertambah panjangnya jumlah pengangguran absolut dan semu.

ii. Tumbuhnya permukiman kumuh.

Apa yang dilakukan orang desa pada umumnya sebelum merantau ke kota? Memastikan adanya tempat tinggal! Oleh sebabnya mengapa kebanyakan orang desa merantau ke kota yang baru pertama kali dikunjunginya adalah merantau bersama kerabat, kenalan, teman, atau orang dipercayainya yang telah atau pernah tinggal di sana sebelumnya. Apabila orang desa tersebut merasa sudah cukup mandiri, maka pertama kali adalah mencari rumah atau kamar kontrakan yang berlokasi dekat dengan tempat dia beraktivitas, biasanya berada pada kemukiman kumuh.

Tidak jarang orang desa yang telah lama merantau dan memahami situasi kota namun dia tidak berhasil dalam kegiatan ekonominya, mencoba membangun tempat tinggal secara informal maupun illegal pada tanah yang tidak digarap atau dikelola pemiliknya. Bangunan yang dibuat biasanya berupa gubuk, sekedar untuk bisa berteduh. Gubuk tersebut jauh dari standar pemukiman sehat dan layak huni.

iii. Munculnya lingkungan tidak sehat.

Apabila daya dukung kota terhadap urbanisasi tidak dikelola dengan baik, maka dampak yang ditimbulkan dari kedadatmampuan tersebut adalah rusaknya lingkungan hidup. Penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk pedagang kaki lima, pemakaian bahu sungai untuk pemukiman, dan membuang sampah sembarangan merupakan contoh dari lingkungan tidak sehat dari urbanisasi.

iv. Munculnya kerawanan sosial dan kriminalitas.

Dampak negatif berikutnya dari urbanisasi adalah tumbuh kembangnya kriminalitas dan prostitusi dalam masyarakat perkotaan. Ketidakmampuan meraih pekerjaan legal dan halal dalam

persaingan bebas tenaga kerja di perkotaan adalah para migran menerobos masuk ke dalam aktivitas ekonomi yang tidak dibolehkan oleh hukum, adat dan agama seperti penipuan, pemalakan, maling, copet, rampok, prostitusi, dan dagang barang terlarang seperti narkoba.

c. Dampak positif bagi desa

Bagi desa perpindahan (migrasi atau mobilitas) warganya ke kota memiliki dampak positif. Berikut beberapa dampak positif yang ditimbulkan urbanisasi bagi desa:

i. Pengurangan jumlah penduduk desa.

Jumlah penduduk yang berkurang bisa dilihat sebagai pisau bermata dua: di satu sisi pengurangan penduduk akan memberi dampak positif bagi desa yang padat penduduknya, tetapi sumber daya alam dan lahan terbatas. Keluarnya sebagian warga dari desa merupakan proses adaptasi bagi terciptanya ekuilibrium baru antara manusia dan alam. Sebaliknya, ia bisa berdampak negatif apabila warga desa yang produktif bekerja di kota sehingga sawah dan ladang terbengkalai karena tidak ada yang mengerjakannya.

ii. Pengurangan intensitas persaingan hidup antar warga desa.

Kepergian sejumlah warga desa ke kota sedikit banyaknya akan mengurangi tingkat persaingan antar warga desa dalam aktivitas ekonomi seperti persaingan dalam mendapatkan pekerjaan sebagai buruh tani dan sebagainya.

iii. Pemasukan dana perantau.

Bagi desa yang memiliki banyak perantainya di kota dan telah meraih sukses di kota, maka hal ini merupakan sumber dana bagi (warga) desa. Pengiriman uang (remiten) dari kota secara teratur menyebabkan (warga) desa bisa hidup layak dengan standar desa. Tidak jarang paguyuban atau perkumpulan para perantau di suatu kota melakukan pengumpulan dana bagi orang termarginalkan seperti anak yatim dan para fakir miskin.

iv. Pemasukan ide dan dana pembangunan desa.

Paguyuban atau perkumpulan para perantau dari suatu daerah tidak jarang memberikan perhatian khusus terhadap kampung halaman mereka. Sehingga keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan tidak jarang didukung oleh ide dan termasuk dana dari Paguyuban atau perkumpulan perantau atau para perantau yang sukses di kota.

d. Dampak negatip bagi desa

Sisi negatip dari urbanisasi juga dialami oleh desa, yaitu antara lain:

i. Eksodus sumberdaya manusia berkualitas.

Para orang muda berkualitas dan produktif meninggalkan desa merantau ke kota menyebabkan sumberdaya manusia berkualitas dan produktif menjadi sesuatu yang langka di desa. Akibatnya desa tidak memiliki orang yang berkualitas dalam mengelola pembangunan sumberdaya desa.

ii. Imitasi perilaku negatip.

Kepulangan sementara para perantau ke desa, misalnya pada waktu lebaran, tidak hanya memberikan sesuatu yang berharga bagi masyarakat desa tetapi juga dapat membawa pengaruh negatip seperti penyebaran narkoba, pornografi atau minuman keras di perdesaan. Karena seolah semua apa yang dibawa oleh perantau dari kota semuanya baik, sehingga para generasi muda calon perantau meniru apa yang dilakukan oleh para senior mereka yang dipandang sukses di kota.

B. URBANISME

1. Definisi Urbanisme

Urbanisme merujuk pada 2 hal, yaitu aspek material dari kehidupan perkotaan dan aspek kultural dari kehidupan kota. Oleh karena itu, urbanisme, di satu sisi, menunjuk pada gerakan desa – kota dari penduduk atau tingkat konsentrasi mereka di daerah perkotaan. Pada sisi lain urbanisme menjelaskan cara khas dari interaksi warga kota.

Kalau dipahami apa yang dimaksud dengan konsep urbanisme seperti yang dikemukakan di atas, maka segala studi yang terkait dengan kota dan perkotaan adalah urbanisme. Oleh sebab itu, urbanisme itu sendiri adalah studi planologi, arsitektur, sosiologi perkotaan, dan lainnya. Jika dibawakan pada perspektif sosiologi, urbanisme adalah sosiologi perkotaan itu sendiri.

Karena urbanisme merupakan kajian dari banyak disiplin ilmu maka urbanisme bisa dibawa ke mana saja sesuai dengan fokus dan pokok kajian suatu bidang ilmu. Urbanisme dalam sudut pandang arsitektur, misalnya adalah persoalan arsitektur dan desain perkotaan sebagai seni ruang, visi, penasehat komunitas, dan lain sebagainya. Dalam sisi ini muncul pula *green urbanism* (urbanisme hijau), *ecological urbanism* (urbanisme ekologis), dan *sustainable urbanism* (urbanisme berkelanjutan). Bahkan lebih jauh lagi perspektif ini mengembangkan 10 prinsip urbanisme meliputi : *satu, walkability* yaitu prinsip semua ruang kota, terutama antara tempat tinggal dan tempat kerja bisa ditempuh dengan berjalan kaki, serta memiliki tempat pejalan kaki (pedestrian) yang bebas dari kendaraan bermotor, ramah dan manusiawi; *dua, connectivity* yaitu semua jalan utama, boulevard, dan jalan kecil tersambung antar satu dengan lainnya dengan tersedianya jalan bagi pejalan kaki yang nyaman; *tiga, mixed-use & diversity* yaitu prinsip kegunaan yang bercampur dan keragaman di mana toko, kantor, rumah dan apartemen berada pada satu jalur atau ruang dengan keragaman latarbelakang penghuni atau penggunaannya berdasarkan perbedaan etnik, kelas sosial, pendidikan, dan lainnya; *empat, mix housing* yaitu tempat tinggal yang beragam berdasarkan tipe, ukuran, model, dan harga pada suatu ruang yang sama dan berdekatan; *lima, quality architecture & urban design* yaitu prinsip di mana arsitektur dan rancangan perkotaan dibuat dengan memperhatikan keindahan, estetika, kemolekan, dan kenyamanan; *enam, traditional neighborhood structure* yaitu prinsip yang menekankan pada antara pusat dan pinggiran dapat dibedakan di mana pusat terdapat ruang publik dan paling padat; *tujuh, increased density* adalah prinsip di mana gedung-gedung, tempat tinggal, pertokoan, dan pelayanan semakin rapat sehingga memudahkan berjalan kaki dan penggunaan yang lebih efisien terhadap pelayanan dan sumberdaya serta menciptakan tempat hidup yang nyaman dan menyenangkan; *delapan, green transportation* adalah prinsip pengembangan moda transportasi hijau berlandaskan pada keretapi atau trem dan desain pedestrian yang menyenangkan sehingga mendorong penggunaan sepeda dan berjalan kaki sebagai transportasi keseharian; *sembilan, sustainability* merupakan prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan, minimal dampak lingkungan, dan lebih banyak

berjalan daripada berkendaraan; sepuluh, *quality of life* yaitu meningkatkan kualitas hidup, memperkaya dan menginspirasi semangat manusia (*human spirit*).

2. Gaya Hidup Perkotaan

Gaya hidup merupakan salah satu konsep terpenting yang dikemukakan oleh Max Weber ketika menjelaskan stratifikasi dalam masyarakat. Dalam pandangan Weber terdapat 3 jenis stratifikasi sosial, yaitu kelas (*class*), kelompok status (*status groups*) dan partai (*party*). Kelas dirumuskan oleh Weber sebagai semua orang yang mempunyai persamaan dalam hal peluang untuk hidup atau nasib (*life chances*).

Kepentingan ekonomi meliputi penguasaan atas barang dan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dalam pasaran komoditas atau pasaran kerja, menurut Weber, merupakan penentu terhadap peluang untuk hidup orang. Persamaan peluang dalam penguasaan barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan tertentu mengakibatkan orang yang berada di kelas yang sama memiliki persamaan dalam situasi kelas (*class situation*), yaitu persamaan dalam hal peluang untuk menguasai persediaan barang, cara hidup atau pengalaman hidup pribadi. Jadi, kekayaan menjadi dasar sebagai pembeda kelas, sedangkan kepentingan ekonomi sebagai tujuan pembentukan kelas (Damsar, 2015).

Sedangkan kelompok status dipandang sebagai sejumlah orang yang berada dalam situasi status (*status situation*), yaitu kesamaan atas kehormatan dan prestise yang dimiliki. Persamaan dalam status dinyatakan melalui persamaan gaya hidup (*style of life*), yang ditandai dengan adanya hak istimewa dan monopoli atas barang dan kesempatan ideal maupun material. Hal tersebut diperlihatkan melalui gaya konsumsi (Damsar, 2015).

Dalam sosiologi Amerika, menurut Abercrombie (2010: 312-313), gaya hidup (*lifestyle*) adalah gagasan yang digunakan membedakan antara kehidupan sosial perdesaan dan perkotaan, serta perkotaan dan wilayah pinggiran. Dalam karya terkini konsep ini telah digunakan lebih luas untuk menandai selera, sikap, kepemilikan atau perilaku sosial kelompok tertentu yang membedakannya dengan kelompok lain. Dengan demikian gaya hidup merupakan aspek

masyarakat konsumen (*consumer society*) : orang membeli gaya hidup sehingga membedakannya dengan orang lain.

Apa itu masyarakat konsumen? Masyarakat pasar adalah masyarakat di mana sistem ekonominya berlandaskan pada ekonomi pasar, di mana pasar mengatur dirinya sendiri lewat mekanisme permintaan dan penawaran (*self regulating market*). Pada masyarakat ini, mekanisme sosial budaya dan politik tidak berperan dalam mengatur sistem ekonomi, termasuk pasar. Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi, secara otomatis.

Kembali kepada gaya hidup perkotaan, berdasarkan diskusi di atas, ia dihubungkan dengan masyarakat konsumen, yaitu masyarakat di mana pasar mengatur kehidupan manusia. Gaya hidup di perkotaan, oleh karena itu, merupakan gaya hidup yang dikendalikan oleh pasar. Apa yang Anda makan, minum, pakai, kenakan, gunakan, habiskan atau hirup dikonstruksikan oleh kapitalis yang menjadi eksponen utama dari pasar. Tingkat kecantikan Anda dinilai oleh pasar dengan standar yang pasar miliki. Cantik dinilai berdasarkan seberapa putih dan kemilau wajah Anda, seberapa langsing tubuh Anda, atau seberapa banyak keriput di wajah Anda. Untuk mendapatkan wajah putih kemilau silahkan Anda beli berbagai macam produk impor dan lokal dengan berbagai jenis tingkatan harga. Atau juga Anda bisa melakukan operasi bedah plastik wajah supaya kelihatan cantik. Kalau tidak mau operasi plastik, Anda bisa suntik botoks untuk beberapa sisi dari wajah Anda. Atau sisi wajah Anda yang berkerut dikencangkan seperti bibir melalui sulam bibir. Bila alis mata terlihat kurang cantik bisa diperindah melalui tato, sulam, atau lukis dengan Henna.

Bila Anda ingin (kelihatan) langsing Anda memiliki banyak cara untuk meraihnya. Perusahaan multinasional dan lokal memberikan Anda banyak pilihan. Perusahaan obat dan suplemen menyediakan berbagai macam obat dan suplemen untuk meruruhkan lemak dalam tubuh Anda atau membuat Anda selalu merasa kenyang tidak ingin makan banyak. Kalau tidak suka minum obat atau suplemen, Anda bisa mengikuti program olahraga menurunkan berat badan atau menggunakan alat pelangsing tubuh.

Demikian pula derajat ketampanan Anda diukur berdasarkan standar pasar. Anda dikatakan tampan apabila rambut tidak berketombe, wajah tidak jerawat atau kelim, badan

tidak berbau tidak sedap, tubuh harus atletis, atau pakaian harus bermerek. Semua kebutuhan pria untuk menjadi tampan, pasar menyediakannya.

Begitu pula seberapa dalam kasih sayang dan cinta Anda kepada keluarga, kerabat atau kekasih Anda dinilai berdasarkan oleh standar pasar. Kasih sayang dan cinta dikonstruksi oleh pasar dalam berbagai bentuk barang dan jasa seperti mobil, liburan, cincin permata, dan sebagainya. Semua itu dijual oleh pasar, baik global maupun domestik.

Karena cantik, tampan, dan cinta merupakan rekayasa pasar, maka cantik, tampan dan cinta tersebut bersifat massal. Wajah cantik seorang wanita tidak berbeda dengan yang lainnya, seolah seseorang memiliki banyak kembarannya. Demikian juga ketampanan seorang pria tidak berbeda dengan pria tampan lainnya. Bagaikan seorang pria yang memiliki banyak kembarannya.

Kesemua yang disebut di atas bermuara dari pasar yang berlokasi di kota. Kadang tidak semua kota menyediakan pasar yang memasok barang atau jasa yang dibutuhkan maka pergilah ke kota lain atau kota yang lebih besar lagi. Kota adalah lokus gaya hidup.

Tidak semua orang mau didikte oleh pasar (kapitalis borjuis), sehingga kelompok orang tersebut melakukan perlawanan terhadap *mainstream* gaya hidup. Mereka menciptakan suatu subkultur atau melakukan resistensi gaya hidup. Ketika kelompok muslimah, misalnya, melakukan perkawanan terhadap gaya hidup Barat dengan membuat sub kultur busana muslimah dengan pakem hijab, yang pada awalnya dicerca dan ditindas oleh penguasa. Perlahan tapi pasti busana muslimah yang awalnya dipandang sub kultur menjadi menguat dan mengkristal sebagai bahagian dari busana *mainstream*. Seiring dengan itu, perlahan tapi pasti juga pasar mulai mendikte gaya hidup muslimah. Cantiknya muslimah adalah cantiknya pasar, bukan cantiknya syariah.

Hal yang sama juga terjadi pada gerakan gaya hidup punk dan bohemian. Semua merupakan gaya hidup sub kultur, ketika ia telah terintegrasi dengan atau menjadi budaya *mainstream* maka intervensi pasar tidak dapat dielakkan.

3. Alienasi Perkotaan

Konsep alienasi telah didiskusikan pada bab sebelumnya bahwa manusia mengalami alienasi dalam 3 arti. Pertama, manusia teralienasi dari produk kerjanya sendiri dalam arti bahwa ia hanya sekedar embel-embel dari proses produksi, sebagai pelayan mesin atau orang yang memindahkan-mindahkan kertas di kantor. Kedua, manusia juga teralienasi dari dirinya sendiri dalam arti bahwa ia kerja karena terpaksa, dan sebagai akibatnya manusia diubah menjadi hewan, “karena ia hanya merasa senang apabila melakukan fungsi-fungsi hewani, yakni makan, minum dan memiliki anak-anak”. Terakhir, manusia teralienasi dari sesamanya. Hubungan yang ada di tempat kerja mempengaruhi hubungan dalam kehidupan di luar kerja.

Mari kita pahami alienasi perkotaan melalui realitas para pekerja, karyawan atau pegawai perusahaan atau perkantoran yang berada di Jakarta yang bertempat tinggal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Pekerjaan mereka menyebabkan mereka teralienasi dari sesamanya! Para pekerja, karyawan atau pegawai yang tinggal di Bodetabek, harus bangun lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatu seperti memasak dan menyiapkan makanan, sebelum berangkat kerja. Setelah sholat subuh dan sarapan pagi, sekitar jam 5.30 WIB, Anda bersiap berangkat ke kantor. Pada saat berangkat, anak-anak masih tidur. Ketika di perjalanan, baik dalam angkutan kota (angkot) maupun dalam kereta api, Anda selalu dihantui apakah jalanan macet atau tidak, sehingga Anda masuk kantor sesuai dengan jadwalnya. Kalau telat akan terlalu banyak risiko yang akan ditanggung : dapat teguran, tunjangan dipotong, kenaikan pangkat ditunda, dan sebagainya. Oleh sebab itu, jangan telat berangkat, sedikit saja telat maka keterlambatan sampai di kantor bisa memakan waktu yang lebih lama. Di sepanjang jalan menuju kantor, banyak orang yang Anda temui, namun tidak pernah sekalipun melakukan komunikasi intens sebagaimana layaknya orang di desa. Ketika di kantor, Anda disibukkan oleh rutinitas perkantoran: penuh dengan intrik, gunjingan dan hasutan bahkan Anda merasa nyaman tidak ikut arus tersebut, lebih baik sendiri! Pada waktu pulang menuju rumah di Bodetabek, Anda selalu terjebak kemacetan yang menyesak. Sampai di rumah sekitar jam 20 WIB bahkan lebih. Ketika Anda sampai di rumah, Anda temui sebagian anak sudah ada yang tidur. Ritma kehidupan seperti itu Anda jalani hampir setiap hari. Pekerjaan sebagai bentuk hakekat kemanusiaan Anda telah membuat Anda terasing terhadap lingkungan Anda bahkan dengan anak-anak sendiri. Selain itu, Anda tidak bisa mengontrol pekerjaan Anda sendiri sehingga hakekat kemanusiaan Anda terjaga. Situasi seperti itu menunjukkan Anda mengalami alienasi terhadap pekerjaan dan lingkungan Anda.

Henslin (2008: 206) dalam bukunya “Sosiologi dengan Pendekatan Membumi” juga menemukan alienasi perkotaan di mana adanya suatu perasaan tidak menjadi bagian dari apapun dan suatu perasaan bahwa tidak satu orangpun peduli dengan apa yang terjadi dengan diri Anda. Untuk menjelaskan alienasi perkotaan, Henslin mengutip berita New York Times, 26 Maret 1964 yang menurunkan berita sebagai berikut:

Catherine Genovese, yang berusia 28 tahun dan biasa dipanggil Kitty oleh hampir semua orang di lingkungan huniannya di Queens, sedang pulang dari pekerjaan. Setelah ia memarkir mobilnya, seorang laki-laki merenggut tubuhnya dengan paksa. Kitty berteriak: “Oh Tuhan, ia menikam saya! Tolong! Tolong saya!”

Setelah lebih dari setengah jam, 38 warga terhormat yang taat pada hukum melihat keluar dari jendela mereka dan mengawasi si pembunuh memburu dan menikam Kitty dalam tiga serangan terpisah. Dua kali nyala lampu kamar mereka membuat penyerang itu takut. Karena tidak seorangpun bertindak, ia kembali, mencari Kitty, dan menikamnya lagi. Tidak satu orangpun yang menelepon polisiselama terjadinya serangan tersebut.

Saat polisi mewawancarai mereka, lanjut Henslin, beberapa orang saksi mengatakan : “saya tidak mau terlibat.” Orang lain mengatakan: “kami kira itu pertengkaran antara kekasih.” Beberapa orang hanya mengatakan: “saya tidak tahu.” Seluruh warga Amerika terkaget. Keadaannya seakan-akan orang Amerika bangun suatu pagi dan menemukan bahwa dalam satu malan Negara telah berubah. Mereka menganggap peristiwa ini sebagai pertanda bahwa orang tidak lagi dapat saling mempercayai, bahwa kota adalah suatu tempat dingin yang sunyi.

4. Anonimitas Perkotaan

Pada tahun 1980-an ada lawakan yang menceritakan kisah seorang pemuda desa yang merantau ke Jakarta pergi menonton film di bioskop terkenal bagi kalangan kelas menengah bawah. Sebagai seorang pendatang baru di Jakarta, kepribadian yang terbentuk dalam dirinya ketika di desa masih melekat erat: senyum pada semua orang, menyapa setiap orang yang baru dikenal, dan menyalami orang yang telah dahulu hadir dalam suatu pertemuan. Kepribadian tersebut tampil ketika dia pergi menonton film. Dia datang sekitar lima menit sebelum pertunjukan film. Setelah membayar tiket seraya mengucapkan terimakasih, dia menunjukkan tiket sambil mengucapkan salam kepada penjaga pintu bioskop. Petugas merasakan bahwa pemuda ini baru pertama kali ke bioskop, sehingga petugas merasa perlu untuk menunjukkan di mana tempat duduk sang pemuda. Kebetulan dia mendapatkan posisi tempat duduk paling depan. Sebagaimana adat kebiasaan di desanya, dia merasa risih dan tidak beradat apabila tidak menyapa dan menyalami orang yang telah lebih dahulu hadir di dalam bioskop. Dia bangkit dari

tempat duduknya dengan maksud untuk menyapa dan menyalami orang yang berada didekatnya satu persatu sampai deretan paling ujung. Setelah selesai menyalami semua penonton pada barisan paling depan, dia melanjutkan menyalami penonton barisan kedua sampai barisan paling belakang. Ketika selesai menyalami penonton posisi paling pojok barisan terakhir, tiba-tiba dia merasakan bisokop yang tadinya gelap menjadi terang benderang karena lampu dihidupkan. Dia kaget ternyata di layar sudah tidak ada lagi gambar. Dia marah, kenapa film tidak menunggu sampai dia selesai menyalami semua orang. Akhirnya dia keluar bersama penonton lain dan kembali lagi ke loket membeli tiket untuk pertunjukan berikutnya. Dia ingin menjadi orang pertama yang masuk ke dalam bioskop, dan berhasil! Dia adalah orang yang paling awal duduk di dalam bioskop sehingga dia tidak punya kewajiban untuk menyapa dan menyalami orang, seperti sebelumnya.

Meskipun cerita di atas sekedar berupa lawakan, namun di dalamnya ada pembelajaran tentang hidup di perkotaan yaitu anonimitas perkotaan. Para penonton bioskop tidak perlu tahu siapa orang yang berada di sekitar kita, bahkan yang duduk di samping sekalipun. Tidak perlu tahu apa yang dilakukan mereka. Kita hidup di kota mengalami anonimitas!

Pada saat Anda naik angkutan kota (angkot) menuju stasiun keretapi di Depok Jawa Barat dengan tujuan Jakarta, tempat di mana Anda bekerja, Anda tidak pernah menyapa satu persatu penumpang angkot. Demikian juga ketika Anda dalam kereta api, Anda juga tidak pernah menyapa satu persatu penumpang kereta api. Ketika Anda sampai di stasiun Kota Jakarta, Anda naik angkot lagi ke Glodok. Banyak penumpang yang naik turun dalam angkot yang Anda tumpangi, namun tetap saja Anda tidak pernah menyapanya satu persatu. Kenapa?

Kumpulan massa yang begitu banyak dan silih berganti ditemui sepanjang waktu pada kehidupan keseharian (*daily life*) Anda menyebabkan Anda mengalami anonimitas perkotaan, yaitu keberadaan seseorang dalam kumpulan massa yang anonim. Pengaruh desakan banyaknya jumlah manusia yang diperumit oleh perbedaan latar belakang suku bangsa, agama, kelas sosial, pekerjaan, dan daerah asal menyebabkan Anda tidak mungkin mengenal satu persatu mereka. Sehingga Anda merasakan sendiri dalam keramaian.

C. PERTUMBUHAN KOTA

Pertumbuhan kota merupakan kajian utama bagi pendekatan ekologi manusia (*human ecology*). Pendekatan ini dikembangkan oleh Jurusan Sosiologi Universitas Chicago, sehingga dikenal dengan Mazhab Chicago. Beberapa pemikiran dari Mazhab Chicago telah didiskusikan pada bab sebelumnya seperti Robert Ernez Park, Ernest Watson Burges, dan Louis Wirth.

1. Model Zona Konsentris

Pada bab 2 kita telah mengupas salah satu peletak pemikiran model pertumbuhan perkotaan yaitu Ernest Watson Burgess. Burgess, seperti telah ditulis sebelumnya, mengemukakan model zona konsentris sebagai model pertumbuhan kota Chicago. Model zona konsentris menempatkan pusat distrik bisnis sebagai titik pusat dari zona pertumbuhan kota. Ia dikelilingi oleh perkampungan kumuh, dan dilapisi lagi oleh zona pemukiman yang semakin membaik.

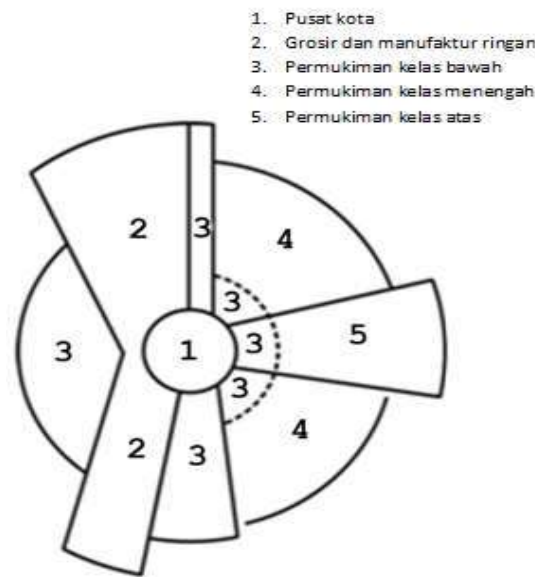
Burgess melihat bahwa kota-kota mengalami pertumbuhan, perkembangan dan pemekaran dimulai dari pusat. Selanjutnya seiring dengan penambahan penduduk, kota berkembang ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. Zona baru tumbuh tersebut terbentuk secara konsentris dengan struktur melingkar. Lebih detilnya lihat gambar 2.1.

2. Model Sektor

Homer Hoyt menemukan ternyata model zona konsentris tidak membentuk suatu lingkaran utuh. Oleh sebab itu Hoyt memodifikasi temuan Burges menjadi model sektor. Hoyt mengemukakan bahwa penggunaan lahan untuk keperluan tertentu cenderung menetap pada sektor tertentu, yang berbentuk irisan kue tar. Para perencana kota melihat kenyataan dari kondisi geografis kota dan rute transportasinya. Pada daerah datar memungkinkan pembuatan jalan, rel kereta api, dan kanal yang murah, sehingga penggunaan lahan tertentu, misalnya perindustrian meluas secara memanjang. Kota yang berlereng menyebabkan pembangunan perumahan cenderung meluas sesuai bujurang lereng.

Hasilnya adalah industri cenderung menempati suatu sektor tertentu, perumahan kelas sosial atas di sektor yang berhadapan, dan perumahan kelas pekerja di sektor dekatnya. Seiring

dengan berjalannya waktu, setiap sektor akan bertambah besar sampai pada ketika perubahan tertentu dalam segi topografi terjadi. Untuk jelasnya lihat gambar 5.1.



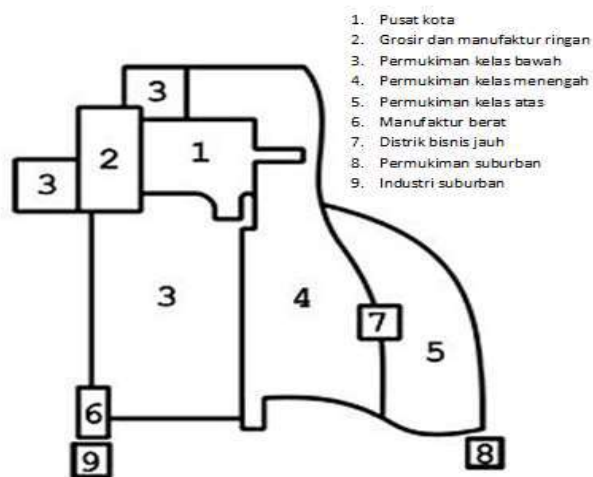
Gambar 5.1. Model Sektor

3. Model Nukleus Majemuk

Chauncey D. Harris dan Edwards Ullman, ahli geografi, mengembangkan model nucleus majemuk. Harris dan Ullman menyatakan bahwa beberapa kota ternyata memiliki beberapa nucleus atau pusat di mana setiap nucleus mengandung kegiatan khusus seperti pusat dunia usaha, pusat perbelanjaan, pusat bangunan pabrik, dan daerah kediaman.

Pertumbuhan kota bermula dari suatu pusat menjadi bentuk yang kompleks. Bentuk kompleks tersebut dikarenakan tumbuhnya nukleus-nukleus baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Nukleus-nukleus baru bertumbuh mengikuti penggunaan lahannya yang fungsional dan membentuk struktur kota yang memiliki sel-sel pertumbuhan. Nukleus kota mengambil beragam bentuk seperti kampus perguruan tinggi, bandar udara, kompleks industri, pelabuhan laut, dan terminal bus. Penggunaan lahan secara mengelompok didasarkan atas pertimbangan keuntungan ekonomi sehingga berbentuk nukleus. Kompleks industri, misalnya, berusaha menemukan lokasi yang berdekatan dengan sarana transportasi. Sedangkan perumahan baru berusaha bisa berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan tempat pendidikan.

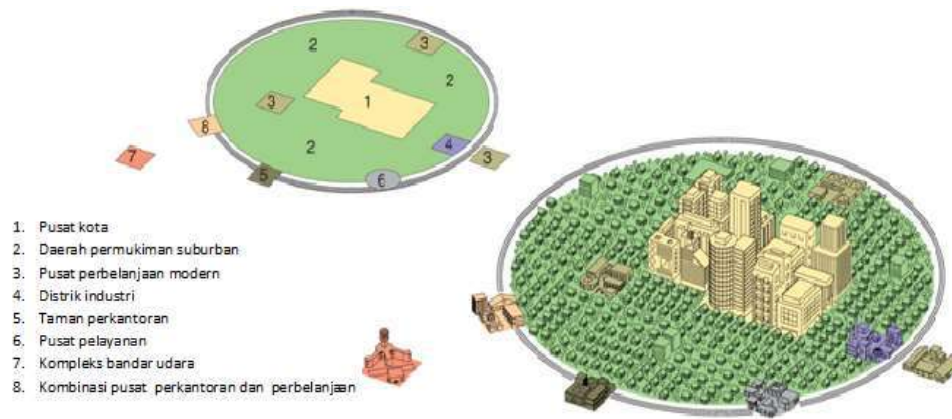
Pusat sudah ada sejak awal pertumbuhan kota. nucleus-nukleus tersebut tumbuhkembang berdasarkan pertimbangan topografi, pembiayaan dan peristiwa sejarah. Sistem nukleus tersebut cenderung bertahan dan memengaruhi pertumbuhan kota selanjutnya. Harris dan Ullman melihat bahwa tidak ditemukan urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti pada teori konsentris dan sektoral.



Gambar 5.2. Model Nukleus Majemuk

4. Model Periferi

Chauncey Harris (1997) menemukan model pertumbuhan kota lain daripada yang ditemukannya bersama Edwards Ullman. Harris melihat bahwa jalan raya radial memberikan dampak terhadap gerak orang dan jasa dalam menjauhi pusat kota ke periferi (pinggiran) kota. Model ini merujuk pada perkembangan kawasan industri dan perkantoran.



Sumber : http://lewishistoricalsociety.com/wiki2011/tiki-read_article.php?articleId=149

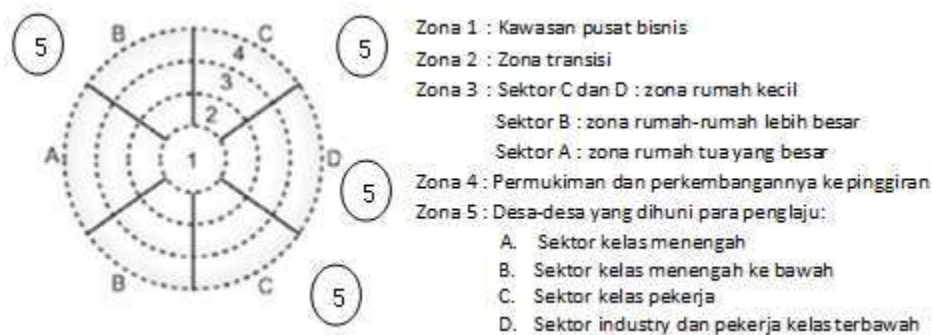
Gambar 5.3. Model Periferi

5. Model Konsektoral

Model konsektoral merupakan model yang dikembangkan dengan menggabungkan model konsentris dan sektor. Model konsektoral memiliki banyak varian, di antaranya:

a. Model konsektoral Eropa

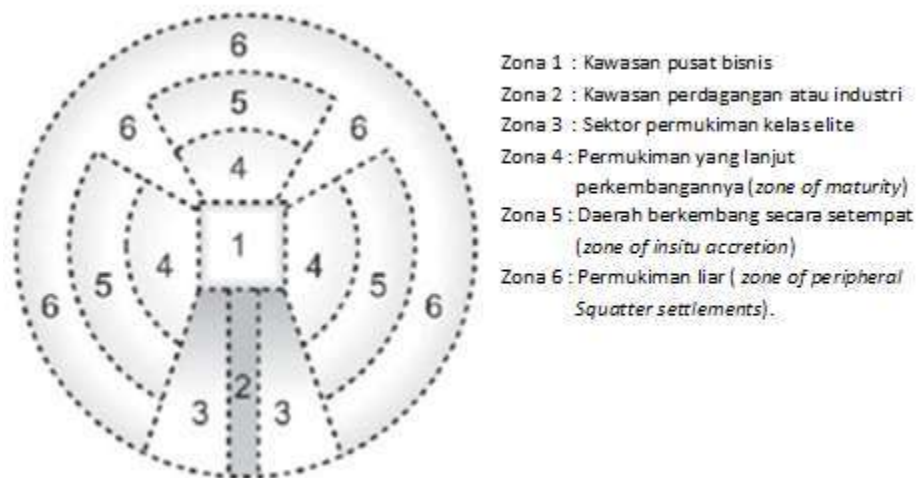
Model konsektoral tipe Eropa digagas oleh Peter Mann. Model ini merupakan hasil penelitiannya di Inggris pada tahun 1965. Mann menemukan bahwa ternyata pola pertumbuhan kota di Eropa, dalam hal ini di Inggris, mengambil dua bentuk model sebelumnya, yaitu model konsentris dan sektoral. Namun model ini tampaknya lebih menonjol pada sisi konsentris dibandingkan dengan sektor. Lihat gambar 5.4.



Gambar 5.4. Model Konsektoral Tipe Eropa

b. Model konsektoral Amerika Latin

Teori konsektoral tipe Amerika Latin dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Ford pada tahun 1980 berdasarkan penelitian di Amerika Latin. Griffin dan Ford menemukan bahwa pertumbuhan kota Amerika Latin berbeda dengan apa yang ditemukan di Amerika baik oleh Burgess dengan model Konsentris maupun oleh Hoyt dengan model sektornya. Model yang ditemukan oleh Griffin dan Ford merupakan kombinasi antara model konsentris dan model sektor. Namun berbeda dengan model konsektoral Eropa yang lebih menonjolkan model konsentrisnya, model konsektoral Amerika Latin memadukan model konsentris dan model sektoral secara lebih seimbang. Model ini dapat divisualisasikan sebagai berikut gambar 5.5.

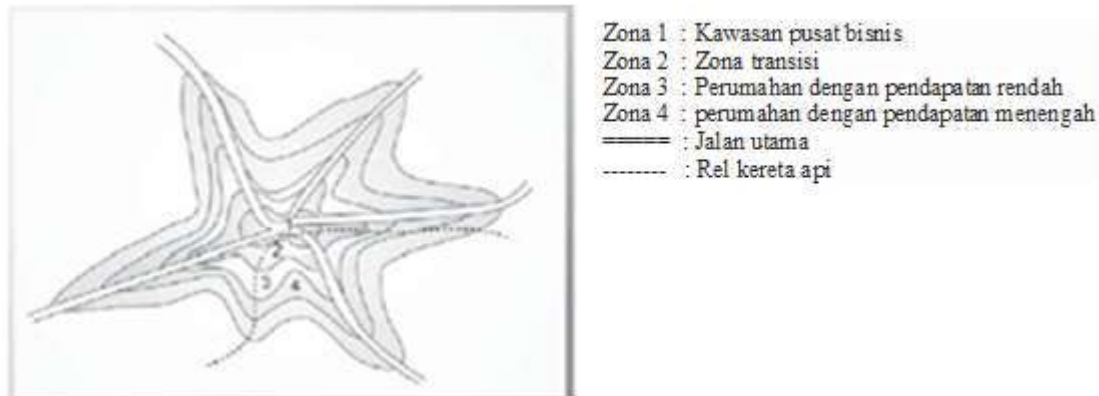


Gambar 5.4. Model Konsektoral Tipe Amerika Latin

6. Model Poros

Teori poros dikemukakan oleh Babcock (1932), menekankan pada peranan penting transportasi dalam memengaruhi struktur keruangan kota. Transportasi merupakan poros dan menjadi faktor utama yang memengaruhi mobilitas. Transportasi menghubungkan kawasan pusat bisnis dengan daerah bagian luarnya. Aksesibilitas sistem transportasi mempertimbangkan

biaya dan waktu. Perkembangan lebih pesat terjadi pada wilayah sepanjang poros transportasi dibandingkan dengan zona di antaranya, yaitu zona yang tidak terlayani dengan fasilitas transportasi yang cepat. Model poros divisualisasikan pada gambar 5.4.



Gambar 5.4. Model Poros

7. Kritik Terhadap Model

Semua model tidak sempurna atau memiliki kelemahan dan kekurangan. Semua model yang ada terikat pada ruang dan waktu. Model dibangun pada realitas perkembangan suatu lokasi tertentu dan pada suatu rentang waktu tertentu. Banyak variabel yang berpengaruh terhadap kelemahan suatu model, yang selalu lapuk dimakan zaman dan rentan perbedaan ruang, yaitu antara lain: *satu*, suatu kota bisa saja modelnya berbeda antara suatu t waktu dengan t waktu lainnya karena adanya perencanaan ruang yang berbeda; *dua*, pemekaran kota menyebabkan suatu kota mengalami perubahan model; *tiga*, perbedaan model antara kota-kota negara maju dan negara sedang berkembang.

D. SIMBOLISASI PERKOTAAN

1. Konstruksi Sosial atas Simbol Kota

Kota adalah dunia simbol, menyimbolkan segala sesuatu tentang *city* (kota secara fisik) dan *urban* (kota secara sosiologis) beserta segala yang ada di dalam dan atau terkait dengannya. Melalui simbol warga mencintai, membenci, merindui, menyakiti, menyayangi, atau melukai kota. Proses mencintai, membenci, merindui, menyakiti, menyayangi, atau melukai kota melalui simbol berlangsung secara dialogis antara kota dan warganya: tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Tidak mungkin kota memperoleh cinta dari warganya, apabila kota tidak mencintai warganya.

Realitas cinta, benci, rindu, sakit, sayang, atau luka merupakan hasil dari suatu konstruksi sosial atas simbol kota. Realitas tersebut dikonstruksi melalui proses dialektik antara eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses di mana kota dan warganya saling mengeluarkan, menampakkan, atau mengemukakan semua keinginan, kehendak, maksud, tujuan, dan hasrat dalam hubungan mereka. Eksternalisasi hubungan kota dan warganya akan terlihat jelas ketika masa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tiba. Semua calon anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat / Daerah) dan calon pemimpin eksekutif sebagai walikota dan wakilnya menyampaikan visi, misi, program dan kegiatan kepada warga kota. Ketika warga kota datang atau ditawarkan menghadiri kampanye atau menerima brosur, leaflet, atau bahkan sudah sampai pada tahap penandatanganan kontrak politik maka tahapan eksternalisasi sedang berlangsung.

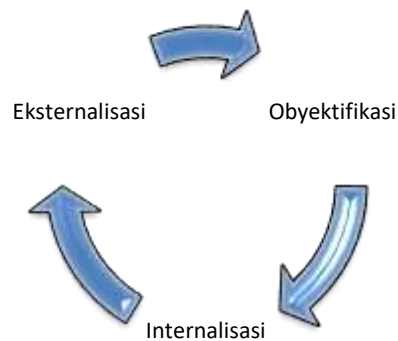
Eksternalisasi keinginan, kehendak, maksud, tujuan, dan hasrat mereka tersebut berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pada suatu titik waktu, motif tersebut mengkristal menjadi keinginan, kehendak, maksud, tujuan, dan hasrat bersama. Dalam kasus di atas ditunjukkan oleh kehadiran kontrak politik antara warga kota dengan kotanya. Dengan kata lain, ada bahagian dari keinginan, kehendak, maksud, tujuan, dan hasrat secara individual menjadi keinginan, kehendak, maksud, tujuan, dan hasrat bersama. Pengkristalan keinginan, kehendak, maksud, tujuan, dan hasrat bersama tersebut menunjukkan adanya kesepakatan tentang sesuatu yang menjadi milik bersama (*general*). Kebersamaan timbal balik melalui kontrak politik menjadi fakta sosial dalam konsepsi Durkheim (Damsar, 2015).

Sesuatu yang menjadi milik bersama dalam hubungan antara kota (walikota dan anggota dewan) dan waranya tersebut selanjutnya menjadi sesuatu yang bersifat di luar diri mereka (*eksternal*) dan bersifat memaksa (*coercive*). Dengan kata lain, lanjut Damsar (2015), sesuatu

yang menjadi milik bersama tersebut tampak sebagai realitas yang berada di luar individu yang membentuknya. Selain itu, individu yang membentuk realitas kebersamaan tersebut taat dan patuh atas kebersamaan yang dibentuknya. Proses ini dinyatakan sebagai obyektifikasi.

Realitas kebersamaan yang dibentuk oleh kota dan warganya tidak dilihat sebagai sesuatu yang eksternal dan memaksa karena seiring dengan berjalannya waktu, realitas tersebut diinternalisasikan dalam kehidupan mereka berdua. Proses ini terus berlangsung secara dialektik antara eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi. Bila kontrak politik atau janji kampanye dicerai maka cinta, kasih, dan sayang warga merasa dicerai pula.

Untuk memudahkan pemahaman proses dialektika konstruksi sosial Berger dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 5.5. Proses Dialektika Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial atas simbol kota direfleksikan oleh perilaku kota tentang kotanya. Ketika warga kota membuang sampah sembarangan, melalui perilaku warga tersebut, kota disimbolkan sebagai kota jorok atau kotor. Sebaliknya ketika warga kota melihat ada sampah berserakan di halaman rumah, secara penuh kesadaran, warga mengambil dan membuangnya ke dalam tempat pembuangan sampah. Itu berarti warga menyimbolkan sebagai kota yang bersih atau sehat. Tidak jarang penegakan aturan denda terhadap warga yang membuang sampah sembarangan dilakukan oleh kota agar simbol kota bersih tegak, contoh ekstrimnya adalah Singapura.

Demikian pula dengan korupsi. Bila di suatu kota semua urusan, secara sadar warga kota harus merogoh kantong agar urusan bisa segera selesai, maka warga kota telah menyimbolkan kotanya sebagai kota korup, semua urusan harus menggunakan uang tunai.

Di sisi lain kota, melalui pemerintah kota, mengonstruksi simbol kota melalui pembangunan fisik berbagai ornamen gedung, patung, taman kota, dan penerangan kota. Kebijakan pemerintah kota menganjurkan gedung perkantoran mengikuti gaya rumah gadang Minangkabau untuk kota Padang, rumah adat Melayu di Pekanbaru, atau joglo di Semarang merupakan konstruksi negara atas simbol kota di mana kotanya kota etnik yang disimbolkan.

Hal menarik simbolisasi kota Indonesia adalah gapura atau gerbang selamat datang. Hampir semua kota di Indonesia memiliki gapura atau gerbang selamat datang di berbagai perbatasan kota. Gapura atau gerbang selamat datang bagi pengunjung melalui jalan darat tersebut menunjukkan keramahan kota menerima para tamu yang datang berkunjung ke kota. Meskipun sebenarnya dalam kenyataannya kota tidak ramah bagi pengunjung seperti tidak punya toilet umum yang bersih dan sehat atau tidak punya taman yang dapat dikunjungi sekedar untuk melihat kota melalui taman, misalnya.

2. Simbol Kota, Identitas Kota

Mari lihat gambar 5.6. di bawah ini! Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika gambar tersebut tampil dihadapan Anda? Benar, gambar tersebut membawa pikiran Anda dengan identitas simbolik dari 3 kota yang tidak asing lagi bagi Anda. Gambar sebelah kiri adalah monument nasional, dikenal dengan sebutan Monas. Ia merupakan identitas simbolik dari kota Jakarta. Sedangkan di tengahnya adalah jam gadang, atau jam besar. Anda mengenalnya sebagai identitas simbolik dari kota wisata yang terkenal di Sumatera, yaitu Bukittinggi. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah menara Eifel, merupakan identitas simbolik dari kota Paris.

Ternyata tidak banyak kota seberuntung Jakarta, Bukittinggi dan Paris, yang memiliki simbol sebagai identitas kota. Beberapa kota besar seperti Kuala Lumpur mengonstruksi simbol baru berupa menara kembar Petronas sebagai identitas kotanya.

Simbol kota yang mencerminkan identitas kota tidak selalu berupa gedung pencakar langit atau menara menjulang tinggi ke angkasa. Singapura memiliki simbol berupa patung singa. Batam menjadikan jembatan Bareleng sebagai identitas kota, sebagaimana Palembang memiliki jembatan Amperanya. Sedangkan Makkah terlekat identitas Ka’bahnya.



Gambar 5.6. Menara 3 Kota

3. Kontestasi Simbol Perkotaan

Kontestasi dan pertarungan simbol perkotaan merupakan suatu realitas perkotaan dunia. Kota penting dan kaya dunia berlomba membangun gedung pencakar langit atau menara tertinggi dan termegah sejagad raya. Salah satu alasan mengapa kota-kota dunia membangun gedung pencakar langit adalah *to be number one* (menjadi yang pertama atau nomor satu). Sensasi *to be number one* berakar dari kredo Yunani, “*citius, altius, dan fortius*” (tercepat, tertinggi, dan terkuat), yang menjadi kredo Olimpiade. Sensasi menjadi *to be number one* merupakan daya dorong bagi kontestasi ini.

Kontestasi dan pertarungan simbol perkotaan melalui gedung pencakar langit melibatkan banyak negara. Terdapat sebanyak 13 gedung pencakar langit yang memiliki ketinggian 440 meter ke atas. Negara yang paling banyak memiliki gedung pencakar langit dengan ketinggian tersebut adalah China, yaitu sebanyak 7 gedung. Sisanya masing-masing 1 gedung pencakar langit setiap negara, yaitu : Uni Emirat Arab, Amerika, Taiwan, Hongkong, dan Malaysia. Menariknya di China terdapat satu kota yang memiliki 2 gedung pencakar langit, yaitu Guangzhou dengan CTF Finance Centre yang berketinggian 530 meter dan Guangzhou International Finance Center yang berketinggian 440 meter. Untuk sederhananya lihat tabel 5.1.

Tabel 5.1. Gedung Tertinggi di Dunia tahun 2016

No	Nama Gedung	Ketinggian (meter)	Kota	Negara
1	Burj Khalifa	829,8 meter	Dubai	Uni Emirat Arab
2	Shanghai Tower	632 meter	Shanghai	China
3	Ping An Finance Centre	599 meter	Shenzhen	China
4	Goldin Finance 117	596.5 meter	Tianjin	China
5	One World Trade Center	541.3 meter	New York City	Amerika
6	CTF Finance Centre	530 meter	Guangzhou	China
7	Taipei 101	509 meter	Taipei,	Taiwan
8	International Commerce Centre	484 meter	Hong Kong	Hong Kong
9	Petronas Tower	452 meter	Kuala Lumpur	Malaysia
10	Zifeng Tower	450 meter	Nanjing	China
11	Willis Tower (Sears Tower)	442 meter	Chicago	Amerika
12	KK100	442 meter	Shenzhen	China
13	Guangzhou International Finance Center	440 meter	Guangzhou	China

Menarik juga untuk memperbandingkan peserta kontestasi dan pertarungan pencakar langit sejagad ini. Melihat perbandingan antar benua ternyata 12 dari 13 gedung pencakar langit yang berketinggian di atas 440 meter berada di Asia dan 1 gedung dari Amerika. Sedangkan dari Eropa, sebagai salah pusat penggerak ekonomi dunia, tidak ada sama sekali. Benua Afrika juga tidak ada.

Setiap saat ada saja kota yang merencanakan pembangunan gedung pencakar langit terbaru yang tingginya melebihi yang sudah ada. Gedung pencakar langit yang tertinggi sampai pada tahun 2016 adalah Burj Khalifa dengan ketinggian 829.8 meter di Dubai Uni Emirat Arab. Sementara negara tetangganya Saudi Arabia sedang melakukan pembangunan pencakar langit lebih tinggi lagi daripada yang dimiliki Uni Emirat Arab. Gedung pencakar langit tersebut akan dibangun menembus awan berketinggian 1.008 meter di Jeddah, oleh sebab itu diberi nama Jeddah Tower, dan direncanakan selesai pada tahun 2020. Bahkan Jepang, merujuk Koran Sindo¹ Edisi On-line 09-02-2016, akan membangun gedung pencakar langit setinggi 1.700 meter di

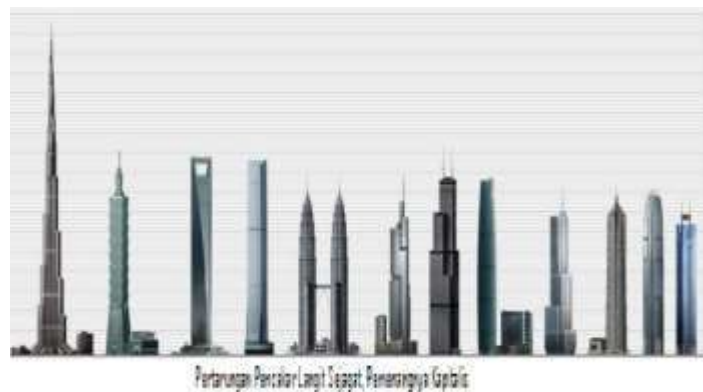
¹ <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=23&date=2016-02-09>

Teluk Tokyo. Proyek ambisius Jepang tersebut direncanakan rampung pada tahun 2045, yang bernama Menara Sky Mile.

Di samping itu, lanjut Berita Sindo, beberapa gedung pencakar langit yang sedang tahap pembangunan antara lain: Wuhan Greenland Tower (636) di China, Dubai One Tower (638) di UEA, Rama IX Super Tower (625) di Thailand, Lotte World Premium Tower (555) di Korea Selatan, dan Busan Lotte World (510) di Korea Selatan.

Bagaimana penampakan gedung pencakar langit dari kontestasi dan pertarungan simbol perkotaan sejagat tersebut? Dari penampakan gedung pencakar langit seperti yang terlihat pada Gambar 5.3. tersebut ternyata semua gedung pencakar langit tersebut berpola sama, yaitu pola sumpit, yang ragam variasinya. Realitas ini ditangkap oleh Jennifer Chen, seperti yang dikutip oleh Eko Budihardjo (2014: 17), sebagai *chopstick syndrome* (sindrom sumpit). Chen menuturkan dalam bukunya *Race Against Time* bahwa kemunculan gedung-gedung tinggi secara sporadis, ramping, mencuat, tampak bagai sumpit. Dia mengecam merebaknya “sumpit-sumpit” bangunan tinggi yang ternyata menyuguhkan *repetitive cityscape ... creating urban landscape that all look the same ... resulting in monotony and boredom*. Semua pencakar langit tampak sama bagaikan sumpit sehingga tampak monoton dan membosankan.

Siapakah pemenang kontestasi dan pertarungan simbol perkotaan sejagat? Pemenangnya adalah kapitalis, pemilik kapital besar sejagat. Karena mereka memiliki kemampuan finansial dalam melakukan strategi pemenangan tender dan teknologi.



Gambar 5.6. Kontestasi dan Pertarungan Simbol Dunia Sejagat

Kontestasi dan pertarungan simbol perkotaan tidak hanya berlangsung pada aras global (sejagad), tetapi juga dalam aras lokal. Kontestasi dan pertarungan simbol perkotaan pada aras lokal mengambil bentuk yang berbeda pada aras global. Pemerintah pusat merancang berbagai bentuk kontestasi antar kota berskala nasional seperti kontestasi adipura, ???

E. McDONALDISASI PERKOTAAN

Salah konsep yang sering didiskusikan para ahli ketika membahas budaya konsumen adalah McDonaldisasi. Oleh sebab itu pada bagian ini Anda diajak untuk memahami konsep tersebut. Fenomena McDonaldisasi merupakan perkembangan rasionalitas formal kehidupan masyarakat yang sangat mirip dengan Fordisme, namun tidak persis sama dengan Fordisme karena McDonaldisasi memiliki beberapa ciri dari pasca-Fordisme. Menurut Ritzer (2002: 267), McDonaldisasi merupakan suatu fenomena yang memiliki banyak persamaan dengan Fordisme, tumbuh dengan pesat dalam masyarakat kontemporer. Di antara hal-hal yang sama antara McDonaldisasi dengan Fordisme ialah produk homogen, teknologi tinggi, rutinitas kinerja standar, penghapusan skill, homogenitas pekerja (dan pelanggan), pekerja massal, serta homogenisasi konsumsi.

Bagaimana inti dari pemikiran Ritzer tentang McDonaldisasi, mari kita rujuk apa yang ditulis oleh Ritzer dan Goodman (2004: 564-567). McDonaldisasi merupakan proses rasionalisasi formal kehidupan masyarakat modern dalam paradigma baru. Rasionalisasi formal pada masa hidup Max Weber terjadi dalam birokrasi. Ternyata rasionalisasi formal tersebut tidak berhenti pada birokrasi saja, tetapi juga berlanjut pada kegiatan lainnya, terutama restoran cepat saji yang diperlihatkan oleh McDonald.

Ada empat dimensi atau komponen rasionalitas formal yang terjadi dalam McDonaldisasi, yaitu efisiensi, kemampuan untuk diprediksi (*predictability*), lebih menekankan pada kuantitas ketimbang kualitas, dan penggantian teknologi nonmanusia terhadap teknologi manusia – bentuk rasionalitas inilah yang cenderung menyebabkan ketakrasionalan dari sesuatu yang rasional (*the irrationality of rationality*). Apa yang dimaksud Ritzer tentang efisiensi? Efisiensi merupakan suatu cara terbaik untuk mencapai tujuan. Pada restoran cepat saji, misalnya, mengeluarkan sajian lewat jendela adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan

pesanan makanan dalam waktu yang singkat. Mall atau supermarket dipandang sebagai mesin penjualan sangat efisien bagi pedagang atau mesin pembelian yang sangat efisien bagi pembeli. Efisien karena pada ruang yang tersedia berbagai jenis toko, jenis barang dan jenis harga yang berbeda.

Kemampuan untuk diprediksi (prediktabilitas) berarti dunia tanpa kejutan, segala sesuatu dapat diduga sebelumnya, sekarang dan akan datang. Big Mac di Los Angeles, tidak dapat dibedakan dari Big Mac di London atau di Tokyo. Begitu pula hamburger yang kita konsumsi kemaren, besok pagi atau tahun depan, persis sama dengan yang kita makan pada saat sekarang. McDonald di New York, di Berlin atau di Jakarta memiliki persamaan dalam sajian menu, rasa masakan, dekorasi ruang, curahan waktu penyajian dan pilihan warna. Semua dapat diduga.

McDonaldisasi meliputi penekanan pada sesuatu yang bisa dikalkulasi, dihitung dan dibilang. Sistem rasionalitas cenderung lebih menekankan pada kuantitas, biasanya kuantitas besar, ketimbang kualitas. Penekanan pada kuantitas ini berkaitan baik dengan proses (produksi, misalnya) maupun proses akhir (seperti, barang-barang). Kaitannya dengan proses, penekanan lazim pada kecepatan (biasanya yang tinggi). Sedangkan pada hasil akhir, fokus terletak pada jumlah produksi yang dihasilkan dan disajikan (biasanya yang berjumlah besar). Restoran cepat saji menekankan pada kuantitas dibandingkan dengan kualitas produk. Kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah banyak dan bentuk yang besar yang dilakukan oleh restoran cepat saji menyebabkan bisa memberikan sejumlah makanan dengan sedikit uang dibandingkan yang harus dikeluarkan pada restoran tradisional. Mereka memang menarik sedikit untuk atas masing-masing makanan, tetapi mereka menjual lebih banyak makanan itu.

Penggantian teknologi nonmanusia terhadap teknologi manusia. Penggantian manusia dengan teknologi nonmanusia seringkali termotivasi oleh keinginan akan kontrol yang lebih besar. Sumber segala sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa diprediksi serta ketidakefisienan adalah manusia, baik yang bekerja di dalamnya maupun yang menggunakannya. McDonaldisasi melibatkan pencarian cara-cara untuk meningkatkan kontrol atas pekerja dan pelanggan. Oleh sebab itu, daripada tergantung pada kualitas manusia seorang koki, restoran cepat saji menggantikan ketergantungannya kepada teknologi nonmanusia di mana kepatuhan dalam mengikuti petunjuk rinci dan metode perakitan yang diterapkan dalam memasak dan menyajikan makanan kepada pemesan lebih penting ketimbang kehandalan dari seorang koki yang ahli.

Sistem rasional formal yang tercermin dalam McDonaldisasi tersebut menimbulkan berbagai macam ketakrasionalan, dan yang paling menonjol adalah demistifikasi dan dehumanisasi pengalaman makan. Seluruh dimensi mendasar McDonaldisasi, kata Ritzer (2002: 106) berlaku seperti dua sisi mata uang. Contohnya, penekanan atas sesuatu yang bisa dihitung akan mempermudah menentukan efisiensi. Bahwa beberapa tahapan yang perlu sedikit waktu lazim dinilai yang paling efisien. Bila dihitung, produk dan proses bisa lebih diprediksi karena memerlukan sejumlah material atau butuh waktu yang sama dari satu ke tempat lain. Kuantifikasi juga berkait dengan penciptaan teknologi nonmanusia yang mampu melaksanakan tugas sesuai waktu dan jumlah maupun produk yang ditentukan. Maka daya hitung sebenarnya jelas berkaitan dengan irasionalitas. Salah satu alasannya, penekanan pada kuantitas itu cenderung bertentangan dengan makna kualitas.

Untuk memahami McDonaldisasi kehidupan, Anda masih dibawa untuk mengikuti contoh yang diberikan oleh Ritzer dan Goodman (2004: 566). Peran kartu kredit adalah me-McDonald-kan penerimaan dan berbelanja dengan kredit. Apa yang dilakukan bank adalah menyalurkan uang secara cepat melalui kartu kredit. Seluruh proses untuk memperoleh pinjaman telah dibuat menjadi semakin efisien. Sebagai pengganti proses permohonan kredit yang panjang dan susah untuk dipakai, sekarang hanya sedikit pertanyaan sederhana yang perlu dijawab. Dan jika itu belum cukup efisien, banyak orang yang sering ditawarkan kartu kredit yang disetujui terlebih dahulu. Dimensi prediktabilitas dari McDonaldisasi kartu kredit adalah kenyataan bahwa kartu kredit membantu membuat konsumsi menjadi lebih dapat diprediksi. Orang dapat mengonsumsi (berbelanja) tanpa uang kontan di tangan. Penekanan pada kebanyakan orang adalah jumlah kartu kredit yang dipegangnya dengan sedikit memperhatikan pengaruh sebaliknya dari sejumlah besar utang terhadap kualitas hidup mereka. Keputusan apakah dapat dikeluarkan kartu kredit baru atau tidak, atau apakah batas kredit ditingkatkan atau tidak, semakin diserahkan pada program komputer yang makin canggih dengan sedikit atau bahkan tanpa masukan dari manusia berdasarkan kasus per kasus. Bisnis kartu kredit yang sangat rasional tersebut menghasilkan sederatan ketakrasionalan, termasuk dehumanisasi yang berhubungan dengan teknologi nonmanusia dan pegawai bank menyerupai robot yang terlibat dalam interaksi dengan nasabahnya hanya melalui tulisan di layar monitor komputer.

F. SISI GELAP DINAMIKA PERKOTAAN : KEMISKINAN

1. Kemiskinan Perkotaan

Sebelum mendiskusikan bagaimana kemiskinan di perkotaan, pertanyaan yang pantas diajukan sebelum itu dijawab adalah apakah kemiskinan itu ? Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana orang tidak cukup uang untuk mencapai standar kesehatan minimum dan kehidupan yang layak (Horton dan Hunt, 1989 : 51). Sedangkan Parsudi Suparlan (1985) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

2. Cara Menentukan Miskin

Bagaimana menentukan seseorang itu miskin ? Ada tiga cara untuk menetapkan seseorang masuk kategori miskin atau tidak, yaitu :

a. Pendekatan subjektif

Seseorang mengukur dirinya sendiri berdasarkan kesadaran subjektifnya tentang situasi atau keadaan dirinya apakah masuk kategori miskin atau tidak dalam hubungannya dengan orang lain. Pengukuran seperti ini membuka peluang bagi seseorang untuk menyatakan diri sebagai orang miskin meskipun jika ditilik dari indikator yang dilekatkan padanya, sebenarnya tidak miskin. Namun karena subjektifitas yang dimilikinya maka ia menyatakan masuk dalam kelompok miskin. Kasus “bantuan langsung tunai” (BLT) sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM kepada kelompok miskin pada tahun 1995 dan 1996 yang banyak menuai masalah dikarenakan bermainnya faktor subjektifitas. Banyak orang mengaku miskin, sementara jumlah dana terbatas. Sehingga orang yang mengaku miskin berang karena tidak memperoleh seperti temannya yang lain yang juga mengaku miskin. Sangat langka orang yang sebenarnya miskin menurut indikator objektif, tetapi secara subjektif menyatakan tidak miskin ketika ada dana bantuan yang akan diberikan buat orang miskin.

b. Pendekatan reputasional

Suatu penilaian kemiskinan yang dilakukan subjek penelitian terhadap terhadap seseorang. Subjek penelitian diminta untuk memberikan penilaian terhadap seseorang, apakah orang yang dinilai tersebut masuk kategori miskin atau tidak. Pendekatan ini bisa dilakukan pada suatu komunitas yang telah saling mengenal secara dalam sehingga satu sama lain bisa saling memberikan penilaian. Persoalan akan sama dengan pendekatan subjektif, bila pendekatan relasional ini digunakan sebagai alat menentukan kebijakan ketika subjek penelitian memiliki kepentingan, dilakukan dalam suatu komunitas heterogen, dan berjumlah besar. Kembali pada kasus BLT, ketika petugas Biro Pusat Statistik ditemani aparat kelurahan atau desa menentukan siapa saja penduduk yang bisa dikategorikan orang miskin, penerima BLT; ternyata tidak sedikit kasus di mana aparat merekomendasikan keluarga atau kroni mereka sebagai orang miskin yang layak menerimanya. Dalam kenyataan masih banyak orang lain di kelurahan atau desa tersebut yang lebih layak menerima dana tersebut dibandingkan keluarga atau kroni pejabat desa atau kelurahan tetapi tidak direkomendasi. Konsekuensinya adalah kericuhan terjadi di mana-mana, karena mereka diperlakukan tidak *fair*.

c. Pendekatan objektif

Suatu usaha menilai seseorang berdasarkan variabel yang dapat diukur secara kuantitatif. Sajogyo, sebagai ilmuwan pertama Indonesia meletakkan pengukuran kuantitatif kemiskinan di Indonesia, telah menetapkan beberapa garis batas kemiskinan dengan mempertimbangkan antara miskin di desa dan di kota. Secara umum, orang secara individual disebut miskin apabila asupan gizinya kurang dari 2.100 Kkal/hari dengan dua standar deviasi sehingga ditoleransi hingga 1.900 Kkal/hari. Karena pengukuran didasarkan pendekatan ingatan seringkali terlapor lebih rendah hingga 20 %, maka garis kemiskinan terbawah dapat ditoleransi hingga 1.700 Kkal/hari. Berdasarkan asupan gizi inilah, Sajogyo membuat beberapa kategori garis kemiskinan, yaitu garis melarat (*destitute*), miskin sekali (*very poor*), dan miskin (*poor*). Ketiga kategori tersebut berbeda ukurannya antara desa dan kota, di mana desa ditetapkan garis 180 kg, 240 kg, dan 320 kg setara beras per orang-tahun; sedangkan di kota dipancang dengan garis 270 kg, 360 kg, dan 480 kg setara beras per orang-tahun. Untuk praktisnya, nilai rupiah bagi kalori dikonversi

dengan dengan beras. Karena beras mudah dipahami sebagai sumber kalori dan harganya relatif stabil (Sajogyo, 1988; 2006).

3. Ragam Pengukuran Kemiskinan

Terdapat beragam pengukuran kemiskinan yang berkembang dalam dunia akademik maupun praktisi, yaitu antara lain:

a. Pendekatan tingkat pendapatan

Pendekatan tingkat pendapatan menggunakan besaran jumlah pendapatan sebagai tolok ukur untuk menentukan seseorang masuk pada kategori miskin atau tidak. Bank Dunia mengeluarkan tolok ukur kemiskinan absolut pada garis satu dolar Amerika Serikat. Selain itu Bank Dunia membuat ukuran dengan pendekatan berbeda dengan pendekatan yang disebut barusan, yaitu paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pendekatan paritas daya beli ini lebih cocok masuk pada pendekatan tingkat konsumsi, karena mengukur nilai uang yang dikeluarkan untuk barang dan jasa pada suatu wilayah negara.

b. Pendekatan tingkat konsumsi

Salah satu pendekatan tingkat konsumsi yang sudah kita diskusikan adalah pendekatan pengukuran kemiskinan dari Sajogyo, yaitu pendekatan asupan gizi yang dikonversi dalam beras. Selain itu ada pendekatan Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengajukan penghitungan angka kemiskinan melalui tingkat konsumsi masyarakat atas kebutuhan dasar. BPS menghitung tingkat konsumsi tidak hanya berdasarkan kebutuhan pada pangan, sandang dan papan saja tetapi juga kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

c. Pendekatan kesejahteraan keluarga

Pendekatan kesejahteraan keluarga dipelopori oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pendekatan kesejahteraan keluarga dari BKKBN mengkategorikan keluarga atas 5 jenis, yaitu : satu, keluarga pra sejahtera (sangat miskin)

merupakan keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Dua, keluarga sejahtera I (miskin) yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Tiga, keluarga sejahtera II adalah keluarga yang mana karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil komunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (6 bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, menggunakan sarana transportasi, memperoleh berita dari surat kabar, radio, tv, dan majalah. Empat, keluarga sejahtera III merupakan keluarga yang telah mampu memenuhi semua indikator yang disebut pada keluarga sejahtera II, namun belum dapat memenuhi beberapa indikator seperti aktif memberikan sumbangan material secara teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Lima, keluarga sejahtera III Plus merupakan keluarga yang telah memenuhi semua indikator yang disebut pada keluarga sejahtera II plus aktif memberikan sumbangan material secara teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

d. Pendekatan Indeks Kemiskinan Multidimensi

Pendekatan United Nation Development Programme (UNDP) mengeluarkan sebuah pendekatan multidimensi dalam mengukur tingkat kemiskinan, yang dikenal Indeks Kemiskinan Multidimensi atau IKM. Pendekatan IKM terdiri dari 4 pengukuran yaitu Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index / HDI*), Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index / GDI*), Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index / HPI*), dan Pengukuran Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measure / GEM*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui beberapa indikator antara lain tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf orang dewasa, rata-rata lama bersekolah, dan tingkat daya beli per kapita. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPJ) menggunakan indikator meliputi tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan, tingkat melek huruf laki-laki dan perempuan, rata-rata lama bersekolah untuk laki-laki dan perempuan, dan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) diukur melalui indikator sebagai berikut kelahiran yang tidak bisa bertahan sampai usia 40 tahun, tingkat buta huruf orang

dewasa, persentase penduduk tidak memiliki akses pada air yang aman untuk digunakan, dan persentase balita yang kurang makan. Sedangkan Pengukuran Pemberdayaan Jender (PPJ) meliputi jumlah anggota DPR dari laki-laki dan perempuan, persentase jumlah pegawai tingkat senior, manajer, professional, dan posisi tingkat teknis dari laki-laki dan perempuan, dan perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan.

Kemiskinan merupakan realitas multidimensional, oleh sebab itu pendekatan dalam menjelaskan kemiskinan juga bersifat multidimensional. Konsekuensi logis dari cara pandang seperti ini adalah pengentasan kemiskinan juga secara multidimecara multidimensional.

4. Sebab Kemiskinan

Apa yang menyebabkan orang menjadi miskin? Jawabannya jelas karena ketiadaan sumber ekonomi atau moda produksi. Kenapa mereka berada dalam ketiadaan sumber ekonomi atau moda produksi, sehingga dikatakan miskin? Berdasarkan literatur yang berkembang ada tiga sebab orang menjadi miskin, yaitu :

a. Alasan struktural

Kemiskinan disebabkan oleh struktur tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Kemiskinan seperti ini dikenal sebagai kemiskinan struktural. Konsep kemiskinan ini diperkenalkan di Indonesia oleh Selo Soemardjan dan kawan-kawan (1980). Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Golongan ini mencakup : para petani yang tidak memiliki tanahnya sendiri, walaupun memiliki hasilnya tidak mencukupi karena luasnya sangat kecil; kaum buruh tidak terpelajar atau terlatih (*unskilled labour*); pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas pemerintah (Soemardjan, 1980: 5).

Gagasan kemiskinan struktural merupakan ide yang bagus menurut Parsudi Suparlan (1984). Namun batasan atau definisi konsep kemiskinan struktural tersebut dikritik oleh Suparlan karena kurang tajam. Ada beberapa kelemahan atas definisi tersebut, yaitu satu, pernyataan “tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan” merupakan pernyataan

yang kurang tepat, karena dalam kenyataan banyak orang miskin ikut menggunakannya tetapi tidak sepenuhnya menikmati hasil penggunaannya apalagi memilikinya. Dua, frase “yang sebenarnya tersedia bagi mereka” merupakan pernyataan yang tidak masuk akal berdasarkan kenyataan sosial atau proses sosial yang terjadi dalam masyarakatbut manusia mana pun. Tiga, kata “tersedia” menuntut penjelasan mengenai siapa yang menyediakan, bagaimana penyediaan dan apa rupa yang disediakan, dan seterusnya; yang menuntut melibatkan suatu kompleks identitas dan golongan sosial dan proses sosial.

Berdasarkan atas kritik Suparlan tersebut, kita dapat mengonstruksi batasan baru tentang kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh (kelompok) orang tertentu karena struktur sosial masyarakat menghambat (kelompok) orang tersebut untuk mendapatkan pendapatan yang layak.

b. Alasan kultural

Kemiskinan dikarenakan budaya dari suatu komunitas tertentu membelenggu mereka dalam jerat kemiskinan atau disebut dengan kebudayaan kemiskinan. Kebudayaan kemiskinan merupakan konsep Oscar Lewis yang diperkenalkan secara luas oleh Parsudi Suparlan melalui bukunya *Kemiskinan di Perkotaan* (1984). Salah satu bab dari buku Suparlan tersebut merupakan tulisan Oscar Lewis yang berjudul *Kebudayaan Kemiskinan*. Dalam bab tersebut Lewis menjelaskan kebudayaan kemiskinan sebagai suatu adaptasi atau penyesuaian sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis, dan berciri kapitalisme (1984: 31).

Kebudayaan kemiskinan, lanjut Lewis, mencerminkan suatu usaha mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat meraih sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Jadi kebudayaan tersebut dipandang sebagai perwujudan upaya pemecahan setempat terhadap masalah-masalah yang tidak teratasi karena karena tidak terpenuhinya persyaratan tertentu dari lembaga-lembaga yang ada, atau karena ketidakmampuan atau ketidakpedulian dan kecurigaan pada lembaga-lembaga tersebut.

c. Alasan relasi eksploitatif

Kemiskinan disebabkan karena adanya relasi eksploitatif yang terjadi antar orang, antar masyarakat, atau antara orang dan kelompok masyarakat. Kemiskinan ini dapat juga disebut sebagai kemiskinan eksploitatif. Dia muncul dari hubungan-hubungan antar manusia, antar masyarakat, antar bangsa, atau antar negara yang bersifat eksploitatif. Gagasan kemiskinan eksploitatif muncul dari gagasan yang berkembang dalam teori keterbelakangan dan ketergantungan dalam studi pembangunan.

Kemiskinan menurut 2 versi sebelumnya berakar dari dalam masyarakat sendiri, yaitu struktur sosial dan budaya dari masyarakat. Penyebab dari dalam masyarakat sebagai akar kemiskinan dikritik oleh penganut teori keterbelakangan dan ketergantungan. Menurut teori ini, alasan internal masyarakat sebagai akar kemiskinan telah mengabaikan realitas kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di masa lampau. Keterbelakangan yang dialami oleh negara Dunia Ketiga disebabkan oleh terjadinya dominasi negara-negara yang dikenal sebagai Negara Maju. Melalui kolonialisme dan imperialisme, negara-negara Dunia Ketiga dihisap dan dieksploitasi seluruh sumberdaya yang ada (alam dan manusia), sehingga Negara Maju menjadi surplus sedangkan negara-negara Dunia Ketiga mengalami keterbelakangan dengan kemiskinannya (Suwarsono dan So, 1994).

5. Jenis kemiskinan

Para sosiolog membuat perbedaan kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut menunjuk pada suatu situasi di mana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum sehingga mendukung tingkat kesehatan fisik dan efisiensi minimum. Kemiskinan absolute diekspresikan dalam konsep tingkat ketercukupan kalori atau nutrisi.

Sedangkan kemiskinan relatif menunjukkan kemiskinan yang dikonstruksi dalam setting struktur dan budaya masyarakat, di mana orang dikatakan miskin apabila secara struktur, budaya dan ekonomi tidak mencukupi standar yang telah dikonstruksikan secara sosial politik. Sehingga ketika kemiskinan didefinisikan secara relatif, menurut standar yang dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka akan terjadi perbedaan tingkat kemiskinan antar masyarakat dan intra masyarakat dari waktu ke waktu.

6. Kemiskinan di perkotaan

Kemiskinan di perkotaan dapat ditelusuri melalui keberadaan perumahan atau rumah kumuh, gelandangan dan pengemis, dan sektor informal. Perumahan atau rumah kumuh di perkotaan ditemukan pada beberapa lokasi : satu, pada tanah kosong yang diterlantarkan oleh pemiliknya. Dua, pada bantaran sungai. Tiga, pada lahan tersembunyi di bawah jalan layang. Empat, pada pemukiman padat penduduk. Lima, pada tanah milik negara yang tidak terawasi. Perumahan atau rumah kumuh perkotaan tersebut rawan terjadi sengketa lahan dan penggusuran. Bila sengketa lahan yang berujung pada penggusuran, maka warga miskin perkotaan akan semakin bertambah kesengsaraannya.

Persoalan pengemis berakar pada ketidakmampuan para perantau di perkotaan untuk meraih pendapatan dari ekonomi formal perkotaan. Sebagian dari mereka memang merupakan pecundang dalam persaingan ekonomi perkotaan. Sebahagian lainnya secara sadar menjadikan pengemis sebagai profesi. Profesi pengemis merupakan strategi adaptasi untuk hidup layak. Di antara mereka memiliki induk semang, yang mengatur semua mekanisme kerja dan kebutuhan para pengemis. Jika tertangkap tangan dalam suatu razia, maka induk semang yang akan mengurusnya. Hasil mengamen disetorkan kepada induk semang untuk ditentukan persentase atau jumlah bagi hasilnya.

Masalah gelandangan bisa berasal dari dua sebab, yaitu merantau ke kota dengan modal nekat atau kalah dalam menghadapi persaingan di perkotaan sehingga tidak mampu bayar sewa atau kontrakan. Pada kasus perantau dengan modal nekat menjadi menggelandang, pada umumnya mereka tidak memiliki jaringan tempat meminta nasehat atau bantuan modal ketika mereka tiba pertama kali di kota. Mereka masuk ke kota bagaikan pengendara tanpa peta dan tidak ada pula tempat bertanya. Di antara para perantau dengan modal nekat ini, ada yang berhasil memasuki sektor informal atau menjadi pekerja upahan yang mau melakukan kerja apa saja asal mendapat imbalan. Para perantau dengan modal nekat tersebut tidak jarang memiliki kreativitas dan jiwa entrepreneur, sehingga pada akhirnya mereka bisa sukses dalam berbisnis dan memiliki rumah. Sedangkan gelandang karena kalah menghadapi persaingan di perkotaan juga bisa mengambil dua bentuk, yaitu kalah karena krisis ekonomi nasional / global atau kalah karena kebodohan. Krisis ekonomi telah menyebabkan banyak orang menjadi pecundang, di antaranya terpaksa menjadi gelandang, tanpa rumah. Namun kebanyakan mereka bisa bangkit

lagi dan memiliki rumah, tidak menggelandang. Kalah karena kebodohan sukar untuk bangkit lagi, kecuali belajar dari kebodohan dan berhati-hati tidak masuk pada lubang yang sama.

Sektor informal memang tidak identik dengan kemiskinan, tetapi kebanyakan orang miskin terlibat dalam aktivitas sektor informal. Kemampuan seseorang dalam mengelola sektor informal bisa mendulang banyak uang seperti para juragan warung Tegal dan juragan barang bekas, sehingga mereka bisa terentaskan dari kemiskinan. Diskusi tentang sektor informal akan dituntaskan pada bab berikutnya.

Bagaimana sebenarnya realitas kemiskinan perkotaan berdasarkan pengukuran yang ada? Untuk itu mari kita lihat apa yang dikatakan oleh data yang ditemukan oleh BPS. Pada tabel 5.2. memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun perdesaan menunjukkan penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 1998 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya pada daerah perkotaan dan perdesaan. Hal ini bisa dipahami karena pada masa itu terjadi krisis ekonomi di seluruh Indonesia. Namun perlahan terjadi pemulihan ekonomi yang ditandai dengan terjadinya pengurangan jumlah dan persentase pada penduduk miskin baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 5.2. Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin antara Kota dan Desa

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
1976	10,00	44,2	54,2	38,8	40,4	40,1
1980	9,5	32,8	42,3	29,00	28,4	28,6
1990	9,4	17,8	27,2	16,8	14,3	15,1
1998	17,6	31,9	49,5	21,92	25,72	24,2
2000	12,31	26,43	38,74	14,6	22,38	19,14
2005	12,4	22,7	35,1	11,68	19,98	15,97
2010	11,1	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36
2012	10,51	18,09	28,59	8,6	14,7	11,66
2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47

Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara statistik terlihat secara umum kemiskinan perkotaan di Indonesia mengalami pengurangan. Namun dari laporan terbaru dari BPS ternyata kemiskinan di Jakarta mengalami peningkatan pada tahun 2015. Hal ini bisa dicari salah satu akar penyebabnya dari kebijakan

pemerintahan DKI Jakarta yang telah dan sedang gencar dilakukan yaitu penggusuran masiv di banyak wilayah kota, sehingga warga kota tercerabut dari ruang ekonominya.

7. Kemiskinan Sebagai Hulunya

Bila kemiskinan dipandang sebagai suatu dinamika perkotaan, apakah kemiskinan dapat juga dilihat sebagai salah satu hulu utama dari problema, termasuk paradoks perkotaan? Benar, problema perkotaan seperti pelacuran, gelandangan, pencurian, perampokan, pengamen, dan lainnya sebagian besar berhulu dari kemiskinan. Kemiskinan bisa menyebabkan terjadinya segala sesuatu, bahkan sesuatu yang tidak terduga sekalipun. Karena tidak diberi uang lima ribu rupiah, misalnya, seseorang tega membunuh.

Berbagai penyakit masyarakat, yaitu suatu penyakit yang muncul karena perilaku menyimpang menurut konstruksi masyarakat dan atau hukum, akan muncul di tengah masyarakat. Penyakit masyarakat yang akan muncul antara lain tindak pidana seperti pencurian, penodongan, penjambretan dan perampokan, pelacuran, pengemis, pengedar barang terlarang seperti narkoba.

Pencurian, penodongan, pencopetan, penjambretan dan perampokan memang bukan penyakit masyarakat yang semuanya khas kota, karena paling tidak pencurian dan perampokan juga terjadi di desa. Sedangkan penodongan, pencopetan dan penjambretan merupakan tindak pidana khas kota. Tindak pidana penodongan biasanya terjadi pada lokasi kota yang gelap atau sepi. Pencopetan terjadi pada situasi di mana orang lengah karena tidak fokus seperti dalam angkutan kota atau berada di tengah kerumunan seperti pasar atau keramaian. Sedangkan penjambretan merupakan suatu tindak pidana mengambil barang orang lain secara paksa biasanya berupa tas atau dompet tangan. Penjambretan dilakukan biasanya dengan menggunakan kendaraan bermotor, pada umumnya motor roda dua, terhadap pengendara motor roda dua.

Pelacuran terjadi tidak semua karena kemiskinan, karena dalam kenyataannya juga ada yang dilakukan oleh bukan orang miskin harta, tetapi miskin moral. Salah satu kegiatan yang bisa menghasilkan uang banyak tanpa mengeluarkan banyak tenaga adalah pelacuran. Bagi orang miskin masuk dalam kegiatan pelacuran untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan bagi orang tidak miskin karena persoalan kesenjangan antara aspirasi dan alat pemenuhan aspirasi yang sah.

Ketika aspirasi tinggi misalnya ingin memiliki mobil mewah, apartemen bagus, tas Hermes, dan sebagainya; sementara pendapatannya sebagai artis, misalnya, tidak mencukupi, maka salah satu cara mudah untuk meraihnya adalah “nyambi” sebagai prostitusi. Fenomena pelacuran di kalangan bukan miskin harta di daerah perkotaan mengambil banyak bentuk seperti fenomena cewek cabean, mahasiswa panggilan, artis panggilan, dan sebagainya.

Fenomena perilaku menyimpang orang miskin moral di perkotaan terjadi tidak hanya terkait dengan syahwat, tetapi juga terkait tahta dan harta. Orang yang memiliki tahta di pemerintahan dan politik berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan berbagai “celah” yang ada. Para pejabat pemerintahan bermain pada celah “*asymmetric information*” dan waktu yang terkait dengan persetujuan tentang sesuatu. Meskipun keberadaan instansi pelayanan satu atap telah lama ada pada suatu pemerintahan daerah/kota, namun hampir tidak ada pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota serta lembaga vertikal di daerah seperti Badan Pertanahan Nasional, Kantor Imigrasi dan lain-lain memiliki standar operasional prosedur detil dan transparan yang menghubungkan antara pelayanan dengan tarif atau biaya dan waktu pelayanan serta hukuman terhadap institusi bila standar pelayanan tidak terpenuhi. Sehingga antara biaya dan waktu pelayan menjadi objek transaksional antara pemberi dan penerima pelayanan. Semua aktivitas tersebut terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Demikian pula para anggota legislatif yang memiliki hak inisiatif merancang dan membuat undang-undang serta menyetujui alokasi suatu anggaran kegiatan pembangunan tidak lepas dari persoalan miskin moral di perkotaan. Semua kegiatan tersebut berkorelasi dengan uang, secara halus maupun kasar. Pasal tertentu bisa dipesan untuk kepentingan perorangan, kelompok atau usaha tertentu bahkan untuk kepentingan asing. Muara dari semua itu adalah uang.

Kemiskinan moral di perkotaan tampaknya tidak hanya melibatkan para eksekutif dan legislatif saja, tetapi para yudikatif seperti aparat penegak hukum dari hakim, jaksa, polisi, sampai advokat juga mengalami pemiskinan moral. Kasus tertangkap (tangan) para hakim, jaksa, advokat dan polisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai indikator kemiskinan moral tersebut.

Program pengentasan kemiskinan (harta) di perkotaan telah banyak dilakukan dan telah menampakkan hasilnya berupa berkurangnya tingkat kemiskinan secara statistik. Sementara pengentasan kemiskinan moral sangat diperlukan untuk menyelematkan bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, perlu ada strategi bersama mengentaskan kemiskinan moral, dikenal sebagai KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), sehingga bangsa dan negara ini bisa menjadi menjadi bangsa dan negara besar dan digdaya. Salah satu strategi utama yang dipandang mangkus dapat dilakukan adalah keteladanan para pucuk pemimpin mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, khususnya keteladanan presiden. Perangkat hukum dan aturan perundangan Indonesia terkait dengan pemberantasan KKN dipandang telah memadai. Dalam masyarakat paternalistik seperti Indonesia, bila presiden memperlihatkan pemikiran, sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme maka pejabat yang di bawahnya tidak akan berani melakukan hal tersebut. Era sekarang tidak ada informasi yang bisa ditutupi, “tembok saja bisa berbicara”. Jika hanya sekedar ide (berbicara), sementara sikap dan perilaku berseberangan jalan dengan ide (*ngomong doang*), maka pemberantasan kemiskinan moral (KKN) jauh panggang dari api.